

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMANFAATAN TEKNOLOGI TERHADAP SISTEM
PENGELOLAAN DANA DESA SERTA DAMPAK
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN DELI SERDANG**

TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Akuntansi (M.Ak)
Dalam Bidang Akuntansi Sektor Publik*

Oleh:

ARFAH LUBIS
NPM: 1720050032



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2020**

PENGESAHAN TESIS

Nama : ARFAH LUBIS
NPM : 1720050032
Prodi/Konsentrasi : Magister Akuntansi/Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis : **PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI TERHADAP
SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA SERTA
DAMPAK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH
DESA DI KABUPATEN DELI SERDANG**

Pengesahan Tesis

Medan, 6 Maret 2020

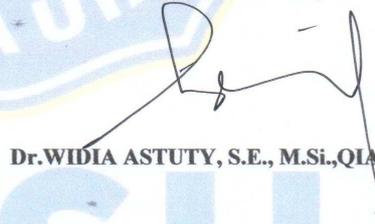
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA

Pembimbing II



Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA

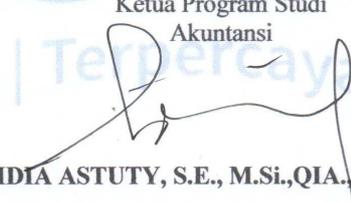
Diketahui

Direktur



Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP.

Ketua Program Studi
Akuntansi



Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA

PENGESAHAN

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA SERTA
DAMPAK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN DELI SERDANG**

ARFAH LUBIS

NPM :1720050032

Progran Studi : Magister Akuntansi

“Tesis ini Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji,yang dibentuk oleh
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,Dinyatakan Lulus
Dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang gelar Magister Akuntansi (M.Ak)
Pada Hari Jumat Tanggal 06 Maret 2020”

Panitia Penguji

1. **Dr. EKA NURMALA SARI, S.E.,M.Si.,Ak.,CA** 1.
Pembimbing I
2. **Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si.,QIA.,Ak., CA.CPA2**
Pembimbing II
3. **Dr. Hj. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si.,CA** 3.
Penguji I
4. **Dr.IRFAN,S.E, M.M** 4.
Penguji II
5. **Dr. BASTARI M,S.E.,M.M., BKP** 5.
Penguji III

PERNYATAAN

PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA SERTA DAMPAK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN DELI SERDANG

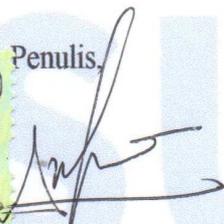
Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 06 Maret 2020



Penulis,


ARFAH LUBIS
NPM: 1720050032

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA SERTA
DAMPAK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN DELI SERDANG**

**ARFAH LUBIS
NPM: 1720050032**

ABSTRAK

Kinerja pemerintah desa merupakan hasil kerja atau prestasi aparatur desa dalam melaksanakan seluruh kegiatan secara ekonomis, efisiensi, efektivitas dan pelaporan yang memadai meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi terhadap sistem pengelolaan dana desa serta dampaknya terhadap kinerja pemerintah desa. Penelitian ini termasuk jenis penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Sampel penelitian ini sebanyak 162 aparatur desa dari 54 desa. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diukur dengan skala Likert. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis jalur. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh langsung kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi terhadap sistem pengelolaan dana desa. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa terdapat pengaruh langsung kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan sistem pengelolaan dana desa terhadap kinerja pemerintah desa. Hasil uji Sobel juga membuktikan bahwa sistem pengelolaan dana desa merupakan *intervening* positif antara pengaruh kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi terhadap kinerja pemerintah desa. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia memberikan pengaruh secara langsung sebesar 12,8% terhadap kinerja pemerintahan desa, tetapi akan lebih baik jika melalui sistem pengelolaan dana desa yaitu sebesar 15,8% (pengaruh tidak langsung). Pemanfaatan teknologi memberikan pengaruh secara langsung sebesar 14,7% terhadap kinerja pemerintahan desa, tetapi akan lebih baik jika melalui sistem pengelolaan dana desa yaitu sebesar 40,6% (pengaruh tidak langsung)

Kata Kunci: Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi, Sistem Pengelolaan Dana Desa, Kinerja Pemerintah Desa

**THE EFFECTS OF QUALITY OF HUMAN RESOURCES AND
TECHNOLOGY UTILIZATION OF VILLAGE FUND MANAGEMENT
SYSTEMS AND THE IMPACT OF THE VILLAGE GOVERNMENT
PERFORMANCE IN DELI SERDANG DISTRICT**

**ARFAH LUBIS
NPM: 1720050032**

ABSTRACT

The performance of the village government is the result of the work or achievements of the village apparatus in carrying out all activities economically, efficiently, effectively and adequately reporting including planning, implementation, reporting and accountability. This study aims to analyze the effect of the quality of human resources and the use of technology on village fund management systems and their impact on village government performance. This research is a causal associative type of research using a quantitative descriptive approach. The sample of this study were 162 village officials from 54 villages. Data collection techniques using a questionnaire that is measured by a Likert scale. Data analysis was performed using path analysis techniques. The results of the study prove that there is a direct effect on the quality of human resources, and the use of technology on the village fund management system. The results also prove that there is a direct effects on the quality of human resources, the use of technology and the village fund management system on the performance of the village government. The Sobel test results also prove that the village fund management system is a positive intervening between the effect of the quality of human resources and the use of technology on the performance of village government. The analysis showed that the quality of human resources had a direct effect of 12.8% on the performance of the village administration, but it would be better if through the village fund management system that is equal to 15.8% (indirect effect). The use of technology has a direct effect of 14.7% on the performance of village government, but it would be better if through the village fund management system that is equal to 40.6% (indirect effect).

Keywords: Quality of Human Resources, Technology Utilization, Village Fund Management System, Village Government Performance.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberi rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul: **“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa serta Dampak terhadap Kinerja Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Deli Serdang”**, dengan baik dan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Akuntansi, Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik, Program Studi Magister Akuntansi, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan berbagai pihak. Karena itu penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini. Ucapan terimakasih secara khusus disampaikan kepada: **Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si.**, selaku Pembimbing I, dan **Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA., CPA.**, selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan motivasi, saran, arahan dan bimbingan kepada penulis sejak awal penulisan hingga selesainya tesis ini. Terimakasih juga disampaikan kepada **Dr. Hj. Maya Sari, S.E., Ak., M.Si., CA., Dr. Irfan, S.E., M.M** dan **Dr. Bastari M, S.E., M.M., BKP** selaku Pembanding yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan penulisan tesis ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada para Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan pemerintahan desa yang telah membantu dan bersedia menjadi responden penelitian.

Kiranya seluruh perhatian, kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan rahmat, hidayah dan limpahan rezeki di dunia dan akhirat. Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian tesis ini, namun penulis menyadari masih banyak terdapat kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Kiranya isi tesis ini dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah berpikir bagi pembaca dan secara khusus bagi dunia Akuntansi. Amin.

Medan, Maret 2020
Penulis,

Arfah Lubis
NPM. 1720050032

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	16
1.3. Batasan Masalah	16
1.4. Rumusan Masalah	16
1.5. Tujuan Penelitian	17
1.6. Manfaat Penelitian	18
1.7. Keaslian Penelitian	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
2.1. Kajian Teoritis	21
2.1.1. Kinerja Pemerintahan Desa	21
2.1.1.1. Pemerintahan Desa	21
2.1.1.2. Kinerja Pemerintahan Desa	24
2.1.1.3. Indikator Kinerja Pemerintahan Desa	29
2.1.2. Sistem Pengelolaan Dana Desa	30
2.1.2.1. Dana Desa	30
2.1.2.2. Pengelolaan Dana Desa	34
2.1.2.3. Indikator Sistem Pengelolaan Dana Desa	37
2.1.3. Kualitas Sumber Daya Manusia	41
2.1.3.1. Pengertian Kualitas Sumber Daya Manusia	41
2.1.3.2. Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia	45

2.1.4. Pemanfaatan Teknologi	47
2.1.4.1. Pengertian Pemanfaatan Teknologi	47
2.1.4.2. Indikator Pemanfaatan Teknologi	51
2.2. Penelitian Terdahulu	52
2.3. Kerangka Konseptual	57
2.3.1. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pemerintahan Desa	58
2.3.2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Kinerja Pemerintahan Desa	59
2.3.3. Pengaruh Sistem Pengelolaan Dana Desa terhadap Kinerja Pemerintahan Desa	60
2.3.4. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa	62
2.3.5. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa	63
2.3.6. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pemerintahan Desa melalui Sisitem Pengolahan Dana Desa	64
2.3.7. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Melalui Sistem Pengelolaan Dana Desa	66
2.4. Hipotesis	68
BAB III METODE PENELITIAN	70
3.1. Pendekatan Penelitian	70
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian	68
3.3. Populasi dan Sampel	71
3.3.1. Populasi Penelitian	71
3.3.2. Sampel Penelitian	71
3.4. Definisi Operasional Variabel	72
3.5. Teknik Pengumpulan Data	74
3.6. Teknik Analisis Data	75

3.6.1. Uji Kualitas Data	75
3.6.1.1. Uji Validitas	75
3.6.1.2. Uji Reliabilitas	78
3.6.2. Statistik Deskriptif	79
3.6.3. Analisis Jalur	79
3.6.4. Uji Sobel	82
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	83
4.1. Hasil Penelitian	83
4.1.1. Gambaran Karakteristik Responden	83
4.1.2. Deskriptif Data Penelitian	84
4.1.3. Analisis Deskriptif	89
4.1.4. Analisis Korelasi Antar Variabel	90
4.1.5. Analisis Jalur Substruktur 1	91
4.1.6. Analisis Jalur Substruktur 2	94
4.1.7. Perhitungan Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung	98
4.1.8. Uji Sobel	99
4.2. Pembahasan	102
4.2.1. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pemerintahan Desa	102
4.2.2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Kinerja Pemerintahan Desa	106
4.2.3. Pengaruh Sistem Pengelolaan Dana Desa terhadap Kinerja Pemerintahan Desa	109
4.2.4. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa	112
4.2.5. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa	114
4.2.6. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pemerintahan Desa melalui Sistem Pengelolaan Dana Desa	117

4.2.7. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Melalui Sistem Pengelolaan Dana Desa.....	119
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	121
5.1. Kesimpulan	121
5.2. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125

DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH

ADD	: Alokasi Dana Desa
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBDesa	: Anggaran Pendapatan Belanja Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APIP	: Aparat Pengawas Intern Pemerintah
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BPJK	: Bina Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BUMADesa	: Badan Usaha Milik Antar Desa
BUMDesa	: Badan Usaha Milik Desa
<i>Database</i>	: Basis data atau kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.
<i>Electronic Commerce</i>	: Perdagangan elektronik, yaitu penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui elektronik seperti internet atau televisi.
ICW	: <i>Indonesia Corruption Watch</i> , sebuah organisasi non pemerintah yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia
Internet	: <i>Interconnection-Networking</i> , suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media lainnya dengan menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket.
Intranet	: Sebuah jaringan privat (privat network) yang menggunakan protokol-protokol internet (TCP/IP) untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dalam lingkup tertentu (terbatas), misalnya dalam lingkup sebuah kantor.
Kades	: Kepala Desa

KPMD	: Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
Mainframe	: Pada umumnya digunakan dalam perusahaan atau organisasi yang menangani data seperti sensus, riset penelitian, keperluan militer atau transaksi finansial.
Microcomputer	: Sebuah kelas komputer yang menggunakan microprosesor sebagai CPU utamanya.
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NTT	: Nusa Tenggara Timur
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
Perdes	: Peraturan Desa
PTPKD	: Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
RAPBDesa	: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Raperdes	: Rancangan Peraturan Desa
RKD	: Rekening Kas Desa
RKPDesa	: Rencana Kerja Pemerintah Desa
RKUD	: Rekening Kas Umum Daerah
RKUN	: Rekening Kas Umum Negara
RPJM	: Rancangan Pembangunan Jangka Menengah
Sarpras	: Sarana dan prasarana
SDM	: Sumber daya manusia
Sekdes	: Sekretaris Desa
Siltap	: Penghasilan tetap
SISKEUDES	: Sistem Keuangan Desa, sebuah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
Software	: Istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital termasuk program komputer, dokumentasi dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer.
SPSS	: <i>Statistical Package for the Social Sciences</i> , aplikasi untuk melakukan analisis statistik

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Jumlah Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang	3
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	52
Tabel 3.1. Waktu Penelitian	71
Tabel 3.2. Sampel Penelitian (Desa)	72
Tabel 3.3. Variabel Operasional, Indikator dan Skala	73
Tabel 3.4. Skala Likert	75
Tabel 3.5. Validitas Variabel Kualitas SDM (X_1)	76
Tabel 3.6. Validitas Variabel Pemanfaatan Teknologi (X_2)	76
Tabel 3.7. Validitas Variabel Sistem Pengelolaan Dana Desa (Z)	77
Tabel 3.8. Validitas Variabel Kinerja Pemerintah Desa (Y)	78
Tabel 3.9. Hasil Uji Reliabilitas	79
Tabel 4.1. Karakteristik Responden	83
Tabel 4.2. Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Berdasarkan Indikator Untuk Setiap Dimensi Kualitas SDM ...	85
Tabel 4.3. Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Berdasarkan Indikator Untuk Setiap Dimensi Pemanfaatan Teknologi	86
Tabel 4.4. Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Berdasarkan Indikator Untuk Setiap Dimensi Sistem Pengelolaan Dana Desa	87
Tabel 4.5. Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Berdasarkan Indikator Untuk Setiap Dimensi Kinerja Pemerintah Desa	88
Tabel 4.6. Statistik Deskriptif	89
Tabel 4.7. Matriks Korelasi Antar Variabel	90
Tabel 4.8. Koefisien Jalur Substruktur 1	91
Tabel 4.9. Koefisien Determinasi Substruktur 1	93
Tabel 4.10. ANOVA Substruktur 1	94
Tabel 4.11. Koefisien Jalur Substruktur 2	94
Tabel 4.12. Koefisien Determinasi Substruktur 2	96
Tabel 4.13. ANOVA Substruktur 2	97
Tabel 4.14. Nilai Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung	98

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Pendapatan Desa	27
Gambar 2.2. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa	35
Gambar 2.3. Kerangka Konseptual Penelitian	68
Gambar 3.1. Diagram Analisis Jalur	80
Gambar 4.1. Diagram Jalur Persamaan Substruktur 1	93
Gambar 4.2. Diagram Jalur Persamaan Substruktur 2	96
Gambar 4.3. Diagram Model Persamaan Dua Jalur	97

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Kuesioner Penelitian	132
Lampiran 2. Tabulasi Data Penelitian	139
Lampiran 3. Uji Kualitas Data (Validitas dan Reliabilitas)	155
Lampiran 4. Rekapitulasi Data Penelitian	160
Lampiran 5. Analisis Data	164

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun, fenomena yang ada di beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Peran dari pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Pemerintah desa diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Hal itu termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan kebermanfaatannya dari program-program yang dikelola oleh pemerintah desa.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa (Wardani dan Andriyani, 2017:54).

Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni dana desa. Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima secara bertahap. Adanya dana desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Tetapi dengan adanya dana desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaannya, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Desa tidak hanya sekedar jadi obyek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan.

Fenomena yang terjadi pada pemerintahan desa saat ini ialah penyaluran dana desa yang sangat besar bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Dalam APBN tahun 2015, dialokasikan dana desa lebih kurang 20,7 triliun rupiah kepada seluruh desa di Indonesia. Angka tersebut terus meningkat hingga lebih kurang 77

triliun rupiah pada tahun 2018. Demikian halnya dengan Kabupaten Deli Serdang yang merupakan salah satu Kabupaten terbesar menerima dana desa dari pemerintah pusat.

Tabel 1.1. Jumlah Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang

No.	Tahun	Jumlah Dana Desa (Rp)
1	2015	27.634.246.000
2	2016	237.763.644.000
3	2017	303.060.286.000
4	2018	271.906.373.000
5	2019	306.386.948.000

Sumber: Data Diolah, 2019.

Tabel 1.1 di atas, menunjukkan adanya peningkatan penerimaan dana desa yang bersumber dari APBN untuk Kabupaten Deli Serdang dari tahun ke tahun. Pembagian dana desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.

Secara umum, sejak program dana desa dijalankan tahun 2015, begitu banyak permasalahan yang terekam di antaranya adanya pemotongan dari pemerintah kabupaten seperti di Jawa Timur; penyimpangan dana desa seperti di NTT; masalah administratif seperti birokrasi penyaluran dana yang berbelit serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang kurang lengkap atau tidak lengkapnya

dokumen yang disyaratkan seperti Peraturan Bupati, APBD dan Desa (APBDes), dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa yang memuat peraturan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa; kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan dana serta minimnya kualitas sumber daya manusia; kurangnya pendampingan dan kualitas pendamping; dan minimnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa (Lengkong dan Tasik, 2018:16).

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dijelaskan bahwa siklus pengelolaan keuangan desa yaitu dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah desa agar menjadi lebih baik. Sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan efektif dan efisien.

Sari (2010:127), menjelaskan bahwa “penyelenggaraan pemerintahan yang baik membutuhkan diterapkannya prinsip-prinsip *good governance*, termasuk dalam bidang pengelolaan keuangan daerah”. Menurut Sari (2013:25), “konsep *good governance* merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh sektor publik khususnya adalah pemerintah daerah”. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih responsif atau cepat dan tanggap. Oleh karena itu, pemerintah daerah/desa saat ini menjadi salah satu objek perhatian pengawasan dalam kerjanya.

Kinerja dalam bahasa Inggris, sering diartikan dengan kata *performance* yang mempunyai arti pelaksanaan. Manfaat pengukuran kinerja adalah memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja (Sari, 2018:19).

Mulyadi (2011:337), menjelaskan bahwa “kinerja adalah keberhasilan personel, tim, atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan”. Kinerja merupakan pencapaian dari suatu usaha entah itu berhasil atau tidak sesuai dengan tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja sektor publik bukan hanya bagaimana kemampuan uang publik dibelanjakan, tetapi dilihat juga dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektifitas, dan tentunya dari segi *outcome*. Sementara menurut Nawawi (2013:48), “kinerja pemerintah yang baik tidak hanya sekedar *input* atau *output* namun sebuah orientasi pada hasil”.

Namun fakta di lapangan selama ini, menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan desa masih sangat kurang khususnya terkait dengan dana desa. Hal ini terlihat dari pertanggungjawaban dan pelaporan mengenai dana desa pada pemerintahan desa di beberapa desa di Indonesia masih belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan inventarisir setidaknya terdapat 14 potensi permasalahan yang mencakup aspek regulasi dan kelembagaan, tatalaksana, pengawasan dan aspek sumber daya manusia. Lembaga Swadaya

Masyarakat ICW dalam laporan tahunannya menuliskan teridentifikasi tujuh bentuk korupsi yang umumnya dilakukan pemerintah desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, laporan fiktif, pemotongan anggaran dan suap (Ash-shidiqq dan Wibisono, 2018:111). Pada tahun 2017, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan juga menemukan lebih dari 15.000 kasus terkait lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa.

Kabupaten Deli Serdang yang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara sendiri memiliki 380 desa yang merupakan terbanyak ke-4 di Provinsi Sumatera Utara, tantangan akan penggunaan dana desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemanfaat yang sesuai guna mendukung kinerja keuangan pada sektor publik dirasa perlu untuk dilakukan dan diterapkan oleh desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang, sebab sejak digulirkanya dana desa pada pertengahan tahun 2015, sejumlah permasalahan dan penyelewengan dana desa terjadi di Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabuapten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019, dijelaskan bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran Dana Desa dillakukan secara bertahap dengan ketentuan yaitu: tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20%; tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu

keempat bulan Juni sebesar 40%; dan tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40%. Namun fakta yang ada, penyaluran dana desa selalu mengalami keterlambatan seperti halnya penyaluran Dana Desa tahap I baru diterima sebagian besar desa di Kabupaten Deli Serdang pada bulan Juli sedangkan tahap II diterima di bulan Agustus. Umumnya beberapa hal yang menjadi kendala dan keterlambatan dalam penyaluran dana desa adalah dikarenakan persyaratan yang ditentukan tidak atau kurang dipenuhi seperti APB Desa belum atau terlambat ditetapkan, perubahan regulasi, dan keterlambatan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa.

Fenomena keterlambatan penyaluran Dana Desa termasuk di Kabupaten Deli Serdang juga mengindikasikan masih kurang atau buruknya kinerja pemerintahan desa, salah satunya terkait laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya. Serta fungsi pengawasan yang dipegang oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai masih kurang maksimal sehingga pelaksanaan pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi terjerat kasus hukum. Bahkan hingga saat ini Pihak Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, masih terus menerima pengaduan dari warga masyarakat atas dugaan penyelewengan dana desa yang diduga dilakukan oleh oknum Kepala Desa.

Pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan desa terkait dana desa diantaranya sistem pengelolaan dana desa, kualitas sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi dan lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014, dijelaskan bahwa

sistem pengelolaan dana desa merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggung jawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Regulasi memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan desa, karena regulasi merupakan dasar dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa diatur oleh sekumpulan regulasi mulai dari yang tertinggi yaitu Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa sampai regulasi yang paling bawah yaitu peraturan desa. Dengan adanya sekumpulan peraturan yang terkait dengan desa dan pengelolaan keuangannya, maka diharapkan dapat meningkatkan pembangunan masyarakat desa terutama dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang lebih akuntabel dan transparan. Selain itu, dengan adanya pengelolaan keuangan desa yang baik diharapkan dapat mempengaruhi kinerja pemerintah desa, dimana semakin tinggi aturan yang diterapkan oleh perangkat desa maka akan meningkatkan kualitas kinerja perangkat desa (Rulyanti, dkk, 2017:324).

Pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang sangat penting yang harus dilaksanakan oleh aparatur desa, dimana untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa salah satunya adalah dengan melaksanakan sistem pengelolaan keuangan desa secara lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian Sugeng (2014), menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Apabila pengelolaan keuangan daerah dapat dikelola dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel maka hal tersebut dapat meningkatkan kinerja

pemerintah daerah khususnya pada sektor pemenuhan pelayanan publik yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat (Sugeng, 2014). Adanya pengelolaan keuangan daerah/desa dapat meningkatkan kinerja suatu instansi pemerintah dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, sehingga dengan adanya pengelolaan keuangan desa dapat mendorong terwujudnya kinerja pemerintah desa yang lebih berkualitas, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dana desa di beberapa desa di Kabupaten Deli Serdang masih belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemunculan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan-peraturan pendukungnya memacu agar keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran melalui pelaksanaan akuntansi desa. Pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa agar dapat mengelola dan bertanggungjawabkan penggunaan dana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilakukan sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 dan secara spesifik diatur secara rinci dalam Peraturan Bupati Deli Serdang No. 03 Tahun 2019. Sehingga dana desa diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi semua masyarakat desa.

Pengelolaan dana desa juga sering kali menimbulkan berbagai masalah lain yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan seperti kecurangan yang dilakukan oleh oknum pihak pemerintah desa. Kurnia seperti dikutip Hendri, dkk,

(2016:545), menjelaskan bahwa: berdasarkan survey yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2014, pemerintah desa masih mengalami berbagai hambatan dalam pengelolaan keuangan desa, di antaranya masalah kondisi tata kelola desa dan sarana prasarana yang bervariasi, kualitas SDM (termasuk aparat kecamatan), dan pembinaan APIP Kabupaten/Kota yang belum didukung SDM memadai. Akibatnya, masih terdapat desa yang belum menyusun RKPDesa, dana dari bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten tidak disajikan dalam RAPBDesa dan realisasinya, belum adanya prosedur untuk menjamin tertib administrasi dan kekayaan milik desa, serta proporsi penggunaan ADD yang belum sesuai ketentuan 30% operasional dan 70% pemberdayaan.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah desa baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem pengelolaan dana desa adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Astuty (2015:82), menjelaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan sebagian besar dipengaruhi oleh manusia pelaksananya. Lebih lanjut menurut Astuty (2012:163), “peran manusia dalam anggaran sangat besar karena seluruh tahapan anggaran melibatkan manusia, anggaran dibuat oleh manusia, diperbaiki oleh manusia, dan pencapaiannya dilaksanakan oleh manusia”.

Hariani (2017a), menjelaskan bahwa “pembangunan ekonomi melibatkan SDM sebagai salah satu pelaku pembangunan”. Lebih lanjut Hariani (2017b), menjelaskan bahwa “kemajuan teknologi yang erat kaitannya dengan faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu sumber daya manusia”. Hal ini menunjukkan bahwa manusia juga merupakan satu-satunya sumber daya yang membuat sumber daya lainnya bekerja dan berdampak langsung terhadap

kesejahteraan organisasi. Oleh karena itu sistem yang sebaik apapun akan sia-sia begitu saja apabila tidak ditunjang oleh kualitas SDM yang memadai.

Ndraha dalam Firdaus, dkk (2015:47), menjeaskan bahwa SDM yang berkualitas adalah sumber daya yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti kecerdasan, kreativitas, dan imajinasi. Afrianti dalam Wardani dan Andriyani (2017:89), menjelaskan bahwa kualitas SDM adalah kemampuan SDM untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.

Namun kenyataan yang ada masih menunjukkan kualitas SDM di beberapa pemerintahan desa khususnya di Kabupaten Deli Serdang masih sangat kurang. Hal ini ditunjukkan dari beberapa kasus korupsi dana desa serta adanya dugaan penyelewengan dana desa di beberapa desa di Kabupaten Deli Serdang. Beberapa contoh kasus korupsi dan penyelewengan dana desa diantaranya yaitu kasus korupsi penyimpanan dana desa sebesar Rp. 782 juta pada tahun anggaran 2016 yang dilakukan oleh Kepala Desa Percut Kecamatan Percut Seituan yang berinisial CA. Kerugian negara atas kasus korupsi dana desa itu mencapai Rp. 400 juta dan uang tersebut digunakan tersangka untuk kepentingan pribadi (Merdeka.com, 2017). Kasus lainnya yaitu kasus korupsi dana desa yang dilakukan Plt Kepala Desa Paya Itik Kecamatan Galang berinisial M yang terbukti melakukan korupsi APBDesa dengan merugikan negara sebesar Rp. 162.505.000 untuk tahun 2016 sampai tahun 2017 (Tribun-Medan.com, 2019).

Fenomena tentang kasus korupsi dana desa serta adanya dugaan penyelewengan dana desa di beberapa desa di Kabupaten Deli Serdang

menunjukkan kualitas SDM yang masih kurang terkait pengelolaan dana desa. Kepala desa selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dana desa dituntut agar lebih kompeten dan akuntabel dalam mengelola dana desa. Terlebih lagi kemampuan sebagian besar SDM yang mengelola keuangan desa dan yang mengawasi juga diragukan dan menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Dalam pengelolaan keuangan desa yang baik, kepala desa dan perangkat desa yang terkait dengan sistem pelaporan keuangan harus memiliki SDM yang berkualitas.

SDM yang berkualitas tersebut harus didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. SDM yang berkualitas dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena SDM tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu (Sembiring, 2013:2). Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002:146). Oleh sebab itu diperlukan adanya pengoptimalisasian SDM dengan penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya.

Menurut Wardani dan Andriyani (2017:89), “dilihat dari kualitas SDM desa yang kurang tanpa adanya kompetensi di bidang akuntansi dalam menjalankan tugasnya membuat banyak pihak yang meragukan proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa”. Hal ini menyebabkan informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keterandalan. Maka diperlukan adanya pengoptimalisasian SDM dengan penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya.

Hasil penelitian yang dilakukan Warisno seperti dikutip oleh Firdaus, dkk (2015:47), mengemukakan bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang baik SKPD harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hasil penelitian Hendri, dkk (2016), menunjukkan bahwa terdapat arah hubungan yang positif dan signifikan sumber daya manusia terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian Munti dan Fahlevi (2017), menyimpulkan bahwa kapasitas aparatur desa memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Lebih lanjut hasil penelitian Rulyanti, dkk (2017), menyimpulkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa dan kinerja pemerintah desa. Hasil penelitian Wardani dan Andriyani (2017), menyimpulkan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa. Dari beberapa hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas SDM merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada pemerintahan desa.

Faktor lain yang juga mempengaruhi kinerja pemerintahan desa terkait pengelolaan dana desa adalah pemanfaatan teknologi. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan

kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, dan mempermudah penyampaian informasi keuangan ke publik. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Yosefrinaldi (2013:12), menyebutkan bahwa “semakin besar pemanfaatan teknologi informasi maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula”. Wardani dan Andriyani (2017:89), menyebutkan bahwa “pemanfaatan teknologi dapat mengurangi kesalahan dalam proses data, sehingga laporan keuangan menjadi andal”. Oleh karena itu, perlu adanya pembekalan pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi yang dapat mendukung keterandalan pelaporan keuangan desa. Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud seperti penggunaan komputer dan perangkat lunak secara optimal, akan berdampak pada pemrosesan transaksi yang lebih cepat dan perhitungannya juga akan memiliki tingkat keakurasian yang tinggi sehingga akan berujung pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang tepat waktu karena pemanfaatan teknologi akan mengurangi kesalahan yang bersifat material (Primayana, dkk, 2014:10).

Menurut Haryani dan Sudrajat (2016:114), “pemerintahan desa berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan desa, dan menyalurkan informasi keuangan desa kepada masyarakat agar transparansi dan akuntabilitas terjamin”. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain

berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi SDM yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor penggunaan teknologi informasi di pemerintahan desa belum optimal (Haryani dan Sudrajat, 2016:114).

Hasil penelitian Firdaus, dkk (2015), menyimpulkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian Aziiz dan Prastiti (2019), juga menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Kedua hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada pemerintahan desa.

Namun, kenyataan di beberapa desa di Kabupaten Deli Serdang masih terdapat beberapa kendala dalam pemanfaatan teknologi seperti masih kurang atau lemahnya jaringan internet dan tidak tersedianya jaringan wifi di beberapa kantor desa, kondisi perangkat komputer yang masih kurang baik, serta sering terjadi pemadaman listrik yang dapat menghambat penggunaan perangkat komputer. Teknologi informasi yang ada, tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal.

Berdasarkan berbagai fenomena dan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan dana desa serta dampaknya terhadap kinerja pemerintah desa dengan melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa serta Dampak terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kabupaten Deli Serdang”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan uraian pada latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah, antara lain:

1. Adanya permasalahan dan penyelewengan terkait dana desa di beberapa desa di Indonesia termasuk di Kabupaten Deli Serdang.
2. Kinerja pemerintah desa terkait dana desa di beberapa desa masih belum berjalan secara ekonomis, efektif dan efisien, sehingga membuat banyak pihak yang meragukan proses pertanggungjawabannya.
3. Sistem pengelolaan dana desa di beberapa desa juga masih belum terlaksana dengan baik sesuai perundang-undangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawabannya.
4. Kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya, hal ini terlihat dari adanya kasus korupsi dan pengelewengan dana desa.
5. Pemanfaatan teknologi di pemerintahan desa masih belum dimanfaatkan secara optimal.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada pengaruh kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi terhadap sistem pengelolaan dana desa serta dampak terhadap kinerja pemerintah desa di Kabupaten Deli Serdang.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, rumusan masalah pada penelitian ini dapat disusun secara rinci sebagai berikut:

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa?
2. Apakah pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa?
3. Apakah sistem pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa?
4. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap sistem pengelolaan dana desa?
5. Apakah pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap sistem pengelolaan dana desa?
6. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa melalui sistem pengelolaan dana desa?
7. Apakah pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa melalui sistem pengelolaan dana desa?

1.5. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintahan desa.
2. Menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap kinerja pemerintah desa.
3. Menganalisis pengaruh sistem pengelolaan dana desa terhadap kinerja pemerintah desa.

4. Menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap sistem pengelolaan dana desa.
5. Menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap sistem pengelolaan dana desa.
6. Menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintah desa melalui sistem pengelolaan dana desa.
7. Menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap kinerja pemerintah desa melalui sistem pengelolaan dana desa.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan wawasan dalam bidang penelitian khususnya mengenai kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan pengaruhnya terhadap sistem pengelolaan dana desa serta dampak terhadap kinerja pemerintahan desa.
2. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan tambahan literatur dalam pengembangan ilmu akuntansi maupun pengetahuan di bidang pemerintahan, khususnya terkait dengan pengaruh kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi terhadap sistem pengelolaan dana desa serta dampak terhadap kinerja pemerintahan desa.
3. Bagi pemerintah khususnya pemerintahan desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi dan masukan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa melalui sistem pengelolaan dana desa yang baik, peningkatan kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi.

1.7. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa serta Dampak terhadap Kinerja sudah pernah diteliti oleh penelitian sebelumnya. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu:

1. Firdaus, dkk. (2015), yang meneliti “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Kebijakan Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh”. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada variabelnya dan lokasi penelitiannya, selain itu penelitian tersebut tidak memiliki variabel intervening sedangkan penelitian ini menggunakan variabel intervening dan menggunakan analisis jalur.
2. Sapto Hendri BS, dkk. (2016), yang meneliti “Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lombok Tengah”. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada variabel bebasnya dan lokasi penelitiannya, serta penelitian tersebut tidak memiliki variabel intervening sedangkan penelitian ini menggunakan variabel intervening dan menggunakan analisis jalur.
3. Siti Khoiriah dan Utia Meylina (2017), yang meneliti “Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa”. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada variabelnya, lokasi serta pendekatan penelitiannya yaitu menggunakan pendekatan yuridis-normatif sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif.

Sejauh hasil penelusuran yang telah dilakukan, penelitian ini belum pernah dilakukan, dan tidak ada dijumpai hasil penelitian lain sebelumnya baik dalam bentuk skripsi, tesis maupun karya ilmiah lain. Oleh karena itu, penelitian ini adalah asli dan bukan duplikasi atau plagiat, kecuali kutipan-kutipan dari buku maupun jurnal yang semuanya telah dijelaskan sumbernya sehingga dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Kinerja Pemerintahan Desa

2.1.1.1. Pemerintahan Desa

Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia mengingat bahwa desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang memiliki peranan fundamental bagi negara. Desa berfungsi sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan di Indonesia, baik di bidang pemerintahan ekonomi dan sosial kemasyarakatan, maupun tugas-tugas pembantuan, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pada perjalanannya, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis agar dapat melaksanakan pemerintahan dan membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Noverman, 2018:69).

Istilah desa berasal dari bahasa India, *Swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup dengan satu norma dan memiliki batas wilayah yang jelas (Yulianti dan Mangku, 2003:23). Zakaria seperti dikutip dalam Candra (2014:12), menyatakan bahwa “desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri”. Desa disebut juga wilayah yang memiliki batas tertentu baik berupa fisik maupun kasat mata yang memiliki unsur tanah,air yang memiliki manfaat sebagai sumber mencari nafkah.

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang mengatur tentang desa, dijelaskan bahwa “desa merupakan kesatuan wilayah hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang dilalui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten”. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, yang mengatur tentang desa, dijelaskan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sering diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup sederhana, umumnya bekerja di sektor pertanian, ikatan sosial, adat dan tradisi mereka masih kuat, bersifat jujur dan bersahaja, serta berpendidikan relatif rendah. Desa sering diartikan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dalam lingkungan yang warganya saling kenal mengenal, corak kehidupan mereka relatif homogen, dan banyak tergantung kepada alam. Setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, eksistensi desa tampak memperoleh keistimewaan setara dengan pemerintahan daerah.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dijelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, juga mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem kesatuan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian desa yang telah dijelaskan di atas menempatkan desa sebagai suatu pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dan warganya termasuk juga dalam hal keuangan. Desa juga merupakan suatu wilayah tertentu yang memiliki dasar hukum dan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam pemerintahan NKRI. Kemudian desa mempunyai unsur-unsur sebagaimana halnya sebuah negara. Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa, unsur-unsur yang harus dimiliki oleh desa yaitu wilayah, penduduk, dan pemerintah.

Pemerintahan desa merupakan bagian yang terintegrasi dengan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan daerah baik kabupaten/kota dan juga provinsi terdiri dari kumpulan desa-desa hingga membentuk pemerintahan yang lebih tinggi di atasnya (Khoiriah dan Meylina, 2017:22). Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah

Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Selain kepala desa dan perangkat desa, terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pemerintahan desa memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat dalam wilayahnya demi mewujudkan pembangunan pemerintah dan merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat (Sujarweni, 2015:7). Menurut Widjaja dalam Putriyanti (2012:32), “penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya”. Kepala desa bertanggung jawab kepada BPD serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenangnya kepada Bupati. Dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

2.1.1.2. Kinerja Pemerintahan Desa

Desa memiliki hak, wewenang, dan kewajiban dalam menjalankan semua sistem organisasi di pemerintahan desa baik dari segi peraturan hukum, pengelolaan keuangan, dan aset desa serta meningkatkan sumber daya manusianya. Terkait pengelolaan keuangan desa yang mana pelaksanaannya akan bergantung kepada kinerja perangkat desa dalam mencapai tujuan pembangunan

dan pemberdayaan. Kinerja pada instansi pemerintah termasuk pemerintahan desa kini cukup menarik perhatian dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik.

Kinerja dalam bahasa Inggris, sering diartikan dengan kata *performance* yang mempunyai arti pelaksanaan. Manfaat pengukuran kinerja adalah memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja (Sari, 2018:19). Menurut Wibisono dalam Sari (2014:59), “evaluasi kinerja merupakan penilaian kinerja yang diperbandingkan dengan rencana atau standar-standar yang telah disepakati”.

Pengukuran kinerja merupakan tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang terdapat di dalam suatu organisasi, hasil pengukuran kemudian dipergunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana organisasi memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian (Sari, 2015:29).

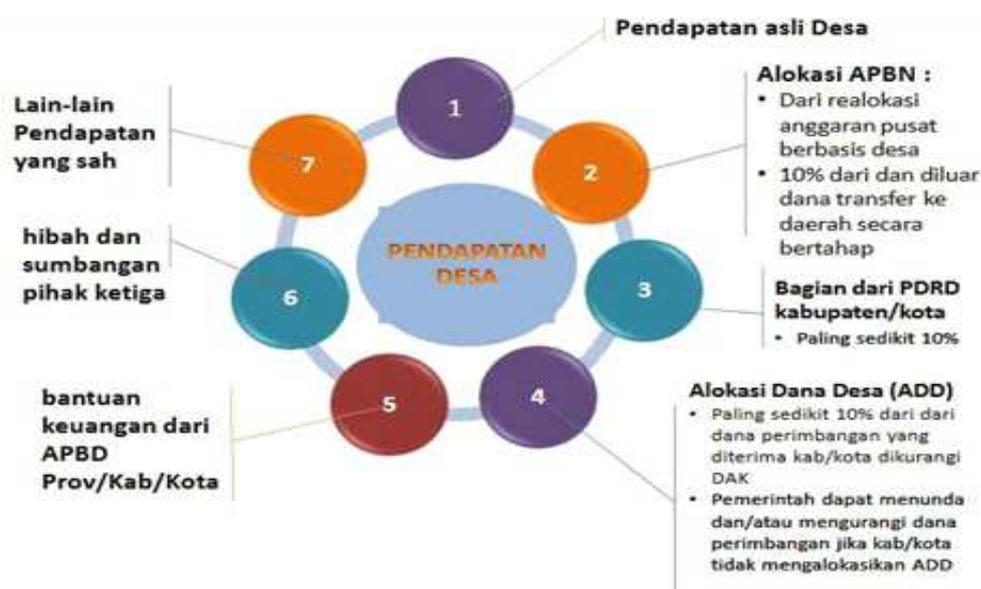
Mulyadi (2011:337), menjelaskan bahwa “kinerja adalah keberhasilan personel, tim, atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan”. Menurut Sukarno seperti dikutip oleh Sari dan Saragih (2009:40), “kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi”. Witmore dalam

Wanda (2016:194), menyatakan bahwa “kinerja bisa diketahui hanya jika individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai”. Tanpa ada tujuan atau target kinerja, seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Bastian (2010:274), menjelaskan bahwa kinerja organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi.

Kinerja merupakan pencapaian dari suatu usaha entah itu berhasil atau tidak sesuai dengan tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja sektor publik bukan hanya bagaimana kemampuan uang publik dibelanjakan, tetapi dilihat juga dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektifitas, dan tentunya dari segi *outcome*. Pengukuran kinerja sektor publik dilaksanakan untuk menilai pencapaian organisasi melalui alat ukur keuangan dan nonkeuangan. Untuk melakukan pengukuran kinerja dengan melihat variabel kunci kemudian dikembangkan pada unit kerja yang bersangkutan untuk dapat diketahui tingkat pencapaian kinerja, dari sinilah kita bisa mengetahui kinerja suatu organisasi sudah sesuai dengan yang direncanakan meliputi ekonomis, efisiensi, efektivitas, dan lain-lain atau tidak. Jika tidak tercapai maka dikatakan bahwa pengukuran kinerja suatu organisasi tidak berjalan sebagaimana semestinya dan jika pencapaiannya melebihi dari yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan bahwa entitas tersebut memiliki kinerja yang sangat baik (Halim, 2012: 142).

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara langsung maupun tidak langsung (Halim, 2007:230). Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah).

Sumber-sumber dari keuangan desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa antara lain: (1) Pendapatan Asli Desa; (2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa); (3) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota; (4) Alokasi Dana Desa; (5) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota; (6) Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga; serta (7) Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.



Gambar 2.1. Pendapatan Desa

Menurut Nawawi (2013:48), “kinerja pemerintah yang baik tidak hanya sekedar *input* atau *output* namun sebuah orientasi pada hasil”. Kinerja pemerintah harus memiliki hasil, manfaat dan dampak yang positif bagi masyarakat, sehingga pencapaian serapan anggaran saja tidak dapat dijadikan ukuran yang memadai dan dapat menggambarkan manajemen kinerja pemerintahan yang baik. Analisis kinerja keuangan bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah, mengukur potensi pendapatan atau sumber ekonomi, mengetahui kondisi keuangan, mengetahui kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya, dan menyakini bahwa pemerintah telah melaksanakan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Halim (2014:52), menjelaskan bahwa salah satu alat ukur yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Komponen APBDesa yang diukur antara lain penerimaan desa dan belanja desa. Belanja modal desa merupakan belanja desa yang diasumsikan akan membawa *multiplier effect* bagi perekonomian suatu masyarakat dengan cara membangun jalan, jembatan, gedung, irigasi dan sebagainya (Halim, 2014:234). Jenis alokasi belanja modal dalam belanja desa terdapat pada setiap program kegiatan yang tertuang dalam APBDesa dengan komposisi terbesar daripada jenis belanja lainnya.

2.1.1.3. Indikator Kinerja Pemerintahan Desa

Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Berkenaan dengan pelaksanaan keuangan desa, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat desa. Menurut Sinambela, dkk (2018:95), “dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisiensi, efektivitas untuk kegiatan masyarakat. Metode yang paling penting dalam pengukuran kinerja salah satunya adalah dengan menggunakan indikator kinerja. Mardiasmo (2009:127), menjelaskan bahwa istilah indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja.

Bastian (2010:267), menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*). Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif atau untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja keseluruhan organisasi. Kinerja dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Dengan adanya indikator, suatu organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana organisasi tersebut dikatakan berhasil atau tidak berhasil di masa mendatang.

Liu *et al.*, seperti dikutip Sari dan Indriani (2018:692), mengelompokkan indikator kinerja dari sisi keuangan berdasarkan kategori 3E yaitu: ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Johnsen seperti dikutip Sari dan Indriani (2018:692), menyarankan menggunakan efisiensi, efektivitas dan ekuitas, di mana ekuitas mungkin jelas menjadi kebutuhan eksplisit organisasi publik. Indikator untuk pengukuran kinerja pemerintah di Indonesia dapat dilihat dari *value for money* yaitu konsep pengelolaan organisasi sektor publik berdasarkan tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo, 2009:130).

2.1.2. Sistem Pengelolaan Dana Desa

2.1.2.1. Dana Desa

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBDesa Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015).

Berdasarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tahun 2016, dijelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan

kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa. Setiap tahun desa akan mendapatkan Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota. Dana Desa merupakan mandat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dialokasikan dalam bentuk transfer, bukan berbentuk proyek. Selama Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 berlaku maka dana desa akan terus menerus dialokasikan oleh Pemerintah. Besaran Dana Desa adalah 10 persen (10%) dari dan di luar dana Transfer Daerah (atau *on top*) yang dialokasikan di dalam APBN secara bertahap.

Ketentuan yang mengatur Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke kabupaten/kota. Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (3) mengatur bobot untuk jumlah penduduk sebesar 30%, luas wilayah 20% dan angka kemiskinan sebesar 50% dan dikalikan dengan Indeks Kemahalan Kontruksi Kabupaten. Data-data yang digunakan adalah sumber data dari perhitungan Alokasi Dana Umum (DAU). Kemudian Peraturan Pemerintah tersebut direvisi dengan rincian untuk jumlah penduduk bobotnya sebesar 25%, luas wilayah 10%, angka kemiskinan 35% dan Indeks Kesulitan Geografis sebesar 30%.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa

PDTT No. 5 Tahun 2015 jo No. 21 Tahun 2015, menjelaskan bahwa:

- 1) Dana desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab desa;
- 2) Dana desa diutamakan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa;
- 3) Memberikan pelayanan dan dukungan pemberdayaan untuk kaum miskin bukan dalam bentuk santunan cuma-cuma, tetapi dengan pola dana bergulir;
- 4) Dana desa diutamakan untuk membiayai kepentingan desa dan masyarakat desa, bukan kepentingan orang per orang;
- 5) Dana desa diutamakan untuk membangun sarana dan prasana dasar (infrastruktur) untuk keperluan mendukung transportasi, irigasi dan sanitasi, pelayanan dasar, ketahanan pangan, energi dan pengembangan ekonomi;
- 6) Dana Desa diutamakan untuk mengembangkan potensi dan aset budaya dan ekonomi Desa.

Perbedaan dana desa dengan alokasi dana desa (ADD) terletak pada sumber dananya. Dana desa bersumber dari APBN sedangkan ADD bersumber dari APBD. Kegiatan pembangunan Desa yang boleh didanai Dana Desa adalah

- 1) Sarana dan prasarana (sarpras) transportasi seperti jalan lingkungan, jalan kampung, jalan poros Desa, jembatan kecil, gorong-gorong, tambatan perahu; 2) Sarpras ekonomi seperti pasar Desa, pasar bersama antarDesa, pasar online, dan sebagainya; 3) Sarpras pendukung ketahanan pangan: embung Desa, saluran irigasi, kolam budidaya ikan darat, bagan atau karamba ikan di pantai, kandang terpadu, jalan usaha tani, dan sebagainya; 4) Sarpras pelayanan dasar: penyediaan air bersih, polindes, poskedes; 5) Sarpras untuk lingkungan: sanitasi, mandi, cuci dan kakus (MCK), drainase, tempat pembuangan sampah, parit, pengolahan kompos, dan sebagainya; 6) Pengembangan sistem informasi desa dan peta sosial

digital; 7) Pengembangan teknologi tepat guna; 8) Pengembangan energi lokal yang terbarukan; 9) Pengembangan dan penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) maupun BUMADesa; 10) Gerakan Desa menanam: sayur, buah, benih, palawija, hortikultura, tanaman keras dan sebagainya; 11) Pengembangan seni dan budaya Desa; 12) Penyelenggaraan PAUD dan Posyandu; 13) Perpustakaan desa dan sanggar belajar; 14) Pengembangan budidaya obat tradisional; dan 15) dan lain sebagainya (Lengkong dan Tasik, 2018:18).

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang boleh dibiayai dari dana desa diantaranya adalah untuk 1) Pengembangan atau bantuan alat-alat produksi maupun permodalan kepada pelaku ekonomi Desa dengan pola bergulir; 2) Peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan bagi pengurus BUMDesa maupun pelaku ekonomi Desa; 3) Peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa; 4) Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa; 5) Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis atau swamedikasi Desa; 6) Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan; 7) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; misalnya pelatihan dan pengembangan biofuel, kompos dan lain-lain; dan 8) Peningkatan kapasitas

kelompok masyarakat untuk pemanfaatan teknologi tepat guna (Lengkong dan Tasik, 2018:18).

Dana Desa tidak boleh dipergunakan untuk 1) Pembangunan atau perbaikan kantor Desa atau balai Desa; 2) Operasional pemerintah Desa, termasuk pengadaan sarana prasarana kantor Desa (komputer dan alat tulis kantor); 3) Biaya perjalanan dinas Pemerintah Desa dan BPD; 4) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; 5) Siltap, gaji, tunjangan maupun honorarium pemerintah Desa dan BPD serta insentif bagi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; 6) Kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah, misalnya membangun jalan kabupaten, gedung sekolah (SD, SMP, SMA, SMK); 7) Pembayaran premi BPJS dan BPJS Aparatur Desa; 8) Pembelian lahan untuk kantor Desa; 9) Pengadaan tanah dan sekaligus pembangunan rumah ibadah; 10) Biaya kegiatan keagamaan; 11) Beasiswa sekolah/kuliah bagi aparatur Desa; dan 12) Honor untuk pegawai atau pejabat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah (Lengkong dan Tasik, 2018:18).

2.1.2.2. Pengelolaan Dana Desa

Pemberian dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang. Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk mengelola dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan Dana Desa dilakukan berdasarkan beberapa kebijakan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri sampai dengan Peraturan Kepala Daerah. Implementasi kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa dapat dikatakan baik apabila ketiga perspektif tersebut diatas berjalan dengan

baik, karena pengelolaan Dana Desa telah sesuai dengan perundang-undangan yang mengaturnya, dan apabila dari ketiga perspektif salah satunya tidak berjalan dengan lancar ini berarti pelaksanaan kebijakan pengelolaan Dana Desa tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) seperti dikutip Maulana dan Suharyanto (2018:8), menyebutkan bahwa siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.



Gambar 2.2. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana

tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Selain itu pengelolaan lain yang diatur Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah pembinaan dan pengawasan. Tahapan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 5 Tahun 2015 dijelaskan bahwa terdapat dua prioritas penggunaan dana desa, yaitu prioritas dana desa bidang pembangunan dan prioritas dana desa bidang pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. sedangkan Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya dengan menetapkan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan dasar permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh Desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan

kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.

Pemerintah senantiasa berupaya agar Dana Desa bisa semakin berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun pun menghasilkan sistem pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga tujuan Pemerintah melalui pengalokasian Dana Desa dapat terwujud. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat, maupun tenaga pendampingan desa serta perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa.

2.1.2.3. Indikator Sistem Pengelolaan Dana Desa

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Kepala desa memiliki wewenang dalam penyelenggaraan seluruh pengelolaan keuangan desa karena kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan. Sedangkan perangkat desa merupakan pelaksana teknis dalam kegiatan pengelolaan keuangan. Perangkat desa ditunjuk langsung oleh kepala desa untuk pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa harus kompeten dalam melakukan tanggungjawabnya sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014, dijelaskan bahwa sistem pengelolaan dana desa merupakan seluruh

rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggung jawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dengan demikian indikator sistem pengelolaan dana desa dalam penelitian ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggung jawaban.

1) Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJMDesa dan RKPDesa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Mekanisme perencanaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014, sebagai berikut:

- a) Sekretaris Desa (Sekdes) menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati Kades dan BPD.
- b) APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- c) APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja dan Kades harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Raperdes tidak sesuai, dan
- d) Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pempdes, dan unsur masyarakat.

2) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya, timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam RKPDesa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui APBDesa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014, antara lain:

- a) Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa (RKD) atau sesuai ketetapan pemerintah Kabupaten/Kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah
- b) Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Perdes
- c) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dan besarnya ditetapkan Perbup/Walikota
- d) Pengadaan barang dan/atau jasa di desa diatur dengan Perbup/Walikota dan penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB dan disahkan Kades.

3) Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Tahapan penatausahaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014, antara lain:

- a) Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan.
- b) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan yang disampaikan setiap bulan kepada Kades paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan
- c) Menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu dan Buku Bank.

4) Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kades memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014, tata cara dalam melaksanakan tahapan pelaporan antara lain:

- a) Kades menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota dan kepada BPD.
- b) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- c) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

5) Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan dana desa, Kades mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan dan wajib membuat laporan realisasi penggunaan dana desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014, pertanggungjawaban terdiri dari:

- a) Kades menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- b) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa (Perdes).
- c) Perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri 3 format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun tersebut, laporan kekayaan milik desa dan laporan program pemerintahan desa. Dalam hal format laporan, format laporan tersebut juga diatur oleh Peraturan Bupati (Perbup) tiap pemerintahan Kabupaten yang ada di Indonesia.

Selain itu pengelolaan lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 adalah pembinaan dan pengawasan. Tahapan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan keuangan desa.

2.1.3. Kualitas Sumber Daya Manusia

2.1.3.1. Pengertian Kualitas Sumber Daya Manusia

Manusia adalah unsur terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi, karena sumber daya manusia (SDM) merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Astuty (2015:82), menjelaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan sebagian besar dipengaruhi oleh manusia

pelaksananya. Lebih lanjut Astuty (2012:163), menjelaskan bahwa peran manusia dalam anggaran sangat besar karena seluruh tahapan anggaran melibatkan manusia, anggaran dibuat oleh manusia, diperbaiki oleh manusia, dan pencapaiannya dilaksanakan oleh manusia. Hal ini menunjukkan bahwa manusia juga merupakan satu-satunya sumber daya yang membuat sumber daya lainnya bekerja dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan organisasi. Oleh karena itu sistem yang sebaik apapun akan sia-sia begitu saja apabila tidak ditunjang oleh kualitas SDM yang memadai.

Adam Smith yang merupakan tokoh ekonomi dunia yang dikenal dengan aliran ekonomi klasik, menganggap bahwa manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Dikarenakan tanah tidak ada artinya apabila tidak ada SDM yang pandai mengolahnya sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan. Smith juga berpendapat bahwa alokasi SDM yang efektif adalah permulaan dari pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh barulah modal dibutuhkan agar pertumbuhan tetap stabil terjaga. Dengan demikian, SDM merupakan syarat perlu bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara (Mulyadi, 2003: 4). SDM merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan SDM dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Sembiring, 2013:2). Noverman (2018:71), juga menyebutkan bahwa “variabel lain keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya finansial”.

Penelitian yang dilakukan Warisno seperti dikutip oleh Firdaus, dkk (2015:47), mengemukakan bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah

yang baik SKPD harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hasibuan dalam Rulyanti, dkk (2017:325), mengartikan “sumber daya manusia sebagai kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu”. Daya pikir merupakan kecerdasan yang dibawa dari lahir (modal dasar) sedangkan kecapakan diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan). Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.

Ndraha dalam Firdaus, dkk (2015:47), menyebutkan bahwa “SDM yang berkualitas adalah sumber daya yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti kecerdasan, kreativitas dan imajinasi. Afrianti dalam Wardani dan Andriyani (2017:89), menjelaskan kualitas SDM adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, perangkat desa harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, didukung dengan latar belakang pendidikan dan pelatihan, serta mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga SDM tersebut mampu memahami logika akuntansi dengan baik dalam penerapan sistem akuntansi.

Lebih lanjut Ariesta dalam Wardani dan Andriyani (2017:90), menyatakan “apabila sumber daya manusia pelaku sistem akuntansi tidak memiliki kapasitas dan kualitas yang disyaratkan maka kualitas informasi akuntansi sebagai produk

dari sistem akuntansi akan memiliki kualitas yang rendah”. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keterandalan. Oleh karena itu, dibutuhkan SDM yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, menunjukkan bahwa SDM merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan. SDM yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, karena SDM tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik dan sesuai bidangnya sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka semakin baik untuk pengambilan keputusan.

Koswara (2001:266), menyatakan bahwa “konteks kualitas sumber daya aparatur di era otonomi adalah kemampuan profesional dan keterampilan teknis para pegawai yang termasuk kepada unsur staf dan pelaksana di lingkungan pemerintah daerah”. Hal ini sangat diperlukan agar manajemen pemerintahan dalam otonomi daerah dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Namun tidak hanya jumlah SDM yang cukup saja, tetapi juga kualitas SDM yang harus diukur dengan melihat latar belakang pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja, jenjang kepangkatan dan status kepegawaian.

Terkait dengan pengelolaan dana desa, dalam pengelolaan dana desa pasti bersentuhan dengan proses akuntansi yang memerlukan kemampuan SDM yang memadai agar laporan keuangan yang dihasilkan benar sehingga sesuai standar

yang berlaku. Peran kepala desa sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), dalam hal ini kegiatan perencanaan dikoordinasi oleh sekretaris desa, bendahara bertugas sebagai administrasi keuangan dan penatausahaan keuangan desa. Untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan desa maka staf pemerintahan desa harus memiliki kualifikasi sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya.

2.1.3.2. Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Kualitas SDM adalah kemampuan SDM untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Dengan demikian yang menjadi indikator kualitas SDM antara lain: pengetahuan, keterampilan, pelatihan dan pengalaman.

1. Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan pegawai turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, pengetahuan merujuk pada informasi dan hasil pembelajaran. Pegawai yang mempunyai pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi perusahaan. Namun bagi pegawai yang belum mempunyai pengetahuan cukup, maka akan bekerja tersendat-sendat. Pengetahuan mencerminkan kemampuan kognitif seorang karyawan berupa

kemampuan untuk mengenal, memahami, menyadari dan menghayati suatu tugas/pekerjaan. Karena itu, pengetahuan seseorang karyawan dapat dikembangkan melalui pendidikan, baik formal maupun non formal serta pengalaman. Pendidikan membekali seseorang dengan dasar-dasar pengetahuan, teori, logika, pengetahuan umum, kemampuan analisis serta pengembangan watak dan kepribadian.

2. Keterampilan

Keterampilan berarti kemampuan untuk mengoperasikan suatu pekerjaan secara mudah dan cermat yang membutuhkan kemampuan dasar. Keterampilan merupakan perilaku yang terkait dengan tugas, yang bisa dikuasai melalui pembelajaran, dan bisa ditingkatkan melalui pelatihan dan batuan orang lain. Karyawan yang memiliki tingkat keterampilan tinggi akan dapat mencapai kinerja yang lebih baik dibandingkan karyawan yang memiliki tingkat ketrampilan kerja rendah. Keterampilan merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Keterampilan merupakan domain yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja pegawai. Keterampilan yang lebih baik akan terus dapat meningkatkan kinerja pegawai.

3. Pelatihan

Proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pelatihan yang baik, harus berkaitan dengan keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaannya. pelatihan adalah usaha untuk memperbaiki performa pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya.

4. Pengalaman

Pengalaman merupakan hal-hal yang pernah dilalui individu selama hidup. Pengalaman bekerja merupakan segala hal yang dialami seseorang dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban yang melekat pada dirinya. Keahlian dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman mengorganisasi orang, komunikasi di hadapan kelompok, menyelesaikan masalah, dan sebagainya. Orang yang tidak pernah berhubungan dengan organisasi besar dan kompleks tidak mungkin mengembangkan kecerdasan organisasional untuk memahami dinamika kekuasaan dan pengaruh dalam lingkungan tersebut.

2.1.4. Pemanfaatan Teknologi

2.1.4.1. Pengertian Pemanfaatan Teknologi

Perkembangan zaman diikuti dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin hari semakin pesat menuntut organisasi atau perusahaan menggunakan teknologi informasi dengan beberapa alasan diantaranya tingginya tingkat kompleksitas tugas manajemen, adanya pengaruh ekonomi dunia, perlunya *respon time* yang lebih cepat, dan tingginya persaingan bisnis. Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah. Untuk itu pemerintahan desa berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan desa, dan menyalurkan informasi keuangan desa kepada masyarakat agar transparansi dan akuntabilitas terjamin.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan mempermudah penyampaian informasi keuangan ke publik. Pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari sistem pengendalian intern dengan menggunakan kendali komputer, selain itu pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan akurasi dari informasi. Pemanfaatan teknologi informasi juga sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatanwaktuan.

Menurut Suyanto (2005:10), “teknologi informasi merupakan sebuah bentuk umum yang menggambarkan setiap teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyampaikan informasi”. Kadir dan Triwahyuni (2012:2), menjelaskan bahwa “teknologi informasi adalah seperangkat yang membantu melakukan pekerjaan dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi”.

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai teknologi informasi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, dan menyimpan data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang

berkualitas, yaitu yang releva, akurat, dan tepat waktu. Pemanfaatan teknologi informasi adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi sebagai penunjang pekerjaan dan meningkatkan kinerja. Dalam penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan pekerjaan individu maupun organisasi haruslah didukung dengan kemampuan yang memadai. Komputer, perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan, *electronic commerce* dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi merupakan bagian dari teknologi informasi (Yudianto dan Sugiarti, 2017:5).

Menurut Ariesta dalam Wardani dan Andriyani (2017:90), “pemanfaatan adalah perilaku karyawan teknologi dalam tugasnya, pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dalam diversitas aplikasi yang dijalankan”. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi dalam arti lain pemanfaatan teknologi dapat mengurangi kesalahan dalam proses data. Dengan adanya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal. Lebih lanjut Pramudiarta dalam Wardani dan Andriyani (2017:90), menyatakan “pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu sumber daya manusia dalam proses akuntansi dan dapat mengurangi kesalahan dalam pemrosesan data, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal”.

Menurut Sutarman (2012:19), menyebutkan bahwa manfaat dari penerapan teknologi informasi yaitu: (1) kecepatan (*speed*), (2) ketepatan (*precision*), (3) konsistensi (*consistency*), dan (4) keandalan (*reliability*). Lebih

lanjut menurut Suparman (2014:3), pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi berupa komputer membantu aparat desa dalam mengelola dokumen-dokumen desa secara keseluruhan.

Yosefrinaldi (2013:12) mengatakan bahwa “semakin besar pemanfaatan teknologi informasi maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula”. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan jika jumlah kuantitas dan kualitasnya baik, serta tersedianya sarana penunjang yang dibutuhkan. Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud seperti penggunaan komputer dan perangkat lunak secara optimal, akan berdampak pada pemrosesan transaksi yang lebih cepat dan perhitungannya juga akan memiliki tingkat keakurasian yang tinggi sehingga akan berujung pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang tepat waktu karena pemanfaatan teknologi akan mengurangi kesalahan yang bersifat material (Primayana, 2014:10).

Menurut Suyanto (2005:11), pemanfaatan teknologi informasi dapat diukur melalui penggunaan komponen berikut: (1) perangkat keras komputer (*hardware*), (2) perangkat lunak komputer (*software*), dan (3) jaringan dan komunikasi (internet). Perangkat keras bagi sesuatu sistem informasi terdiri atas masukan dan keluran. Sebagai unit meyimpan file dan sebagainya, peralatan, penyiapan data dan terminal masukan dan keluaran. Sistem perangkat lunak yang dikembangkan guna mendukung pendistribusian data dan informasi seperti system

pengoprasian. Dikembangkan juga beberapa metode dan aplikasi dan sistem yang berbasis komputer untuk memenuhi kebutuhan pengguna, contoh aplikasi SISKEUDES. Jaringan dan komunikasi merupakan sebuah sistem yang mampu menghubungkan dan menggabungkan beberapa titik komunikasi menjadi satu kesatuan yang mampu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Berbagai macam cara digunakan untuk memepermudah dan menjaga kualitas hubungan melalui internet. Sejak saat itulah perkembangan alat-alat yang menyokong kemampuan jaringan untuk saling berhubungan berjalan dengan pesat.

Melalui pemanfaatan sistem teknologi informasi akan memberikan kemudahan kepada pihak pemerintah desa untuk memperoleh informasi keuangan dan kinerja dari pengelolaan keuangan pemerintah desa. Dengan pengenalan teknologi informasi diharapkan pemerintah mampu memberikan peningkatan pelayanan serta memberikan kemudahan bagi aparat desa dalam memenuhi kewajibannya kepada masyarakat maupun kepada pemerintahan di atasnya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa akan memberikan kemudahan bagi aparatur desa dalam menjalankan berbagai tugas di pemerintahan. Untuk itu aparatur harus mempunyai pemahaman dan kemampuan dalam menggunakan teknologi seperti komputer, *software*, dan jaringan internet.

2.1.4.2. Indikator Pemanfaatan Teknologi

Pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan secara optimal dari komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi untuk kegiatan penyusunan laporan keuangan pada

Pemerintah Desa (Sapartiningsih, dkk, 2018:106). Indikator pengukuran pemanfaatan teknologi informasi yaitu:

- 1) Penggunaan *software* aplikasi
- 2) Proses akuntansi secara komputerisasi
- 3) Laporan akuntansi dan manajerial yang terintegrasi
- 4) Pegawai mampu mengoperasikan komputer dengan baik
- 5) Pegawai dapat memanfaatkan keunggulan komputer dalam menginput data secara cepat.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengukuran kinerja pemerintahan maupun pengelolaan keuangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak dilakukan. Adapun ihtisar dalam penelitian terdahulu disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Cherrya Dhia Wenny (2012)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Selatan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun, secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.

No.	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
2	Firdaus, Nadirsyah, dan Heru Fahlevi (2015)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Kebijakan Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan kebijakan akuntansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan kebijakan akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh.
3	Sapto Hendri BS, Ni Putu Chandra Ayu Ardania, Intan Rakhmawati dan Siti Atikah (2016)	Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lombok Tengah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat arah hubungan yang positif dan signifikan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.
4	Muhamad Wahyudi dan Eva Wulandari (2017)	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintahan Daerah Kota Magelang)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah belum konsisten, dimana mengalami <i>trend</i> positif dan <i>trend negatif</i> . Kemandirian pemerintah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih kurang.
5	Risya Umami dan Idang Nurodin (2017)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan maupun secara parsial terhadap pengelolaan keuangan desa.

No.	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
6	Finta Munti dan Heru Fahlevi (2017)	Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Aceh	Kapasitas aparaturnya desa, ketaatan pelaporan keuangan, dan kualitas pengawasan BPB memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Gandapura di Kabupaten Bireuen.
7	Made Deva Premana Dharma Wiguna, Gede Adi Yuniarta, dan Made Aristia Prayudi (2017)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, serta Peran Pendamping Desa terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Studi Pada Desa Penerima Dana Desa Di Kabupaten Buleleng)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes, variabel pendidikan dan pelatihan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes, dan variabel peran pendamping desa (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes.
8	Lina Nasehatun Nafidah dan Nur Anisa (2017)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolaan Keuangan Desa secara garis besar pengelolaan keuangan desa telah mencapai akuntabilitas. Selain itu masih diperlukan adanya pendampingan desa dari pemerintah daerah yang intensif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
9	Dina Rulyanti, Raden Andi Sularso, dan Yosefa Sayekti (2017)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel <i>Intervening</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi dan SDM berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa dan kinerja pemerintah desa, sedangkan regulasi dan komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa dan kinerja pemerintah desa.

No.	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
10	Dewi Kesuma Wardani dan Ika Andriyani (2017)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa di Kabupaten Klaten	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif secara signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa. Sementara itu, pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa.
11	Siti Khoiriah dan Utia Meylina (2017)	Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa	Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Indonesia telah memiliki regulasi signifikan terkait dengan pengelolaan dana desa mulai dari tahapan pengelolaan dana desa sampai kepada sistem pengawasan pengelolaan dana desa. Tahapan pengelolaan dan pengawasan pengelolaan dana desa seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan akan berpotensi positif dalam pelaksanaan akuntabilitas penyelenggaraan ataupun akuntabilitas publik pemerintahan desa.
12	Iin Novianti, Syamsidar, dan Cut Fitrika Syawalina (2018)	Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Efektivitas Fungsi Pengawasan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar	Hasil penelitian memperlihatkan hubungan linier positif dan berhubungan cukup erat antara implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan efektivitas fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Aceh Besar. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Aceh Besar.

No.	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
13	Dinna Tri Yulihantini, Hari Sukarno dan Siti Maria Wardayati (2018)	Pengaruh Belanja Modal dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian dan Kinerja Keuangan Desa di Kabupaten Jember.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal dan ADD tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan desa, belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan desa, sedangkan pemberian ADD dan kemandirian keuangan desa tidak berpengaruh terhadap efektifitas kinerja keuangan desa. Berkenaan dengan efisiensi, belanja modal mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan desa, sedangkan ADD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan desa. Kemandirian keuangan desa tidak berpengaruh terhadap efisiensi kinerja keuangan desa.
14	Dwi Sapartiningsih, Suharno dan Djoko Kristianto (2018)	Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil penelitiannya menunjukkan ada pengaruh positif signifikan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
15	Nur Ida Yesinia, Norita Citra Yuliarti, dan Dania Puspitasari (2018)	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.	Hasil penelitian menyatakan bahwa: (1) peran perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, (2) sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.

No.	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
16	Marlinawati dan Dewi Kusuma Wardani (2018)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa	Hasil penelitian menyimpulkan kualitas SDM dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa.
17	Romandhon (2019)	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, Pengalaman Kerja Aparatur Desa, dan Fasilitas Kantor Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa	Hasil penelitian menyimpulkan variabel tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan pengalaman kerja aparatur desa berpengaruh positif terhadap pemahaman laporan keuangan desa, sedangkan fasilitas kantor berpengaruh negatif terhadap pemahaman laporan keuangan desa.
18	Muhammad Nur Aziiz dan Sawitri Dwi Prastiti (2019)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi dan SPIP berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Implikasi praktis hasil penelitian ini bagi aparat pemerintahan adalah untuk meningkatkan kompetensi aparat desa melalui pelatihan Siskeudes dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pada penelitian ini terkait tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi terhadap sistem pengelolaan dana desa serta dampak terhadap kinerja pemerintah desa.

2.3.1. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pemerintahan Desa

Kinerja pada pemerintah desa merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dana desa dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan desa dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kinerja pemerintah desa juga merupakan kemampuan pemerintahan desa untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli desa dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan desanya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat desa dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada pemerintahan desa. Hasil penelitian yang dilakukan Warisno seperti dikutip oleh Firdaus, dkk (2015:47), mengemukakan bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang baik SKPD harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hasil penelitian Hendri, dkk (2016), menunjukkan bahwa terdapat arah hubungan yang positif dan signifikan sumber daya manusia terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian Munti dan Fahlevi (2017), menyimpulkan bahwa kapasitas aparatur desa memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Lebih lanjut hasil

penelitian Rulyanti, dkk (2017), menyimpulkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa dan kinerja pemerintah desa. Hasil penelitian Wardani dan Andriyani (2017), menyimpulkan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa.

Dengan demikian dari uraian-uraian di atas, maka dapat diduga bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa.

2.3.2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Kinerja Pemerintahan Desa

Perkembangan zaman diikuti dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin hari semakin pesat menuntut organisasi maupun pemerintahan termasuk pemerintahan desa menggunakan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan upaya yang dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi sebagai penunjang pekerjaan dan meningkatkan kinerja.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan mempermudah penyampaian informasi keuangan ke publik. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang

memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja..

Menurut Yosefrinaldi (2013:12), semakin besar pemanfaatan teknologi informasi maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula. Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud seperti penggunaan komputer dan perangkat lunak secara optimal, akan berdampak pada pemrosesan transaksi yang lebih cepat dan perhitungannya juga akan memiliki tingkat keakurasian yang tinggi sehingga akan berujung pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang tepat waktu karena pemanfaatan teknologi akan mengurangi kesalahan yang bersifat material (Primayana, 2014:10).

Melalui pemanfaatan sistem teknologi informasi akan memberikan kemudahan kepada pihak pemerintah desa untuk memperoleh informasi keuangan dan kinerja dari pengelolaan keuangan pemerintah desa. Hasil penelitian Firdaus, dkk (2015), menyimpulkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian Aziiz dan Prastiti (2019), juga menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

Dengan demikian, dari uraian-uraian di atas, maka dapat diduga bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa.

2.3.3. Pengaruh Sistem Pengelolaan Dana Desa terhadap Kinerja Pemerintahan Desa

Pemberian dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang. Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk mengelola dana tersebut dengan sebaik-baiknya.

Pengelolaan Dana Desa dilakukan berdasarkan beberapa kebijakan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri sampai dengan Peraturan Kepala Daerah. Implementasi kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa dapat dikatakan baik apabila ketiga perspektif tersebut diatas berjalan dengan baik, karena pengelolaan Dana Desa telah sesuai dengan perundang-undangan yang mengaturnya, dan apabila dari ketiga perspektif salah satunya tidak berjalan dengan lancar ini berarti pelaksanaan kebijakan pengelolaan Dana Desa tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Adanya pengelolaan keuangan desa yang baik diharapkan dapat mempengaruhi kinerja pemerintah desa, dimana semakin tinggi aturan yang diterapkan oleh perangkat desa maka akan meningkatkan kualitas kinerja perangkat desa (Rulyanti, dkk, 2017:324). Hasil penelitian Sugeng (2014), menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Apabila pengelolaan keuangan daerah dapat dikelola dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel maka hal tersebut dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah khususnya pada sektor pemenuhan pelayanan publik yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Adanya pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja suatu instansi pemerintah dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, sehingga dengan adanya pengelolaan keuangan desa dapat mendorong terwujudnya kinerja pemerintah desa yang lebih berkualitas, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dengan demikian, dari uraian-uraian di atas, maka dapat diduga bahwa sistem pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa.

2.3.4. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Kepala desa memiliki wewenang dalam penyelenggaraan seluruh pengelolaan keuangan desa karena kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan. Sedangkan perangkat desa merupakan pelaksana teknis dalam kegiatan pengelolaan keuangan. Perangkat desa ditunjuk langsung oleh kepala desa untuk pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa harus kompeten dalam melakukan tanggungjawabnya sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa yang baik, kepala desa dan perangkat desa yang terkait dengan sistem pelaporan keuangan harus memiliki sumber daya yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas tersebut harus didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sumber daya yang berkualitas dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena SDM tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu (Sembiring, 2013:2). Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002:146). Oleh sebab itu diperlukan

adanya pengoptimalisasian sumber daya manusia dengan penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya.

Hasil penelitian Rulyanti (2017), menyimpulkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian Sapartiningsih, dkk (2018), menyimpulkan bahwa ada pengaruh positif signifikan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian Yesinia, dkk (2018), juga menyimpulkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian Aziiz dan Prastiti (2019), menyimpulkan kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Sementara itu, hasil penelitian Firdaus, dkk (2015), menyimpulkan bahwa secara parsial kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Dengan demikian, dari uraian-uraian di atas, dapat diduga bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap sistem pengelolaan dana desa.

2.3.5. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa akan memberikan kemudahan bagi aparatur desa dalam menjalankan berbagai tugas di pemerintahan. Untuk itu aparatur harus mempunyai pemahaman dan kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi seperti komputer, *software*, dan jaringan internet. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi saat melakukan pemrosesan data keuangan serta menghasilkan informasi keuangan dengan tepat waktu.

Triani dan Handayani (2018:140), menyebutkan bahwa “teknologi juga akan sangat dibutuhkan dalam proses penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan”. Sehubungan hal tersebut, pemerintah daerah diharapkan hadir untuk mendampingi perangkat desa dalam mengelola keuangannya. Studi yang dilakukan Indriasari dan Nahartyo dalam Triani dan Handayani (2018:146), menunjukkan bahwa keterlambatan laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal akuntansi.

Hasil penelitian Sapartiningsih, dkk (2018), menyimpulkan bahwa ada pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Aziiz dan Prastiti (2019), menyimpulkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

Dengan demikian dari uraian-uraian di atas, maka dapat diduga bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap sistem pengelolaan dana desa.

2.3.6. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Melalui Sistem Pengelolaan Dana Desa

Kinerja pemerintah desa merupakan tingkat capaian dari suatu hasil kerja termasuk di bidang keuangan desa yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran. Kualitas SDM merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa.

Afrianti dalam Wardani dan Andriyani (2017:89), menyatakan bahwa “kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk

melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai”. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, perangkat desa harus memiliki SDM yang berkualitas, didukung dengan latar belakang pendidikan dan pelatihan, serta mempunyai pengalaman di bidang keuangan.

Meskipun demikian, pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.. Pengelolaan Dana Desa dilakukan berdasarkan beberapa kebijakan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri sampai dengan Peraturan Kepala Daerah. Implementasi kebijakan dalam pengelolaan dana desa dapat dikatakan baik apabila ketiga perspektif tersebut diatas berjalan dengan baik, karena pengelolaan dana desa telah sesuai dengan perundang-undangan yang mengaturnya, dan apabila dari ketiga perspektif salah satunya tidak berjalan dengan lancar ini berarti pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan kinerja pemerintahan desa selain dipengaruhi oleh faktor kualitas sumber daya manusia juga dipengaruhi oleh sistem pengelolaan dana desa yang baik dan akuntabel. Keberhasilan pengelolaan dana desa tidak terlepas dari komitmen yang tinggi dari aparatur desa dan didukung kompetensi yang dimiliki. Pelaksanaan pemerintahan membutuhkan perencanaan, pelaksanaan, kontrol, dan evaluasi dari setiap program. Dari setiap

tahapan tersebut pelaksanaan pengelolaan keuangan desa termasuk pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan baik agar tujuan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai. Sistem pengelolaan dana desa yang baik dapat dilihat dari keselarasan tujuan antara aparatur desa dengan tujuan dari desa itu sendiri.

Dengan demikian, dari uraian-uraian di atas, maka dapat diduga bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa melalui sistem pengelolan dana desa.

2.3.7. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Melalui Sistem Pengelolaan Dana Desa

Penggunaan teknologi informasi merupakan penunjang dalam melakukan berbagai pekerjaan sebagai media informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknolgi informasi dalam pengelolaan keuangan atau dana desa akan memberikan kemudahan bagi aparatur desa dalam menjalankan berbagai tugas di pemerintahan. Salah satu manfaat dari penggunaan teknologi informasi terkait pengelolaan keuangan atau dana desa yaitu memberikan kemudahan dalam penyusunan laporan keuangan dan dana desa yang lebih akuntabel. Penggunaan teknologi jaringan intenet juga memberikan kemudahan kepada aparatur desa dalam memperoleh informasi terkait kepentingan pemerintah serta masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi. Untuk mencapai kinerja keuangan yang baik maka pemerintahan desa harus mempunyai pemahaman dan kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi seperti komputer, *software*, dan jaringan internet sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan kemudahan kepada aparat desa dalam memenuhi kewajibannya.

Terkait dengan kinerja pemerintah desa khususnya di bidang keuangan, teknologi informasi dapat dijadikan sebagai media untuk mempermudah dalam pengelolaan dana desa misalnya dalam penyusunan laporan keuangan maupun laporan pertanggungjawaban lainnya. Selain itu, teknologi informasi dapat dijadikan media dalam pengambilan informasi terkait pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan lebih mudah. Internet memberikan kemudahan dalam meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa dengan pembuatan laman yang menyediakan laporan keuangan dana desa. Adanya keterbukaan tersebut menuntut aparatur desa untuk menjalankan perannya sebagai aktor utama dalam pengelolaan dana desa bekerja dengan sebaik mungkin dan melaporkan keadaan yang sebenarnya.

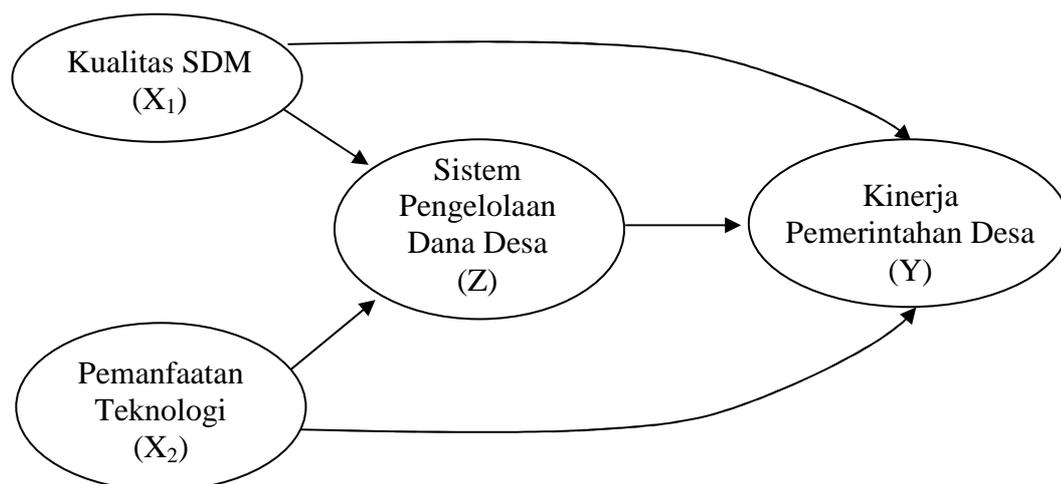
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa kepala desa memiliki tugas untuk memanfaatkan teknologi yang tepat guna dalam menjalankan program, prioritas, kegiatan dan kebutuhan dalam pembangunan di desa. Pemanfaatan teknologi termasuk internet sebagai media keterbukaan pemerintah dalam melaporkan keadaan keuangan desa setiap desa untuk memiliki perangkat yang memadai baik dalam pengadaan komputer, aplikasi yang dapat digunakan dengan mudah dan akses jaringan internet. Selain itu, aparatur desa sebagai pengguna teknologi informasi harus memiliki kemampuan dalam pengoperasian teknologi informasi tersebut.

Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal akan meningkatkan kinerja keuangan pada pemerintahan desa, apabila sistem pengelolaan dana desa juga diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, sehingga akan menghasilkan informasi

keuangan yang tepat waktu, relevan, dan dapat dipercaya serta akan dapat mencegah terjadinya kesalahan, kecurangan dan penyimpangan dalam pengolahan data transaksi serta pengelolaan keuangan pemerintah desa.

Dengan demikian, dari uraian-uraian di atas, maka dapat diduga bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa melalui sistem pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penjelasan dan uraian-uraian di atas, keterkaitan antar variabel yang satu dengan variabel yang lain dapat digambarkan dengan model kerangka konseptual sebagai berikut.



Gambar 2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

2.4. Hipotesis

Berdasarkan kajian teoritis dan kerangka konseptual yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini antara lain:

1. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.
2. Pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.
3. Sistem pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.

4. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap sistem pengelolaan dana desa.
5. Pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap sistem pengelolaan dana desa.
6. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa melalui sistem pengelolaan dana desa.
7. Pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa melalui sistem pengelolaan dana desa

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi terhadap sistem pengelolaan dana desa serta dampak terhadap kinerja keuangan pada pemerintah desa di Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan menyebarkan kuesioner pada aparatur desa di Kabupaten Deli Serdang.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Deli Serdang dan dibatasi hanya di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Batang Kuis, Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Tanjung Morawa. Alasan pemilihan tempat penelitian di Kecamatan Batang Kuis, Percut Sei Tuan dan Kecamatan Tanjung Morawa adalah sebagian besar desa-desa dari ketiga kecamatan tersebut terindikasi berbagai masalah terkait pengelolaan dana desa, diantaranya adanya dugaan kasus korupsi atau penyelewengan dana desa, keterlambatan dalam menyusun laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, dan adanya pengelolaan dana desa yang masih belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Waktu penelitian rencananya dilakukan selama 6 (empat) bulan mulai bulan September 2019 sampai Februari 2020.

Tabel 3.2. Sampel Penelitian (Desa)

No.	Nama Desa	No.	Nama Desa
Kecamatan Batang Kuis		Kecamatan Tanjung Morawa	
1	Baru	30	Dagang Kelambir
2	Sidodadi	31	Wonosari
3	Batang Kuis Pekan	32	Penara Kebun
4	Paya Gambar	33	Aek Pancur
5	Sena	34	Naga Timbul
6	Sugiharjo	35	Ujung Serdang
7	Tanjung Sari	36	Bangun Rejo
8	Tumpatan Nibung	37	Tanjung Baru
9	Mesjid	38	Telaga Sari
10	Bintang Meriah	39	Bangun Sari Baru
11	Bakaran Batu	40	Dagang Kerawan
Kecamatan Percut Sei Tuan		41	Sei Merah
12	Amplas	42	Tanjung Mulia
13	Bandar Klippa	43	Limau Manis
14	Saentis	44	Bangun Sari
15	Tembung	45	Medan Sinembah
16	Pematang Lalang	46	Lengau Seprang
17	Bandar Khalipah	47	Tanjung Morawa B
18	Kolam	48	Perdamean
19	Percut	49	Punden Rejo
20	Sambirejo Timur	50	Bandar Labuhan
21	Laut Dendang	51	Tanjung Morawa A
22	Medan Estate	52	Dalu X B
23	Bandar Setia	53	Buntu Bedimbar
24	Cinta Rakyat	54	Dalu X A
25	Tanjung Rejo		
26	Cinta Damai		
27	Sampali		
28	Tanjung Selamat		
29	Sei Rotan		

3.4. Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian ini terdiri atas variabel bebas (*independent*), variabel terikat (*dependent*) dan variabel antara (*intervening*).

1. Variabel bebas (*independent*) adalah variabel sering disebut sebagai variabel stimulus, dan *predictor* yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat

(*dependent*). Variabel bebas pada penelitian ini adalah kualitas SDM (X_1) dan pemanfaatan teknologi (X_2).

2. Variabel terikat (*dependent*) adalah variabel yang sering disebut variabel output, kriteria atau konsekuen yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas (*independent*). Variabel terikat penelitian ini adalah kinerja pemerintahan desa (Y)
3. Variabel *intervening* adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan penyela/antara yang terletak di antara variabel bebas dan variabel terikat, sehingga variabel bebas tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel terikat. Variabel *intervening* pada penelitian ini adalah sistem pengelolaan dana desa (Z).

Untuk menghindari kekeliruan dalam menginterpretasikan variabel penelitian, maka dianggap perlu memberikan definisi operasional sebagai berikut:

Tabel 3.3. Variabel Operasional, Indikator dan Skala

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Kinerja Pemerintahan Desa (Y) Mardiasmo (2009)	Hasil kerja atau prestasi aparatur desa dalam melaksanakan seluruh kegiatan secara ekonomis, efisiensi, efektivitas dan pelaporan yang memadai meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.	Ekonomis	Interval
		Efisiensi	Interval
		Efektivitas	Interval
Kualitas SDM (X_1) Wardani dan Andriyani (2017)	Kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.	Pengetahuan	Interval
		Keterampilan	Interval
		Pelatihan	Interval
		Pengalaman	Interval

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Pemanfaatan Teknologi (X ₂) Sapartiningsih, dkk (2018)	Penggunaan secara optimal dari komputer (<i>mainframe, mini, micro</i>), perangkat lunak (<i>software</i>), <i>database</i> , jaringan (<i>internet, intranet</i>), <i>electronic commerce</i> , dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi untuk kegiatan penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Desa.	Penggunaan <i>software</i> aplikasi	Interval
		Proses akuntansi secara komputerisasi	Interval
		Laporan dan manejerial yang terintegrasi	Interval
		Kemampuan pegawai mengoperasikan komputer	Interval
Sistem Pengelolaan Dana Desa (Z) PP No. 43 Tahun 2014 dan Permendagri No. 113 Tahun 2014	Seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggung jawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.	Perencanaan	Interval
		Pelaksanaan	Interval
		Penatausahaan	Interval
		Pelaporan	Interval
		Pertanggung jawaban	Interval

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer didapat secara langsung dari sumber pertama (tanpa perantara) berupa jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden, sedangkan data sekunder diperoleh melalui perantara pihak ketiga dengan pencatatan berupa buku, jurnal, dokumen, perundang-undangan dan lain-lain.

Data-data yang akan diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua cara yaitu kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner atau angket pada penelitian ini dikembangkan sendiri oleh peneliti melalui kajian teori yang relevan dengan variabel penelitian. Dalam pengukurannya, setiap responden dimintai pendapatnya mengenai suatu pertanyaan menggunakan skala Likert.

Tabel 3.4. Skala Likert

No.	Kategori Jawaban	Skala Likert
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Kurang Setuju (KS)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.6. Teknik Analisis Data

Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan *software* statistik berupa program SPSS untuk menghasilkan uji kualitas data, statistik deskriptif, uji normalitas dan pengujian hipotesis.

3.6.1. Uji Kualitas Data

3.6.1.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan program SPSS. Pendekatan yang digunakan dalam uji validitas (analisis butir) adalah dengan membandingkan nilai r-hitung (*Corrected Item-Total Correlation*) dengan r-tabel pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ sehingga dapat diketahui item pernyataan mana yang gugur dan valid (sah). Item butir pernyataan dinyatakan valid jika diperoleh nilai r-hitung $>$ r-tabel, demikian sebaliknya.

Hasil uji validitas data variabel kualitas Sumber Daya Manusia (X_1) dengan menggunakan bantuan program SPSS 16.0, secara ringkas dirangkum pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Validitas Variabel Kualitas SDM (X_1)

Item Pernyataan	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	r-tabel ($\alpha = 0,05$ dan $n = 162$)	Keterangan
X1.1	0,741	0,159	Valid
X1.2	0,750	0,159	Valid
X1.3	0,755	0,159	Valid
X1.4	0,636	0,159	Valid
X1.5	0,738	0,159	Valid
X1.6	0,723	0,159	Valid
X1.7	0,753	0,159	Valid
X1.8	0,788	0,159	Valid
X1.9	0,754	0,159	Valid
X1.10	0,816	0,159	Valid
X1.11	0,734	0,159	Valid
X1.12	0,576	0,159	Valid

Tabel 3.5 di atas, menunjukkan keseluruhan item pernyataan variabel kualitas SDM (X_1) mempunyai nilai *Corrected Item-Total Correlation* > r-tabel, sehingga keseluruhan item dinyatakan valid (sahih) yang berarti data kualitas SDM yang diperoleh dapat mengukur ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya dan dapat digunakan dalam proses estimasi berikutnya.

Hasil uji validitas data variabel pemanfaatan teknologi (X_2) dengan bantuan program SPSS 16.0, secara ringkas dirangkum pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Validitas Variabel Pemanfaatan Teknologi (X_2)

Item Pernyataan	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	r-tabel ($\alpha = 0,05$ dan $n = 162$)	Keterangan
X2.1	0,728	0,159	Valid
X2.2	0,700	0,159	Valid
X2.3	0,783	0,159	Valid
X2.4	0,870	0,159	Valid
X2.5	0,836	0,159	Valid
X2.6	0,789	0,159	Valid
X2.7	0,750	0,159	Valid
X2.8	0,754	0,159	Valid
X2.9	0,735	0,159	Valid
X2.10	0,679	0,159	Valid

Berdasarkan data pada Tabel 3.6, menunjukkan keseluruhan item pernyataan untuk variabel pemanfaatan teknologi (X_1) mempunyai nilai *Corrected Item-Total Correlation* > r-tabel, sehingga dinyatakan keseluruhan item valid (sahih) yang berarti data pemanfaatan teknologi yang diperoleh dapat mengukur ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya dan dapat digunakan dalam proses estimasi berikutnya.

Hasil uji validitas data variabel sistem pengelolaan dana desa (Z) dengan bantuan program SPSS 16.0, secara ringkas dirangkum pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Validitas Variabel Sistem Pengelolaan Dana Desa (Z)

Item Pernyataan	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	r-tabel ($\alpha = 0,05$ dan $n = 162$)	Keterangan
Z.1	0,688	0,159	Valid
Z.2	0,362	0,159	Valid
Z.3	0,636	0,159	Valid
Z.4	0,717	0,159	Valid
Z.5	0,697	0,159	Valid
Z.6	0,694	0,159	Valid
Z.7	0,731	0,159	Valid
Z.8	0,644	0,159	Valid
Z.9	0,684	0,159	Valid
Z.10	0,761	0,159	Valid
Z.11	0,741	0,159	Valid
Z.12	0,396	0,159	Valid
Z.13	0,723	0,159	Valid
Z.14	0,719	0,159	Valid
Z.15	0,713	0,159	Valid

Tabel 3.7 di atas, menunjukkan bahwa keseluruhan item pernyataan variabel sistem pengelolaan dana desa (Z) mempunyai nilai *Corrected Item-Total Correlation* > r-tabel, sehingga keseluruhan item dinyatakan valid yang berarti data yang diperoleh dapat mengukur ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya dan dapat digunakan dalam proses estimasi berikutnya.

Hasil uji validitas data variabel kinerja pemerintahan desa (Y), secara ringkas dirangkum pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Validitas Variabel Kinerja Pemerintah Desa (Y)

Item Pernyataan	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	r-tabel ($\alpha = 0,05$ dan $n = 162$)	Keterangan
Y.1	0,642	0,159	Valid
Y.2	0,740	0,159	Valid
Y.3	0,753	0,159	Valid
Y.4	0,724	0,159	Valid
Y.5	0,791	0,159	Valid
Y.6	0,832	0,159	Valid
Y.7	0,776	0,159	Valid
Y.8	0,752	0,159	Valid
Y.9	0,531	0,159	Valid
Y.10	0,639	0,159	Valid

Tabel 3.8 di atas, menunjukkan bahwa keseluruhan item pernyataan variabel kinerja keuangan pemerintah desa (Y) mempunyai nilai *Corrected Item-Total Correlation* > r-tabel, sehingga keseluruhan item dinyatakan valid yang berarti data kinerja pemerintah desa yang diperoleh dapat mengukur ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya dan dapat digunakan dalam proses estimasi berikutnya.

3.6.1.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan tingkat keandalan instrumen yang digunakan dalam penelitian. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan teknik *Croanbach's Alpha*, karena merupakan teknik pengujian konsisten reliabilitas yang paling populer dan menunjukkan indeks konsistensi reliabilitas yang cukup sempurna, di mana suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika

memberikan nilai *Cronbach's Alpha* (α) > 0,60 artinya kuesioner dapat dipercaya dan digunakan untuk penelitian. Hasil uji reliabilitas dengan bantuan program SPSS 16.0, secara ringkas dirangkum pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kualitas SDM (X_1)	12	0,934	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi (X_2)	10	0,940	Reliabel
Sistem Pengelolaan Dana Desa (Z)	15	0,915	Reliabel
Kinerja Pemerintah Desa (Y)	10	0,926	Reliabel

Tabel 3.9 di atas, disimpulkan bahwa keseluruhan variabel dinyatakan reliabel, dengan nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 sehingga data yang diperoleh dapat menunjukkan ukuran kestabilan dan konsistensi dari konsep ukuran instrumen dan dapat digunakan dalam proses estimasi berikutnya.

3.6.2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi data sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis statistik deskriptif ini menjelaskan skor jawaban responden pada setiap variabel penelitian menggunakan tabel distribusi frekuensi absolut yang menunjukkan angka rata-rata, median, kisaran dan standar deviasi.

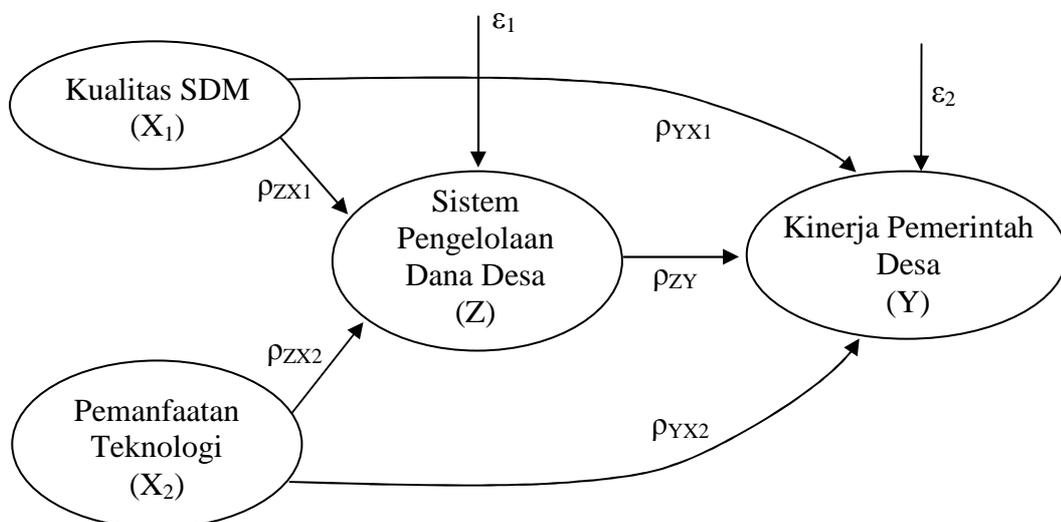
3.6.3. Analisis Jalur

Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur (*path analysis*) merupakan suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya

secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. Pembobotan regresi diprediksikan dalam suatu model yang dibandingkan dengan matriks korelasi yang diobservasi untuk semua variabel dan dilakukan juga penghitungan uji keselarasan statistik. *Path analysis* merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang *inheren* antar variabel yang disusun berdasarkan urutan temporer menggunakan koefisien jalur sebagai besaran nilai dalam menentukan besarnya pengaruh variabel independen *exogenous* terhadap variabel dependen *endogenous*.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghitung koefisien jalur adalah, sebagai berikut:

1. Membuat diagram jalur, dan kemudian membuat persamaan jalurnya.



Gambar 3.1. Diagram Analisis Jalur

Persamaan struktural sebagai berikut:

Diagram jalur di atas mempunyai dua persamaan struktural, sebagai berikut:

$$Z = \rho_{ZX1}X_1 + \rho_{ZX2}X_2 + \varepsilon_1 \quad (\text{persamaan sub struktural 1})$$

$$Y = \rho_{YX1}X_1 + \rho_{YX2}X_2 + \rho_{ZY}Z + \varepsilon_2 \quad (\text{persamaan sub struktural 2})$$

2. Menghitung $R^2Y(X_1, X_2)$, yaitu koefisien yang menyatakan determinasi total, dengan menggunakan rumus:

$$R^2Y(X_1, X_2) = P_y X_1 P_y X_2 \quad X \begin{vmatrix} rYX_1 \\ rYX_2 \end{vmatrix}$$

3. Menghitung besarnya koefisien pengaruh variabel-variabel lain (ε) dengan rumus sebagai berikut:

$$PY\varepsilon_1 = \sqrt{1 - R^2Y(X_1, X_2)}$$

4. Menguji keberartian koefisien jalur secara keseluruhan dengan menggunakan uji-F, dengan rumus:

$$F = \frac{(n - k - 1)R^2Y(X_1, X_2)}{k(1 - R^2Y(X_1, X_2))}$$

5. Menguji keberartian koefisien secara parsial atau uji-t, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{PYX_1}{\sqrt{\frac{(1 - R^2Y(X_1, X_2))C_{11}}{(n - k - 1)}}}$$

6. Menghitung nilai korelasi antar variabel, digunakan rumus:

$$RX_1X_2 = \sqrt{\frac{R^2X_1Y + R^2X_2Y + Y - 2(RX_1Y)(RX_2Y)(RX_1Y_2)}{1 - R^2X_1Y_2}}$$

7. Menghitung pengaruh secara proporsional, yaitu menghitung pengaruh langsung dan tidak langsung variabel bebas terhadap variabel tergangungnya.

Untuk mempermudah proses pengolahan data penelitian ini, maka analisis atau pengujian-pengujian di atas dilakukan dengan bantuan program pengolahan data *Statistical Packages for Social Science* (SPSS) versi 16.0.

3.6.4. Uji Sobel

Pada penelitian ini terdapat variabel *intervening* yaitu sistem pengelolaan dana desa. Menurut Baron dan Kenny dalam Ghozali (2011), suatu variabel disebut variabel mediasi jika variabel tersebut ikut mempengaruhi hubungan antara variabel prediktor (independen) dan variabel kriteria (dependen). Untuk mendeteksi pengaruh *intervening* (mediasi) dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel dan dikenal dengan Uji Sobel (Sobel Test). Uji Sobel ini dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel independen (X) kepada variabel dependen (Y) melalui variabel *intervening* (Z) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$S_{ab} = \sqrt{b^2 Sa^2 + a^2 Sb^2 + Sa^2 Sb^2}$$

Untuk menguji signifikan pengaruh tidak langsung, maka perlu dihitung nilai t dari koefisien *ab* dengan rumus:

$$t = \frac{ab}{S_{ab}}$$

Nilai t-hitung ini dibandingkan dengan nilai t-tabel dan jika nilai t-hitung > t-tabel maka dapat disimpulkan bahwa terjadi pengaruh mediasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Karakteristik Responden

Responden yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah para aparatur desa yang bertanggung jawab terkait pengelolaan dana desa yaitu: kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa (Kaur Keuangan) dengan total sebanyak 162 orang. Berdasarkan data dari 162 responden melalui daftar pertanyaan (kuesioner), didapat karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan, dan lama jabatan. Penggolongan ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai karakteristik responden sebagai objek penelitian.

Tabel 4.1. Karakteristik Responden

Karakteristik Responden		Frekuensi	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Pria	105	64,8
	Wanita	57	35,2
Umur	< 30 tahun	21	13,0
	30 – 50 tahun	104	64,2
	> 50 tahun	37	22,8
Pendidikan	SMA/SMK	89	54,9
	D3	22	13,6
	S1	49	30,2
	S2	2	1,2
Lama Jabatan	< 5 tahun	48	29,6
	5 – 10 tahun	60	37,1
	> 10 tahun	54	33,3

Berdasarkan data pada Tabel 4.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa karakteristik responden penelitian menurut jenis kelamin dari 162 orang, mayoritas berjenis kelamin pria yaitu sebanyak 105 orang (64,8%) sedangkan wanita sebanyak 57 orang (35,2%). Karakteristik responden menurut umur dari

162 orang, mayoritas berumur antara 30 – 50 tahun yaitu sebanyak 104 orang (64,2%), berumur lebih dari 50 tahun sebanyak 37 orang (22,8%) dan yang berumur kurang dari 30 tahun sebanyak 21 orang (13%). Karakteristik responden menurut pendidikan dari 162 orang, mayoritas adalah lulusan SMA/SMK yaitu sebanyak 89 orang (54,9%), lulusan S1 sebanyak 49 orang (30,2%), lulusan D3 sebanyak 22 orang (13,6%) dan lulusan S2 sebanyak 2 orang (1,2%). Sementara karakteristik responden menurut lama jabatan dari 162 orang, mayoritas telah menjabat selama 5-10 tahun yaitu sebanyak 60 orang (37,1%), menjabat lebih dari 10 tahun sebanyak 54 orang (33,3%) dan menjabat kurang dari 5 tahun sebanyak 48 orang (29,6%).

4.1.2. Deskriptif Data Penelitian

Data yang diperoleh dari hasil tanggapan responden digunakan untuk menginterpretasikan pembahasan sehingga dapat diketahui kondisi dari setiap indikator variabel yang diteliti. Interpretasi variabel yang diteliti, dilakukan kategorisasi terhadap tanggapan responden berdasarkan rata-rata skor tanggapan responden. Prinsip kategorisasi dilakukan berdasarkan rentang skor maksimum dan skor minimum dibagi jumlah kategori yang diinginkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rentang Skor Kategori} = \frac{\text{Skor Maksimum} - \text{Skor Minimum}}{\text{Jumlah Kategori}}$$

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (X₁)

Data kualitas SDM diukur melalui 4 (empat) dimensi yang selanjutnya dioperasionalkan menjadi 12 indikator. Dimensi dari kualitas SDM meliputi

pengetahuan terdiri dari 4 indikator, keterampilan terdiri dari 3 indikator, pelatihan terdiri dari 2 indikator dan pengalaman terdiri dari 3 indikator.

Tabel 4.2. Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Berdasarkan Indikator Untuk Setiap Dimensi Kualitas SDM

No.	Dimensi/Indikator	Distribusi Tanggapan					Rerata Skor	Kategori
		SS	S	KS	TS	STS		
Pengetahuan								
1	Pengelolaan Dana Desa	56	103	3	0	0	4,33	Baik Sekali
2	Anggaran Dana Desa	55	104	2	1	0	4,31	Baik Sekali
3	Peraturan Pengelolaan Dana Desa	43	115	4	0	0	4,24	Baik Sekali
4	Pengetahuan siklus Akuntansi	37	100	25	0	0	4,07	Baik
Rerata Skor							4,24	Baik Sekali
Keterampilan								
5	Keahlian menyusun dan menyajikan laporan dana desa	40	108	12	2	0	4,15	Baik
6	Teknologi informasi	41	108	11	2	0	4,16	Baik
7	Kegiatan sesuai program	44	108	8	2	0	4,20	Baik
Rerata Skor							4,17	Baik
Pelatihan								
8	Mengikuti pelatihan	56	76	9	21	0	4,03	Baik
9	Memahami materi pelatihan	31	99	11	21	0	3,86	Baik
Rerata Skor							3,95	Baik
Pengalaman								
10	Pengalaman di bidang akuntansi	28	82	31	21	0	3,72	Baik
11	Mengurangi kesalahan bekerja	39	94	8	21	0	3,93	Baik
12	Etika dan kode etik	52	104	6	0	0	4,28	Baik Sekali
Rerata Skor							3,98	Baik
Rerata Total Skor Kualitas SDM							4,11	Baik

Berdasarkan data pada Tabel 4.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang kualitas SDM rata-rata tergolong kategori baik (4,11). Rata-rata skor maksimum tanggapan responden berada pada dimensi pengetahuan yaitu sebesar 4,24. Hal ini berarti aparatur desa selaku sumber daya manusia yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengelolaan dana desa telah memiliki kualitas dan pengetahuan yang tergolong baik sekali. Sementara rata-rata skor minimum tanggapan responden berada pada dimensi pelatihan yaitu sebesar 3,95. Hal ini berarti, perlunya dilakukan pelatihan agar pemerintah desa memiliki keahlian, kemampuan dan kualitas SDM yang lebih baik khususnya terkait pengelolaan dana desa.

2. Pemanfaatan Teknologi (X_2)

Data pemanfaatan teknologi diukur melalui 4 (empat) dimensi yang selanjutnya dioperasionalkan menjadi 10 indikator. Dimensi dari pemanfaatan teknologi meliputi penggunaan *software* aplikasi terdiri dari 2 indikator, proses akuntansi secara komputerisasi terdiri dari 3 indikator, laporan dan manajerial yang terintegrasi terdiri dari 2 indikator dan dimensi kemampuan pegawai mengoperasikan komputer terdiri dari 3 indikator.

Tabel 4.3. Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Berdasarkan Indikator Untuk Setiap Dimensi Pemanfaatan Teknologi

No.	Dimensi/Indikator	Distribusi Tanggapan					Rerata Skor	Kategori
		SS	S	KS	TS	STS		
Penggunaan Software Aplikasi								
1	Software dan Aplikasi Pengelolaan Dana Desa	101	60	1	0	0	4,62	Baik Sekali
2	Sesuai Perundang-undangan	109	53	0	0	0	4,67	Baik Sekali
Rerata Skor							4,65	Baik Sekali
Proses Akuntansi Secara Komputerisasi								
3	Proses secara Komputerisasi	94	67	1	0	0	4,57	Baik Sekali
4	Menjamin keakuratan hasil	82	80	0	0	0	4,51	Baik Sekali
5	Mempermudah pekerjaan	92	70	0	0	0	4,57	Baik Sekali
Rerata Skor							4,55	Baik Sekali
Laporan dan Manajerial yang Terintegrasi								
6	Sistem informasi terintegrasi	72	90	0	0	0	4,44	Baik Sekali
7	Pengelolaan dana desa secara utuh	83	79	0	0	0	4,51	Baik Sekali
Rerata Skor							4,48	Baik Sekali
Kemampuan Pegawai Mengoperasikan Komputer								
8	Mengoperasikan komputer	66	88	6	2	0	4,35	Baik Sekali
9	Mengakses internet	67	91	1	3	0	4,37	Baik Sekali
10	Menggunakan SISKUEDES	63	92	5	2	0	4,33	Baik Sekali
Rerata Skor							4,35	Baik Sekali
Rerata Total Skor Kualitas SDM							4,49	Baik Sekali

Berdasarkan data pada Tabel 4.3 di atas, dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang pemanfaatan teknologi rata-rata tergolong kategori baik sekali (4,49). Hal ini berarti bahwa aparatur pemerintah desa telah memanfaatkan teknologi informasi seperti komputer, internet dan *software* atau aplikasi dengan baik sekali dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Hal ini juga sejalan dengan kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah

yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

3. Sistem Pengelolaan Dana Desa (Z)

Data sistem pengelolaan dana desa diukur melalui 5 (lima) dimensi yang selanjutnya dioperasionalkan menjadi 15 indikator. Dimensi dari sistem pengelolaan dana desa meliputi perencanaan terdiri dari 3 indikator, pelaksanaan terdiri dari 3 indikator, penatausahaan terdiri dari 3 indikator, pelaporan terdiri dari 3 indikator, dan dimensi pertanggungjawaban terdiri dari 3 indikator.

Tabel 4.4. Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Berdasarkan Indikator Untuk Setiap Dimensi Sistem Pengelolaan Dana Desa

No.	Dimensi/Indikator	Distribusi Tanggapan					Rerata Skor	Kategori
		SS	S	KS	TS	STS		
Perencanaan								
1	Transparan dan akuntabel	87	75	0	0	0	4,54	Baik Sekali
2	Penyusunan APBDesa	45	58	44	13	2	3,81	Baik
3	Prioritas penggunaan dana desa	97	64	1	0	0	4,59	Baik Sekali
Rerata Skor							4,31	Baik Sekali
Pelaksanaan								
4	Ekonomis, efisien, efektif, adil merata	70	86	6	0	0	4,40	Baik Sekali
5	Tidak melakukan pemungutan	92	65	5	0	0	4,54	Baik Sekali
6	Kejujuran	112	50	0	0	0	4,69	Baik Sekali
Rerata Skor							4,54	Baik Sekali
Penatausahaan								
7	Pencatatan transaksi	97	65	0	0	0	4,60	Baik Sekali
8	Melaksanakan tutup buku	68	92	2	0	0	4,41	Baik Sekali
9	Pertanggungjawaban laporan	71	90	1	0	0	4,43	Baik Sekali
Rerata Skor							4,48	Baik Sekali
Pelaporan								
10	Aktivitas pengelolaan dana desa	61	99	2	0	0	4,36	Baik Sekali
11	Melaporkan secara tepat waktu	67	93	2	0	0	4,40	Baik Sekali
12	Laporan realisasi APBDesa	51	78	27	6	0	4,07	Baik Sekali
Rerata Skor							4,28	Baik Sekali
Pertanggungjawaban								
13	Dapat dipertanggungjawabkan	100	62	0	0	0	4,62	Baik Sekali
14	Pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat	90	72	0	0	0	4,56	Baik Sekali
15	Program pemberdayaan masyarakat	73	89	0	0	0	4,45	Baik Sekali
Rerata Skor							4,54	Baik Sekali
Rerata Total Skor Kualitas SDM							4,43	Baik Sekali

Berdasarkan data pada Tabel 4.4 di atas, dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang sistem pengelolaan dana desa rata-rata tergolong

kategori baik sekali (4,43). Hal ini berarti bahwa pelaksanaan sistem pengelolaan dana desa telah berjalan dengan baik sekali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.

4. Kinerja Pemerintah Desa (Y)

Data kinerja pemerintah desa diukur melalui 3 (tiga) dimensi yang selanjutnya dioperasionalkan menjadi 10 indikator. Dimensi dari kinerja pemerintah desa meliputi ekonomis terdiri dari 3 indikator, efisiensi terdiri dari 3 indikator, dan efektivitas terdiri dari 4 indikator.

Tabel 4.5. Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Berdasarkan Indikator Untuk Setiap Dimensi Kinerja Pemerintah Desa

No.	Dimensi/Indikator	Distribusi Tanggapan					Rerata Skor	Kategori
		SS	S	KS	TS	STS		
Ekonomis								
1	Realisasi anggaran secara hemat	101	61	0	0	0	4,62	Baik Sekali
2	Mengacu pada harga terendah/pasar	86	74	2	0	0	4,52	Baik Sekali
3	Terhindar dari pemborosan anggaran	94	68	0	0	0	4,58	Baik Sekali
Rerata Skor							4,57	Baik Sekali
Efisiensi								
4	Program dikelola secara efisien	99	63	0	0	0	4,61	Baik Sekali
5	Pengalokasian dana desa	93	69	0	0	0	4,57	Baik Sekali
6	Pengelolaan secara cermat	94	68	0	0	0	4,58	Baik Sekali
Rerata Skor							4,59	Baik Sekali
Efektivitas								
7	Sesuai target	82	80	0	0	0	4,51	Baik Sekali
8	Pertimbangan efektivitas	79	83	0	0	0	4,49	Baik Sekali
9	Pencapaian pembangunan di desa	53	101	8	0	0	4,28	Baik Sekali
10	Manfaat yang dirasakan masyarakat	86	76	0	0	0	4,53	Baik Sekali
Rerata Skor							4,45	Baik Sekali
Rerata Total Skor Kualitas SDM							4,53	Baik Sekali

Berdasarkan data pada Tabel 4.5 di atas, dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang kinerja pemerintah desa rata-rata tergolong kategori baik sekali (4,53). Hal ini berarti bahwa aparatur pemerintah desa telah mencapai hasil kerja yang baik sekali dalam melaksanakan kegiatan khususnya terkait pengelolaan dana desa. Dalam hal ini aparatur pemerintah desa secara keseluruhan telah melakukan kegiatan secara ekonomis, efisiensi dan efektivitas, mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban desa sehingga program pembangunan di desa dapat tercapai sesuai target serta dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

4.1.3. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran setiap variabel yang digunakan pada penelitian yang meliputi nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi.

Tabel 4.6. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std.Dev
Kualitas SDM (X_1)	162	32	60	49,30	6,327
Pemanfaatan Teknologi (X_2)	162	37	50	44,94	4,288
Sistem Pengelolaan Dana Desa (Z)	162	55	75	66,46	5,831
Kinerja Pemerintah Desa (Y)	162	39	50	45,29	3,908

Berdasarkan data pada Tabel 4.6 di atas, menunjukkan bahwa:

1. Hasil pengukuran variabel kualitas SDM (X_1) diperoleh skor minimum sebesar 32 dan skor maksimum sebesar 60 dengan rata-rata (*mean*) skor sebesar 49,30 dan standar deviasi sebesar 6,327.
2. Hasil pengukuran variabel pemanfaatan teknologi (X_2) diperoleh skor minimum sebesar 37 dan skor maksimum sebesar 50 dengan rata-rata (*mean*) skor sebesar 44,94 dan standar deviasi sebesar 4,288.
3. Hasil pengukuran variabel sistem pengelolaan dana desa (Z) diperoleh skor minimum sebesar 55 dan skor maksimum sebesar 75 dengan rata-rata (*mean*) skor sebesar 66,46 dan standar deviasi sebesar 5,831.

4. Hasil pengukuran variabel kinerja pemerintah desa (Y) diperoleh skor minimum sebesar 39 dan skor maksimum sebesar 50 dengan rata-rata (*mean*) skor sebesar 45,29 dan standar deviasi sebesar 3,908.

4.1.4. Analisis Korelasi Antar Vairabel

Untuk mengetahui hubungan antara variabel penelitian dilakukan dengan teknik analisis korelasi langsung menggunakan *Pearson Correlation*. Hasil uji korelasi (*Pearson Correlation*) antar variabel penelitian dengan bantuan program SPSS 16.0, secara ringkas dirangkum pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Matriks Korelasi Antar Variabel

		<i>Correlations</i>			
		X₁	X₂	Z	Y
X₁	<i>Pearson Correlation</i>	1	0,097	0,319**	0,340**
	<i>Sig. (2-tailed)</i>		0,221	0,000	0,000
	N	162	162	162	162
X₂	<i>Pearson Correlation</i>	0,097	1	0,681**	0,581**
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,221		0,000	0,000
	N	162	162	162	162
Z	<i>Pearson Correlation</i>	0,319**	0,681**	1	0,759**
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,000	0,000		0,000
	N	162	162	162	162
Y	<i>Pearson Correlation</i>	0,340**	0,581**	0,759**	1
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,000	0,000	0,000	
	N	162	162	162	162

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.7, menunjukkan bahwa:

1. Korelasi antara X₁ dengan X₂ diperoleh nilai *pearson correlation* sebesar 0,097 dan nilai probabilitas (Sig.) sebesar 0,221. Karena nilai $p = 0,221 > 0,05$ maka secara statistik dapat disimpulkan tidak terdapat hubungan atau korelasi langsung antara kualitas SDM (X₁) dengan pemanfaatan teknologi (X₂).
2. Korelasi antara X₁ dengan Z diperoleh nilai *pearson correlation* sebesar 0,319 dan Sig. (*p*) sebesar 0,000. Karena nilai $p = 0,000 < 0,05$ maka secara statistik

dapat disimpulkan terdapat hubungan atau korelasi langsung antara kualitas SDM (X_1) dengan sistem pengelolaan dana desa (Z).

3. Korelasi antara X_1 dengan Y diperoleh nilai *pearson correlation* sebesar 0,340 dan Sig. (p) sebesar 0,000. Karena nilai $p = 0,000 < 0,05$ maka secara statistik dapat disimpulkan terdapat hubungan atau korelasi langsung antara kualitas SDM (X_1) dengan kinerja pemerintahan desa (Y).
4. Korelasi antara X_2 dengan Z diperoleh nilai *pearson correlation* sebesar 0,681 dan Sig. (p) sebesar 0,000. Karena nilai $p = 0,000 < 0,05$ maka secara statistik dapat disimpulkan terdapat hubungan atau korelasi langsung antara pemanfaatan teknologi (X_2) dengan sistem pengelolaan dana desa (Z).
5. Korelasi antara X_2 dengan Y diperoleh nilai *pearson correlation* sebesar 0,581 dan Sig. (p) sebesar 0,000. Karena nilai $p = 0,000 < 0,05$ maka secara statistik dapat disimpulkan terdapat hubungan atau korelasi langsung antara pemanfaatan teknologi (X_2) dengan kinerja pemerintahan desa (Y).

4.1.5. Analisis Jalur Substruktur 1

Hasil analisis regresi dengan bantuan program SPSS, diperoleh korelasi untuk substruktur 1 sebagai berikut:

Tabel 4.8. Koefisien Jalur Substruktur 1

		<i>Coefficients^a</i>				
		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
Model		B	<i>Std. Error</i>	Beta	t	Sig.
1	(Constants)	14,737	3,980		3,703	0,000
	X1	0,235	0,050	0,255	4,664	0,000
	X2	0,893	0,074	0,657	12,007	0,000

a. Dependent Variabel: Z

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.8, kolom *Standardized Coefficients* merupakan koefisien jalur variabel X_1 dan X_2 atau disebut koefisien beta (beta hitung), dari tabel tersebut dapat disusun matriks koefisien jalur sebagai berikut:

$$\begin{pmatrix} \rho_{ZX1} \\ \rho_{ZX2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,255 \\ 0,657 \end{pmatrix}$$

Dengan demikian, dapat dituliskan persamaan substruktur 1 sebagai berikut:

$$Z = 0,255 X_1 + 0,657 X_2 + \varepsilon$$

Hasil analisis pada Tabel 4.8, dapat diuji koefisien jalur masing-masing variabel X_1 dan X_2 dengan variabel Z . Pengujian ini sifatnya dua arah, sebab proporsi hipotetik tidak mengisyaratkan apakah pengaruh X_1 terhadap Y itu merupakan pengaruh positif atau negatif. Hasil analisis pada Tabel 4.8, pada kolom t dan $Sig.$ dipakai untuk menguji koefisien jalur.

- Koefisien Jalur $\rho_{Z.X1}$

$$H_0 : \rho_{Z.X1} = 0$$

$$H_a : \rho_{Z.X1} \neq 0$$

Berdasarkan Tabel 4.8, diperoleh nilai t -hitung sebesar 4,664 dengan nilai **Sig.** sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, H_0 ditolak atau terima H_a , artinya ada hubungan linier.

- Koefisien Jalur $\rho_{Z.X2}$

$$H_0 : \rho_{Z.X2} = 0$$

$$H_a : \rho_{Z.X2} \neq 0$$

Berdasarkan Tabel 4.8, diperoleh nilai t -hitung sebesar 12,007 dengan nilai **Sig.** sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, H_0 ditolak atau terima H_a , artinya ada hubungan linier.

Berdasarkan hasil pengujian koefisien jalur menunjukkan bahwa koefisien jalur dari X_1 ke Z dan dari X_2 ke Z , kedua-duanya secara statistik adalah bermakna (signifikan) dengan nilai Sig. $< 0,05$.

Tabel 4.9. Koefisien Determinasi Substruktur 1

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,727 ^a	0,529	0,523	4,028

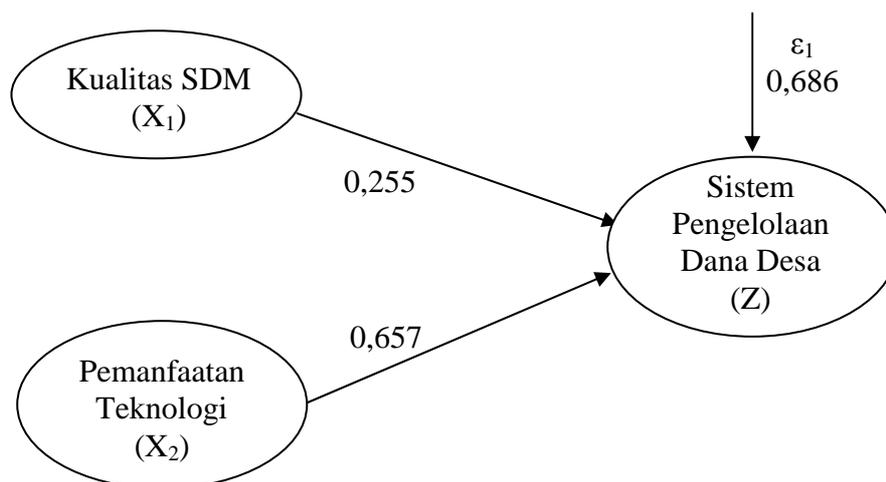
a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Z

Berdasarkan Tabel 4.9, diperoleh nilai *R square* (R^2) atau koefisien determinasi sebesar 0,529. Dari *R square* tersebut dapat dihitung koefisien jalur variabel lain di luar model yakni ρ_{Ze} dengan rumus:

$$\rho_{Ze} = \sqrt{1-0,529} = 0,686$$

Dengan demikian berdasarkan hasil-hasil analisis jalur substruktur 1 yang telah dilakukan maka dapat digambarkan diagram jalur, seperti pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Diagram Jalur Persamaan Substruktur 1

Persamaan substruktural 1 untuk diagram jalur di atas adalah sebagai berikut:

$$Z = 0,255 X_1 + 0,675 X_2 + 0,686 \varepsilon$$

Tabel 4.10. ANOVA Substruktur 1

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2894,688	2	1447,344	89,211	0,000 ^a
	Residual	2579,590	159	16,224		
	Total	5474,278	161			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variabel: Z

Berdasarkan data pada Tabel 4.10 di atas, diperoleh nilai F-hitung sebesar 89,211 dengan nilai probabilitas (Sig.) 0,000. Karena nilai Sig. (p) < 0,05 sehingga disimpulkan terdapat hubungan atau pengaruh positif antara kualitas SDM (X_1) dan pemanfaatan teknologi (X_2) secara simultan terhadap sistem pengelolaan dana desa (Z).

4.1.6. Analisis Jalur Substruktur 2

Hasil analisis regresi dengan bantuan program SPSS, diperoleh korelasi untuk substruktur 2 sebagai berikut:

Tabel 4.11. Koefisien Jalur Substruktur 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constants)	7,826	2,576		3,309	0,003
X1	0,079	0,033	0,128	2,378	0,019
X2	0,134	0,064	0,147	2,102	0,037
Z	0,414	0,049	0,618	8,410	0,000

a. Dependent Variabel: Y

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas, kolom *Standardized Coefficients* merupakan koefisien jalur variabel X_1 , X_2 dan Z atau disebut koefisien beta (beta hitung), dari tabel tersebut dapat disusun matriks koefisien jalur substruktur 2 sebagai berikut:

$$\begin{pmatrix} \rho_{YX1} \\ \rho_{YX2} \\ \rho_{YZ} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,128 \\ 0,147 \\ 0,618 \end{pmatrix}$$

Dengan demikian, dapat dituliskan persamaan substruktur 2 sebagai berikut:

$$Y = 0,128 X_1 + 0,147 X_2 + 0,618 Z + \varepsilon$$

Hasil analisis pada Tabel 4.11, dapat diuji koefisien jalur masing-masing variabel X_1 , X_2 dan Z dengan variabel Y . Hasil analisis pada Tabel 4.11, pada kolom t dan $Sig.$ dipakai untuk menguji koefisien jalur.

- Koefisien Jalur $\rho_{Y.X1}$

$$H_0 : \rho_{Y.X1} = 0$$

$$H_a : \rho_{Y.X1} \neq 0$$

Berdasarkan Tabel 4.11, diperoleh nilai t -hitung sebesar 2,378 dengan nilai **Sig.** sebesar $0,019 < 0,05$. Dengan demikian, H_0 ditolak atau terima H_a , artinya ada hubungan linier.

- Koefisien Jalur $\rho_{Y.X2}$

$$H_0 : \rho_{Y.X2} = 0$$

$$H_a : \rho_{Y.X2} \neq 0$$

Berdasarkan Tabel 4.11, diperoleh nilai t -hitung sebesar 2,102 dengan nilai **Sig.** sebesar $0,037 < 0,05$. Dengan demikian, H_0 ditolak atau terima H_a , artinya ada hubungan linier.

- Koefisien Jalur $\rho_{Y.Z}$

$$H_0 : \rho_{Y.Z} = 0$$

$$H_a : \rho_{Y.Z} \neq 0$$

Berdasarkan Tabel 4.11, diperoleh nilai t -hitung sebesar 8,410 dengan nilai **Sig.** sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, H_0 ditolak atau terima H_a , artinya ada hubungan linier.

Berdasarkan hasil pengujian koefisien jalur menunjukkan bahwa koefisien jalur dari X_1 ke Y , dari X_2 ke Y dan dari Z ke Y , seluruhnya secara statistik adalah bermakna (signifikan) dengan nilai Sig. $< 0,05$.

Tabel 4.12. Koefisien Determinasi Substruktur 2

<i>Model Summary^b</i>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,773 ^a	0,598	0,590	2,5

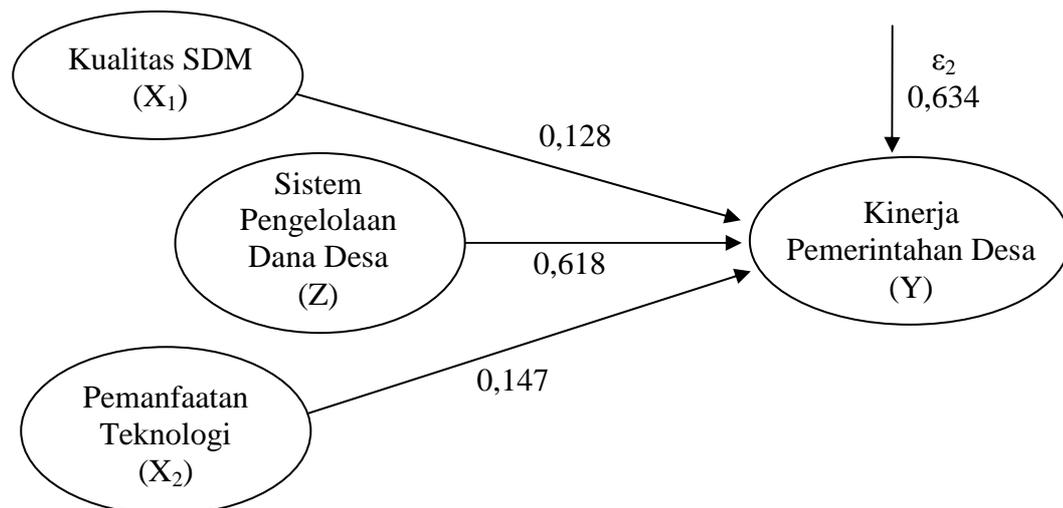
a. Predictors: (Constant), Z, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan Tabel 4.12, diperoleh nilai *R square* (R^2) atau koefisien determinasi sebesar 0,598. Dari *R square* tersebut dapat dihitung koefisien jalur variabel lain di luar model yakni $\rho_{Y\varepsilon}$ dengan rumus:

$$\rho_{Y\varepsilon} = \sqrt{1-0,598} = 0,634$$

Dengan demikian berdasarkan hasil-hasil analisis jalur substruktur 2 yang telah dilakukan maka dapat digambarkan diagram jalur seperti pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2. Diagram Jalur Persamaan Substruktur 2

Persamaan substruktural 2 untuk diagram jalur di atas adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,128 X_1 + 0,147 X_2 + 0,618 Z + 0,634 \varepsilon$$

Tabel 4.13. ANOVA Substruktur 2

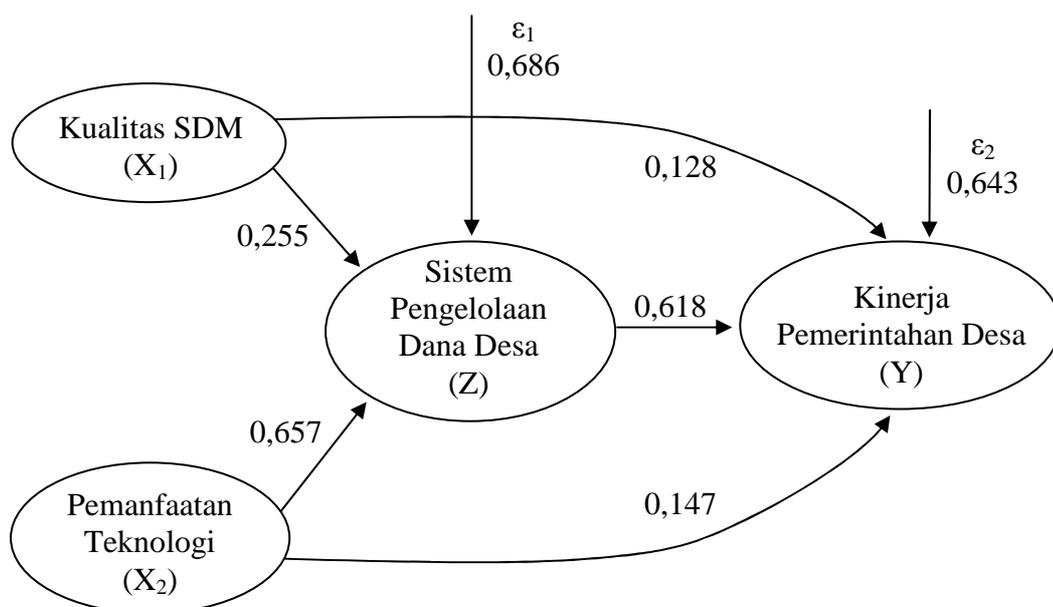
ANOVA ^b						
Model		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	F	Sig.
1	Regression	1470,885	2	490,295	78,369	0,000 ^a
	Residual	988,479	158	6,256		
	Total	2459,364	161			

a. Predictors: (Constant), Z, X₂, X₁

b. Dependent Variabel: Y

Berdasarkan data pada Tabel 4.13 di atas, diperoleh nilai F-hitung sebesar 78,369 dengan nilai probabilitas (Sig.) 0,000. Karena nilai Sig. (p) < 0,05 sehingga disimpulkan terdapat hubungan atau pengaruh positif antara kualitas SDM (X_1), pemanfaatan teknologi (X_2) dan sistem pengelolaan dana desa (Z) secara simultan terhadap kinerja pemerintahan desa.

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis jalur yang telah dilakukan dalam analisis substruktur 1 dan substruktur 2, maka dapat digambarkan model persamaan dua jalur seperti pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3. Diagram Model Persamaan Dua Jalur

Dengan demikian, persamaan strukturalnya adalah sebagai berikut:

$$Z = 0,255 X_1 + 0,657 X_2 + 0,686 \varepsilon \quad \dots\dots \text{(Persamaan Substruktur 1)}$$

$$Y = 0,128 X_1 + 0,147 X_2 + 0,618 Z + 0,634 \varepsilon \quad \dots\dots \text{(Persamaan Substruktur 2)}$$

4.1.7. Perhitungan Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

Pengaruh kualitas SDM (X_1) dan pemanfaatan teknologi (X_2) terhadap kinerja pemerintahan desa (Y) dengan sistem pengelolaan dana desa sebagai variabel *intervening* dapat dianalisis menggunakan analisis jalur dengan menentukan nilai pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung.

Tabel 4.14. Nilai Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

Regresi	Koefisien Jalur (Beta)	Sig.	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Total Pengaruh
$X_1 \rightarrow Z$	0,255	0,000	0,255		0,255
$X_2 \rightarrow Z$	0,657	0,000	0,657		0,657
$X_1 \rightarrow Y$	0,128	0,019	0,128	$0,255 \times 0,618 = 0,158$	0,286
$X_2 \rightarrow Y$	0,147	0,037	0,147	$0,657 \times 0,618 = 0,406$	0,553
$Z \rightarrow Y$	0,618	0,000	0,618		0,618

Berdasarkan hasil analisis jalur pada Tabel 4.14 di atas, dapat diberikan analisa sebagai berikut:

- a. Hasil regresi variabel X_1 dengan Z diperoleh nilai Sig. $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) berpengaruh terhadap sistem pengelolaan dana desa, dengan besarnya pengaruh langsung sebesar 25,5%.
- b. Hasil regresi variabel X_2 dengan Z diperoleh nilai Sig. $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap sistem pengelolaan dana desa, dengan besarnya pengaruh langsung sebesar 65,7%.
- c. Hasil regresi variabel X_1 dengan Y diperoleh nilai Sig. $0,019 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) berpengaruh

terhadap kinerja pemerintahan desa, dengan besarnya pengaruh langsung sebesar 12,8% dan pengaruh tidak langsung (melalui sistem pengelolaan dana desa) sebesar 15,8% serta total pengaruh sebesar 28,6%.

- d. Hasil regresi variabel X_2 dengan Y diperoleh nilai Sig. $0,037 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa, dengan besarnya pengaruh langsung sebesar 14,7% dan pengaruh tidak langsung (melalui sistem pengelolaan dana desa) sebesar 40,6% serta total pengaruh sebesar 55,3%.
- e. Hasil regresi variabel Z dengan Y diperoleh nilai Sig. $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa, dengan besarnya pengaruh langsung yaitu sebesar 61,8%.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel kualitas SDM (X_1) memberikan pengaruh secara langsung sebesar 12,8% terhadap kinerja pemerintahan desa (Y), tetapi akan lebih baik jika melalui variabel sistem pengelolaan dana desa (Z) yaitu sebesar 15,8%. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi (X_2) memberikan pengaruh secara langsung sebesar 14,7% terhadap kinerja pemerintahan desa (Y), tetapi akan lebih baik jika melalui variabel sistem pengelolaan dana desa (Z) yaitu sebesar 40,6%.

4.1.8. Uji Sobel

Uji Sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel independen (X_i) kepada variabel dependen (Y) melalui variabel *intervening* (Z) dengan menggunakan rumus:

$$S_{ab} = \sqrt{b^2 Sa^2 + a^2 Sb^2 + Sa^2 Sb^2}$$

Untuk menguji signifikan pengaruh tidak langsung, maka perlu dihitung nilai t dari koefisien ab dengan rumus:

$$t = \frac{ab}{S_{ab}}$$

Uji Sobel antara variabel kualitas SDM (X_1), sistem pengelolaan dana desa (Z) dan kinerja pemerintah desa (Y), berdasarkan hasil analisis dengan bantuan program SPSS 16.0 diperoleh:

$$X_1 \rightarrow Z \quad : a = 0,294 \quad \text{dan} \quad Sa = 0,069$$

$$Z \rightarrow Y \quad : b = 0,486 \quad \text{dan} \quad Sb = 0,036$$

$$\begin{aligned} S_{ab} &= \sqrt{b^2 Sa^2 + a^2 Sb^2 + Sa^2 Sb^2} \\ &= \sqrt{\{(0,486)^2 \cdot (0,069)^2\} + \{(0,294)^2 \cdot (0,036)^2\} + \{(0,069)^2 \cdot (0,036)^2\}} \\ &= \sqrt{0,003721} \\ &= 0,060996 \end{aligned}$$

Selanjutnya dapat dihitung nilai t , sebagai berikut:

$$t = \frac{ab}{S_{ab}} = \frac{(0,294)(0,486)}{0,060996} = 2,342502$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh nilai t -hitung sebesar 2,342502. Karena nilai t -hitung $>$ t -tabel yaitu $2,34250 > 1,96$ maka dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa melalui sistem pengelolaan dana desa. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dana desa merupakan faktor *intervening* (perantara) positif antara pengaruh kualitas SDM terhadap kinerja pemerintahan desa. Hal ini juga mengindikasikan bahwa selain SDM yang berkualitas,

pemerintahan desa juga harus memperhatikan peningkatan dan akuntabilitas sistem pengelolaan dana desa sehingga kinerja pemerintahan desa juga semakin meningkat. Oleh karena itu, kualitas SDM dan sistem pengelolaan dana desa yang akuntabel secara keseluruhan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan untuk meningkatkan kinerja pada pemerintahan desa.

Lebih lanjut uji Sobel antara variabel pemanfaatan teknologi (X_2), sistem pengelolaan dana desa (Z) dan kinerja pemerintah desa (Y), berdasarkan hasil analisis dengan bantuan program SPSS 16.0 diperoleh:

$$X_2 \rightarrow Z \quad : a = 0,927 \quad \text{dan} \quad Sa = 0,079$$

$$Z \rightarrow Y \quad : b = 0,455 \quad \text{dan} \quad Sb = 0,047$$

$$\begin{aligned} Sab &= \sqrt{b^2 Sa^2 + a^2 Sb^2 + Sa^2 Sb^2} \\ &= \sqrt{\{(0,455)^2 \cdot (0,079)^2\} + \{(0,927)^2 \cdot (0,047)^2\} + \{(0,079)^2 \cdot (0,047)^2\}} \\ &= \sqrt{0,006903} \\ &= 0,083086 \end{aligned}$$

Selanjutnya dapat dihitung nilai t , sebagai berikut:

$$t = \frac{ab}{Sab} = \frac{(0,927)(0,455)}{0,083086} = 5,076481$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh nilai t -hitung sebesar 5,076481. Karena nilai t -hitung $>$ t -tabel yaitu $5,076481 > 1,96$ maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa melalui sistem pengelolaan dana desa. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dana desa merupakan faktor *intervening* (perantara) positif antara pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap kinerja pemerintahan desa. Hal ini juga mengindikasikan bahwa selain pemanfaatan

teknologi yang optimal, pemerintahan desa juga harus memperhatikan peningkatan dan akuntabilitas sistem pengelolaan dana desa sehingga kinerja pemerintahan desa juga semakin meningkat. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi yang optimal dan sistem pengelolaan dana desa yang akuntabel secara keseluruhan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan untuk meningkatkan kinerja pada pemerintahan desa.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik membutuhkan diterapkannya prinsip-prinsip *good governance*, termasuk dalam bidang pengelolaan keuangan daerah (Sari, 2010:127). Lebih lanjut menurut Sari (2013:25), “konsep *good governance* merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh sektor publik khususnya adalah pemerintah daerah”. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih responsif atau cepat dan tanggap. Oleh karena itu, pemerintah daerah/desa saat ini menjadi salah satu objek perhatian pengawasan dalam kerjanya

Kinerja pemerintahan desa merupakan hasil kerja atau prestasi aparatur desa dalam melaksanakan seluruh kegiatan secara ekonomis, efisiensi, efektivitas dan pelaporan yang memadai meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban termasuk di bidang keuangan desa. Pengukuran kinerja sektor publik bukan hanya bagaimana kemampuan uang publik dibelanjakan, tetapi dilihat juga dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektifitas, dan tentunya dari segi *outcome*.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Peran manusia dalam anggaran sangat besar karena seluruh tahapan anggaran melibatkan manusia, anggaran dibuat oleh manusia, diperbaiki oleh manusia, dan pencapaiannya dilaksanakan oleh manusia (Astuty, 2012:163). Hal ini menunjukkan bahwa manusia juga merupakan satu-satunya sumber daya yang membuat sumber daya lainnya bekerja dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan organisasi. Oleh karena itu sistem yang sebaik apapun akan sia-sia begitu saja apabila tidak ditunjang oleh kualitas SDM yang memadai.

Hasil temuan penelitian dengan menggunakan kuesioner ditemukan bahwa tanggapan responden terkait kinerja pemerintahan desa rata-rata tergolong kategori baik sekali. Pengukuran kinerja pemerintahan desa dilihat dari 3 (tiga) dimensi meliputi dimensi ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Hasil temuan penelitian juga menunjukkan jawaban responden terhadap ketiga dimensi tersebut rata-rata tergolong pada kategori baik sekali. Hal ini mengindikasikan bahwa aparatur pemerintah desa telah mencapai hasil kerja yang baik sekali dalam melaksanakan kegiatan termasuk di bidang keuangan terkait pengelolaan dana desa. Dalam hal ini aparatur pemerintah desa secara keseluruhan telah melakukan kegiatan secara ekonomis, efisiensi dan efektivitas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban khususnya di bidang keuangan desa sehingga program pembangunan di desa dapat tercapai sesuai target serta dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap kinerja pemerintahan desa rata-rata tergolong kategori baik

sekali. Namun, fenomena yang ada di lapangan khususnya di beberapa desa justru menunjukkan masih kurangnya kinerja pemerintahan desa, salah satunya terkait keterlambatan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa yang sekaligus mengindikasikan bahwa kinerja pemerintahan di beberapa desa masih belum berjalan secara ekonomis, efektif dan efisien, sehingga membuat banyak pihak yang meragukan proses pertanggungjawaban dana desa.

Meskipun demikian, dari hasil pantauan dan wawancara peneliti dengan beberapa responden, ditemukan bahwa keterlambatan pertanggungjawaban dan laporan realisasi dana desa terjadi dikarenakan persyaratan yang ditentukan tidak atau kurang dipenuhi seperti APBDesa belum atau terlambat ditetapkan dan perubahan regulasi. Selain itu juga terdapat beberapa desa yang memang belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya. Hal ini hanya terjadi di beberapa desa saja, atau dengan kata lain tidak semua desa mengalami keterlambatan pertanggungjawaban dan laporan realisasi dana desa. Beberapa upaya juga telah dilakukan mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga pemerintah desa, seperti bimtek dan pelatihan kepada perangkat desa, monitoring dan evaluasi penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang pengalokasian dana desa per desa dan penyalurannya serta sosialisasi prioritas penggunaan dana desa.

Melalui berbagai upaya yang telah dilakukan termasuk bimtek dan pelatihan yang diberikan kepada para aparatur desa, serta adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah (kabupaten) telah terbukti dapat mengatasi permasalahan yang terjadi terkait penyaluran dan penggunaan dana desa, sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa

khususnya dalam mengelola keuangannya. Hal ini juga terlihat dari semakin meningkatnya jumlah penerimaan dana desa yang bersumber dari APBN untuk Kabupaten Deli Serdang, yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp.271.906.373.000 dan pada tahun 2019 mencapai Rp. 306.386.948.000.

Lebih lanjut dari hasil temuan penelitian terkait kualitas SDM berdasarkan hasil kuesioner menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang kualitas SDM rata-rata tergolong kategori baik sekali. Kualitas SDM diukur melalui 4 (empat) dimensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, pelatihan dan pengalaman. Hasil analisis tanggapan responden diperoleh rata-rata skor maksimum tanggapan responden tentang kualitas SDM berada pada dimensi pengetahuan tergolong baik sekali. Hal ini berarti aparatur desa selaku sumber daya manusia yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengelolaan dana desa telah memiliki kualitas dan pengetahuan yang tergolong baik sekali. Sementara rata-rata skor minimum tanggapan responden berada pada dimensi pelatihan tergolong baik. Hal ini berarti, perlunya dilakukan pelatihan agar pemerintah desa memiliki keahlian, kemampuan dan kualitas SDM yang lebih baik khususnya terkait pengelolaan dana desa. Hasil tanggapan responden tentang kualitas SDM mengindikasikan bahwa pemerintahan desa telah memiliki SDM yang berkualitas, ditinjau dari pengetahuan, keterampilan, pelatihan maupun pengalaman.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintahan desa. Hasil ini mengindikasikan semakin baik atau semakin berkualitas sumber daya manusianya (aparatur desa) maka kinerja pemerintahan desa juga akan semakin baik dan semakin meningkat pula.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini sesuai dan sekaligus mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Hendri, dkk (2016), yang menyimpulkan bahwa terdapat arah hubungan yang positif sumber daya manusia terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian Munti dan Fahlevi (2017), yang menyimpulkan bahwa kapasitas aparatur desa memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian Rulyanti, dkk (2017), menyimpulkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. Hasil penelitian Wardani dan Andriyani (2017), yang menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa.

4.2.2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Kinerja Pemerintahan Desa

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan mempermudah penyampaian informasi keuangan ke publik. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Pemanfaatan teknologi informasi seperti penggunaan komputer dan perangkat lunak secara optimal, akan berdampak pada pemrosesan transaksi yang lebih cepat dan perhitungannya juga akan memiliki tingkat keakurasian yang tinggi sehingga akan berujung pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang tepat waktu karena pemanfaatan teknologi akan mengurangi kesalahan yang bersifat material (Primayana, 2014:10). Melalui pemanfaatan teknologi informasi akan memberikan kemudahan kepada pihak pemerintah desa untuk memperoleh informasi keuangan dan kinerja dari pengelolaan keuangan pemerintah desa.

Data tentang pemanfaatan teknologi pada penelitian ini juga diperoleh dari hasil kuesioner dan diukur melalui 4 (empat) dimensi meliputi penggunaan *software* aplikasi, proses akuntansi secara komputerisasi, laporan dan manajerial yang terintegrasi dan dimensi kemampuan pegawai mengoperasikan komputer. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang pemanfaatan teknologi rata-rata tergolong kategori baik sekali. Hasil analisis juga menunjukkan pemanfaatan teknologi untuk masing-masing indikator atau dimensi yang diamati rata-rata juga tergolong baik sekali.

Hasil wawancara dan pantauan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa para aparatur desa telah menggunakan *software* aplikasi dalam pengelolaan dana desa seperti aplikasi SISKUEDES sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan proses akuntansi secara komputerisasi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan, pengolahan dana transaksi keuangan sehingga mempermudah pekerjaan aparatur desa dalam menginput data secara cepat dan tepat waktu. Selain itu laporan akuntansi dan manajerial juga telah dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi dan pengelolaan keuangan dana desa

dilakukan secara utuh mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya. Aparatur desa juga memiliki kemampuan yang baik dalam mengoperasikan komputer, mengakses internet menggunakan komputer, serta memiliki kemampuan dalam menggunakan aplikasi SISKUEDES.

Hasil temuan penelitian tentang pemanfaatan teknologi mengindikasikan bahwa aparatur pemerintah desa telah memanfaatkan teknologi informasi seperti komputer, internet dan *software* atau aplikasi dengan baik sekali dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Hal ini juga sejalan dan didukung dengan kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan antara pemanfaatan teknologi dengan kinerja keuangan pemerintahan desa dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintahan desa. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin baik atau semakin optimal pemanfaatan teknologi maka kinerja pemerintahan desa juga akan semakin baik pula.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini juga sesuai dan sekaligus mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Firdaus, dkk (2015), yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian Aziiz dan Prastiti (2019), yang juga menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

4.2.3. Pengaruh Sistem Pengelolaan Dana Desa terhadap Kinerja Pemerintahan Desa

Pemberian dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang. Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk mengelola dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan Dana Desa dilakukan berdasarkan beberapa kebijakan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri sampai dengan Peraturan Kepala Daerah. Implementasi kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa dapat dikatakan baik apabila ketiga perspektif tersebut di atas. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014, dijelaskan bahwa sistem pengelolaan dana desa merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggung jawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang sangat penting yang harus dilaksanakan oleh aparatur desa, dimana untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa salah satunya adalah dengan melaksanakan sistem pengelolaan keuangan desa secara lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif serta sesuai peraturan yang berlaku. Adanya pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja suatu instansi pemerintah dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, sehingga dengan adanya pengelolaan keuangan desa dapat mendorong terwujudnya kinerja pemerintah desa yang lebih berkualitas, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Data tentang sistem pengelolaan dana desa pada penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh para responden dan diukur melalui 5 (lima) dimensi meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hasil temuan penelitian dan analisis hasil angket menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang sistem pengelolaan dana desa rata-rata tergolong kategori baik sekali. Sistem pengelolaan dana desa untuk masing-masing indikator atau dimensi yang diamati juga rata-rata tergolong baik sekali, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.

Secara umum, aparat pemerintah desa telah melakukan perencanaan dengan melaporkan segala aktivitas dari kegiatan dan dibuktikan dengan pertanggungjawaban dan menyajikan laporan hasil perencanaan, sehingga tercipta perencanaan yang transparan dan akuntabel. Hasil tanggapan responden juga menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan pengelolaan dana desa secara ekonomis, efisien, efektif dan adil merata serta tidak melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Perdes.

Hasil analisis jawaban atau tanggapan responden menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan pencatatan setiap penerimaan atau pengeluaran yang berhubungan dengan dana desa dan dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah serta dibuktikan dengan laporan pertanggungjawaban berupa RAB realisasi dana desa dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Bendahara desa juga mempertanggungjawabkan uang melalui laporan yang disampaikan setiap bulan kepada Kades dengan benar dan tepat waktu. Pemerintah desa membuat dan memberikan laporan yang baik, benar dan tepat waktu atas semua aktivitas

pengelolaan dana desa dimulai dari laporan penerimaan dana desa hingga laporan realisasi dana desa.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa juga disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Pengelolaan keuangan dana desa dilakukan secara terbuka, jujur, akuntabel, ekonomis, efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat melalui laporan realisasi dana desa. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan sistem pengelolaan dana desa telah berjalan dengan baik sekali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan antara sistem pengelolaan dana desa dengan kinerja keuangan pemerintahan desa dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintahan desa. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin baik sistem pengelolaan dana desa (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggung jawaban,) maka akan semakin baik pula kinerja pemerintahan desa.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini, sesuai dan sekaligus mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Sugeng (2014), yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Apabila pengelolaan keuangan daerah dapat dikelola dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel maka hal tersebut dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah khususnya pada sektor pemenuhan pelayanan publik yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Lebih lanjut menurut Rulyanti, dkk, (2017:324), adanya pengelolaan keuangan desa yang baik diharapkan dapat

mempengaruhi kinerja pemerintah desa, dimana semakin tinggi aturan yang diterapkan oleh perangkat desa maka akan meningkatkan kualitas kinerja perangkat desa.

4.2.4. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Perangkat desa harus kompeten dalam melakukan tanggungjawabnya sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa termasuk dalam pengelolaan dana desa. Kepala desa memiliki wewenang dalam penyelenggaraan seluruh pengelolaan keuangan desa karena kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan. Sedangkan perangkat desa merupakan pelaksana teknis dalam kegiatan pengelolaan keuangan. Perangkat desa ditunjuk langsung oleh kepala desa untuk pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa harus kompeten dalam melakukan tanggungjawabnya sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa yang baik, kepala desa dan perangkat desa yang terkait dengan sistem pelaporan keuangan harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. SDM yang berkualitas dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena SDM tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu (Sembiring, 2013:2). Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan

keputusan (Mardiasmo, 2002:146). Untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan desa maka staf pemerintahan desa harus memiliki kualifikasi sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya. Oleh sebab itu diperlukan adanya pengoptimalisasian SDM dengan penempatan pegawai sesuai kompetensinya.

Hasil temuan penelitian berdasarkan hasil kuesioner menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang kualitas SDM rata-rata tergolong kategori baik sekali serta mengindikasikan bahwa pemerintahan desa telah memiliki SDM yang berkualitas, ditinjau dari pengetahuan, keterampilan, pelatihan maupun pengalaman. Lebih lanjut dari hasil temuan penelitian berdasarkan hasil kuesioner juga menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang sistem pengelolaan dana desa rata-rata tergolong kategori baik sekali ditinjau dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya SDM atau aparatur desa yang berkualitas maka pelaksanaan sistem pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik dan lancar (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban).

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis antara kualitas SDM dengan sistem pengelolaan dana desa disimpulkan bahwa kualitas SDM berpengaruh positif terhadap sistem pengelolaan dana desa. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin berkualitas SDM maka akan semakin baik pula pelaksanaan sistem pengelolaan dana desa.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini, sesuai dan sekaligus mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Rulyanti (2017), menyimpulkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan

keuangan desa. Hasil penelitian Sapartiningsih, dkk (2018), menyimpulkan bahwa ada pengaruh positif signifikan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian Yesinia, dkk (2018), juga menyimpulkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hasil penelitian Aziiz dan Prastiti (2019), menyimpulkan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

4.2.5. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa

Teknologi informasi memiliki peran penting dalam sektor pemerintahan. Peranan teknologi informasi menjadi semakin penting dalam kegiatan pengelolaan keuangan pemerintah ketika inovasi teknologi informasi dan telekomunikasi terus menerus terjadi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola keuangan pemerintah desa memberikan banyak keuntungan diantaranya proses *input* data keuangan menjadi *output* yang berupa laporan keuangan pemerintah dapat dilakukan lebih cepat, efisien, dan lebih efektif.

Pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam pengelolaan dana desa akan memberikan kemudahan bagi aparatur desa dalam menjalankan berbagai tugas di pemerintahan desa, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari sistem pengendalian intern dengan menggunakan kendali komputer dan dapat meningkatkan akurasi dari informasi yang digunakan. Pemanfaatan teknologi informasi juga sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatanwaktuan.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan mempermudah penyampaian informasi keuangan ke publik. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Lebih lanjut menurut Yosefrinaldi (2013:12) “semakin besar pemanfaatan teknologi informasi maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula”. Wardani dan Andriyani (2017:89), menjelaskan bahwa “pemanfaatan teknologi dapat mengurangi kesalahan dalam proses data, sehingga laporan keuangan menjadi andal”. Haryani dan Sudrajat (2016:114), juga menjelaskan bahwa “pemerintahan desa berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan desa, dan menyalurkan informasi keuangan desa kepada masyarakat agar transparansi dan akuntabilitas terjamin”.

Melalui pemanfaatan sistem teknologi informasi juga akan memberikan kemudahan kepada pihak pemerintah desa untuk memperoleh informasi keuangan dan kinerja dari pengelolaan keuangan pemerintah desa. Dengan pengenalan

teknologi informasi diharapkan pemerintah mampu memberikan peningkatan pelayanan serta memberikan kemudahan bagi aparat desa dalam memenuhi kewajibannya kepada masyarakat maupun kepada pemerintahan di atasnya. Untuk itu aparatur harus mempunyai pemahaman dan kemampuan dalam menggunakan teknologi seperti komputer, *software*, dan jaringan internet

Hasil temuan penelitian tentang pemanfaatan teknologi menunjukkan bahwa aparatur pemerintah desa telah memanfaatkan teknologi informasi seperti komputer, internet dan *software* atau aplikasi dengan baik sekali dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa serta sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Aparatur pemerintah desa juga memiliki kemampuan yang baik dalam mengoperasikan komputer, mengakses internet menggunakan komputer, serta memiliki kemampuan dalam menggunakan aplikasi SISKUEDES.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis antara pemanfaatan teknologi dengan sistem pengelolaan dana desa disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap sistem pengelolaan dana desa. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin baik atau semakin optimal pemanfaatan teknologi (komputer dan perangkat lunak) maka akan semakin baik pula pelaksanaan sistem pengelolaan dana desa (mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggung jawaban).

Kesimpulan dari hasil penelitian ini, sesuai dan sekaligus mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Sapartiningsih, dkk (2018), menyimpulkan bahwa ada pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Aziiz dan Prastiti (2019), menyimpulkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

4.2.6. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Melalui Sistem Pengelolaan Dana Desa

Kualitas SDM merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa. Meskipun demikian, pemahaman mengenai sistem pengelolaan dana desa (mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggung jawaban) di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan dana desa. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan kinerja pemerintahan desa selain dipengaruhi oleh faktor kualitas SDM juga dipengaruhi oleh sistem pengelolaan dana desa yang baik dan akuntabel. Keberhasilan pengelolaan dana desa tidak terlepas dari komitmen yang tinggi dari aparatur desa dan didukung kompetensi yang dimiliki.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa tanggapan responden terkait kinerja pemerintahan desa rata-rata tergolong kategori baik sekali. Hal ini mengindikasikan bahwa aparatur pemerintah desa telah mencapai hasil kerja yang baik sekali dalam melaksanakan kegiatan termasuk pengelolaan dana desa secara ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Lebih lanjut dari hasil temuan penelitian terkait kualitas SDM menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang kualitas SDM juga rata-rata tergolong kategori baik sekali yang meliputi pengetahuan, keterampilan, pelatihan dan pengalaman. Hasil temuan penelitian juga menunjukkan bahwa tanggapan responden terkait sistem pengelolaan dana desa rata-rata tergolong kategori baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis jalur disimpulkan bahwa kualitas SDM berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa melalui sistem pengelolaan dana desa. Hasil uji Sobel menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dana desa merupakan faktor *intervening* (perantara) positif antara pengaruh kualitas SDM terhadap kinerja pemerintah desa. Hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa selain SDM yang berkualitas, pemerintahan desa juga harus memperhatikan peningkatan dan akuntabilitas sistem pengelolaan dana desa (mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggung jawaban) sehingga kinerja keuangan pemerintahan desa juga semakin meningkat. Oleh karena itu, kualitas SDM dan sistem pengelolaan dana desa yang akuntabel secara keseluruhan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa SDM yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem pengelolaan dana desa. Astuty (2015:82), menjelaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan sebagian besar dipengaruhi oleh manusia pelaksananya. Lebih lanjut menurut Astuty (2012:163), “peran manusia dalam anggaran sangat besar karena seluruh tahapan anggaran melibatkan manusia, anggaran dibuat oleh manusia, diperbaiki oleh manusia, dan pencapaiannya dilaksanakan oleh manusia”. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa peran SDM sangat penting dalam pelaksanaan sistem pengelolaan dana desa melalui tahapan-tahapan yang dilakukan serta pencapaian hasil kerja atau kinerja pemerintah desa juga terlaksana karena faktor sumber daya manusianya.

4.2.7. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Melalui Sistem Pengelolaan Dana Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa kepala desa memiliki tugas untuk memanfaatkan teknologi yang tepat guna dalam menjalankan program, prioritas, kegiatan dan kebutuhan dalam pembangunan di desa. Pemanfaatan teknologi termasuk internet sebagai media keterbukaan pemerintah dalam melaporkan keadaan keuangan desa setiap desa untuk memiliki perangkat yang memadai baik dalam pengadaan komputer, aplikasi yang dapat digunakan dengan mudah dan akses jaringan internet.

Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal akan meningkatkan kinerja keuangan pada pemerintahan desa, apabila sistem pengelolaan dana desa juga diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, sehingga akan menghasilkan informasi keuangan yang tepat waktu, relevan, dan dapat dipercaya serta akan dapat mencegah terjadinya kesalahan, kecurangan dan penyimpangan dalam pengolahan data transaksi serta pengelolaan keuangan pemerintah desa.

Penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi merupakan penunjang dalam melakukan berbagai pekerjaan sebagai media informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa akan memberikan kemudahan bagi aparatur desa dalam menjalankan berbagai tugas di pemerintahan desa. Salah satu manfaat dari penggunaan teknologi informasi terkait pengelolaan dana desa yaitu memberikan kemudahan dalam penyusunan laporan dana desa yang lebih akuntabel.

Hasil temuan penelitian terkait pemanfaatan teknologi menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang pemanfaatan teknologi rata-rata tergolong kategori baik sekali. Para aparatur desa telah menggunakan *software* aplikasi dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, proses akuntansi juga dilakukan secara komputerisasi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan. Selain itu laporan akuntansi dan manajerial juga telah dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi dan aparatur desa juga memiliki kemampuan yang baik dalam mengoperasikan komputer termasuk mengakses internet dan menggunakan aplikasi SISKUEDES.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis jalur dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintahan desa melalui sistem pengelolaan dana desa. Hasil uji Sobel menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dana desa merupakan faktor *intervening* (perantara) positif antara pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap kinerja pemerintahan desa.

Hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa selain pemanfaatan teknologi, pemerintahan desa juga harus memperhatikan peningkatan dan akuntabilitas sistem pengelolaan dana desa sehingga kinerja pemerintahan desa juga semakin meningkat. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi yang optimal dan sistem pengelolaan dana desa yang akuntabel secara keseluruhan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Hasil ini mengindikasikan bahwa untuk menghasilkan kinerja yang baik (ekonomis, efisien dan efektif), maka pemerintahan desa harus memiliki SDM maupun aparatur desa yang berkualitas ditinjau dari pengetahuan, keterampilan, pelatihan maupun pengalaman. Dengan kata lain semakin baik atau semakin berkualitas sumber daya manusianya maka semakin baik pula kinerja pemerintahan desa.
2. Pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Hasil ini mengindikasikan bahwa kinerja pemerintahan desa akan semakin baik jika didukung dengan pemanfaatan teknologi yang baik pula. Dengan kata semakin baik atau semakin optimal pemanfaatan teknologi maka semakin baik pula kinerja pemerintahan desa.
3. Sistem pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Hasil ini mengindikasikan bahwa kinerja pemerintahan desa akan dapat dicapai dengan hasil yang baik jika pemerintahan desa dapat melaksanakan sistem pengelolaan dana desa dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Dengan kata lain semakin baik atau semakin akuntabel sistem pengelolaan dana desa maka semakin baik pula kinerja pemerintahan desa.

4. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap sistem pengelolaan dana desa. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin baik atau semakin berkualitas sumber daya manusianya maka semakin baik atau semakin akuntabel pula sistem pengelolaan dana desa.
5. Pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap sistem pengelolaan dana desa. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik atau semakin optimal pemanfaatan teknologi maka semakin baik atau semakin akuntabel pula sistem pengelolaan dana desa.
6. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa melalui sistem pengelolaan dana desa. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dana desa merupakan faktor *intervening* (perantara) positif antara pengaruh kualitas SDM terhadap kinerja pemerintahan desa. Hal ini juga mengindikasikan bahwa selain SDM yang berkualitas, pemerintahan desa juga harus memperhatikan peningkatan dan akuntabilitas sistem pengelolaan dana desa sehingga kinerja pemerintahan desa juga semakin meningkat. Oleh karena itu, kualitas SDM dan sistem pengelolaan dana desa yang akuntabel secara keseluruhan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa.
7. Pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa melalui sistem pengelolaan dana desa. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dana desa merupakan faktor *intervening* (perantara) positif antara pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap kinerja pemerintahan desa. Hal ini juga mengindikasikan bahwa selain pemanfaatan teknologi yang optimal, pemerintahan desa juga harus memperhatikan peningkatan dan akuntabilitas

sistem pengelolaan dana desa sehingga kinerja pemerintahan desa juga semakin meningkat. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi yang optimal dan sistem pengelolaan dana desa yang akuntabel secara keseluruhan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan untuk dapat meningkatkan kinerja pada pemerintahan desa.

5.2. Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan sistem pengelolaan desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa. Oleh karena itu diharapkan kepada pemerintah desa di Kabupaten Deli Serdang khususnya di Kecamatan Batang Kuis, Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Tanjung Morawa untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki, salah satunya dengan mengikutsertakan para aparatur atau perangkat desa dalam bimbingan teknologi maupun pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan sistem pengelolaan dana desa. Hal ini dimaksudkan agar dapat mendukung dan meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Pemerintah desa juga diharapkan untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi yang ada secara optimal sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan kinerja pemerintahan desa.
2. Pemahaman tentang pengelolaan dana desa merupakan aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para aparatur desa dalam mewujudkan

transparansi dan akuntabilitas dana desa. Oleh karena itu, maka diharapkan kepada pemerintah pusat maupun daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk lebih mensosialisasikan kembali aturan dan ketentuan penggunaan dana desa kepada para aparatur desa, melakukan pembekalan dan program pelatihan mengenai teknologi informasi dan sistem pengelolaan dana desa sehingga dihasilkan SDM atau aparatur desa yang berkualitas dan kompeten. Kepada pemerintah daerah juga diharapkan untuk dapat menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun masyarakat dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sehingga dapat mencegah terjadinya berbagai permasalahan penggunaan dana desa seperti penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, laporan fiktif, pemotongan anggaran maupun suap.

3. Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat melanjutkan penelitian ini agar diperoleh hasil empirik yang lebih kuat dan komprehensif, dan disarankan untuk menambah variabel bebas lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan desa, misalnya variabel pengawasan keuangan daerah atau variabel komitmen aparatur desa, serta disarankan untuk melakukan penelitian pada lokasi atau Kecamatan yang lainnya sehingga daya generalisasinya lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-shidiqq, E.A dan Wibisono, H. 2018. “*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa*”. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol. 4 No. 1, Tahun 2018.
- Astuty, W. 2012. “*Pengaruh Lingkungan Bisnis terhadap Informasi Akuntansi Manajemen dan Penganggaran Dampaknya terhadap Kinerja Perusahaan*”. *Triekonomika*, Vol. 11, No. 2, Desember 2012.
- _____. 2015. “*An Analysis of the Effects on Application of Management Accounting Information Systems and Quality Management Accounting Information*”. *Infotmation Management and Business Review*. Vol. 7, No. 3, June 2015.
- Aziiz, M.N dan Prastiti, S.D. 2019. “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa*”. *Jurnal Akuntansi Aktual*. Vol. 6 No. 2, Juli 2019.
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Erlanggsa, Jakarta.
- Candra, K.P.R.N. 2014. “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*”. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. I No. 6. Tahun 2014.
- Firdaus, Nadirsyah dan Fahlevi, H. 2015. “*Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Kebijakan Akuntansi terhadap Kualitas Lapiran Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh*”. *Jurnal Magister Akuntansi, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol. 4 No. 1, Februari 2015.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro, Semarang
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- _____. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi III. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- _____. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, A dan Kusufi, M.S. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Harahap, L 2017. “*Selewengkan Dana Desa Ratusan Juta, Kades ini Ditahan Kejari Deliserdang*”. *Merdeka.com*, 21 Oktober 2017.

- Hariani, P.R.S. 2017a. “Analisis Perkembangan Ekonomi Bidang Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara. *Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI)*. Vol. 6, Tahun 2017.
- _____. 2017b. “Impact of ICTs Development on Economic Growth in Indonesia”. *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*. Vol. 5 Issue 5 Ver. III, Sep. – Oct. 2017.
- Hariyani, D.S dan Sudrajat, M.A. 2016. “Analisis Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa Terhadap Penggunaan Teknologi Accounting Information System Pada Desa-Desa di Kabupaten Madiun”. *ASSETS: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*. Vol. 5 No. 2, Oktober 2016.
- Hendri, S.B.S., dkk. 2016. “Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lombok Tengah”. Conference on Management and Behavioral Studies, Universitas Tarumanagara, Jakarta, 27 Oktober 2016.
- Juliandi, A., Irfan, dan Manurung, S. 2014. *Metode Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi*. UMSU Press, Medan.
- Kadir, A dan Triwahyuni, T.C. 2013. *Pengantar Teknologi Informasi*. Andi, Yogyakarta.
- Khoiriah, S dan Meylina, U. 2017. “Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa”. *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 46 No. 1, Januari 2017.
- Koswara, E. 2001. *Otonomi Daerah Untuk Demokratisasi dan Kemandirian Rakyat*. Sembradi Aksara Nusantara, Jakarta.
- Lengkong, V.P.K dan Tasik, H.H.D. 2018. “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa dengan Instrumen Dimensi Pengukuran Pengelolaan Dana Desa (DP2D2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi*. Vol. 5 No. 1, Maret 2018.
- Magribi, A. 2019. “Penjabat (Pj) Kepala Desa Paya Itik Marlon Didakwa Terima Ratusan Juta dari Proyek Drainase Desa”. *Tribun-Medan.com*, 5 Februari 2019.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- Marlinawati dan Wardani, D.K. 2018. “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa”. *Jurnal Kajian Bisnis*. Vol. 26 No. 2, Juli 2018.

- Maulana, A dan Suharyanto, C.E. 2018. “*Desain Sistem Tata Kelola Dana Desa Berbasis Cloud Server*”. Makalah, Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi 1. 23 Agustus 2018.
- Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____. 2011. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Edisi III. Salemba Empat, Jakarta.
- Munti, F., dan Fahlevi, H. 2017. “*Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Aceh*”. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. Vol. 18 No. 2, Juli 2017.
- Nafidah, L.N dan Anisa, N. 2017. “*Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*”. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*. Vol. 10 No. 2, Oktober 2017.
- Nordiawan, D dan Hertianti, A. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Noverman, Y. 2018. “*Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung)*”. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Vol. 4 No. 2, Desember 2018.
- Novianti, I., Syamsidar dan Syawalina, C.F. 2018. “*Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Efektivitas Fungsi Pengawasan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar*”. *Balance*. Vol. XV No. 1, Januari 2018.
- Peraturan Bupati Deli Serdang No. 03 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Deli Serdang No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabuapten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Sumber Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dan Sumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN).

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.

Primayana, dkk. 2014. *“Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng)”*. *Jurnal Jurusan Akuntansi Program S1, Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 2 No. 1.

Putriyanti, A. 2012. *“Penerapan Otonomi dalam Memperkuat Akuntabilitas Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo”*. *Jurnal E-Civics*. Vol. 1 No. 2.

Romandhon. 2019. *“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, Pengalaman Kerja Aparatur Desa, dan Fasilitas Kantor Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Aparatur Desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo)”*. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATEch)*. Vol. 2 No. 1, Februari 2019.

Rulyanti, D., Sularso, R.A dan Sayekti, Y. 2017. *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening”*. *Bisma: Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 11 No. 3, September 2017.

Sanjaya, S dan Rizky, M.F. 2018. *“Analisis Profitabilitas dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Taspen (Persero) Medan”*. *KITABAH*. Vol. 2 No. 2, Juli – Desember 2018.

Sapartiningsih, D, Suharno dan Kristianto, D. 2018. *“Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”*. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*. Vol. 14 No. 1, Maret 2018.

Sari, E.N. 2010. *“Konsep Anggaran Dalam Perspektif Balance Scorecard: Suatu Tinjauan Teoritis”*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 10, No. 2, September 2010.

_____. 2013. *“Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap Good Governance (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Medan)”*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 1, Maret 2013.

- Sari, E.N., dan Saragih, F. 2009. “Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Hotel Berbintang di Kota Medan”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 9, No. 2, September 2013.
- Sari, M. 2014. “Enterpreneur terhadap Kinerja UKM di Kota Medan”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol.14, No.1, Maret 2014.
- _____. 2015. “Analisis Balanced Scorecard Sebagai Alat Pengukuran Kinerja Perusahaan PT. Jamsostek Cabang Belawan”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol.15, No.1, Maret 2015.
- _____. 2018. “Penerapan Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan”. Prosiding: The National Conferences Management and Business (NCMAB) 2018 “Pemberdayaan dan Penguatan Daya Saing Bisnis dalam Era Digital.
- Sari, R dan Indriani, M. 2018. “Analisis Kinerja Pemerintah Desa dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif (Studi Pada Desa di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 3, No. 4, Tahun 2018.
- Sembiring, F.L. 2013. “Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Pasaman Barat)”. *E-Jurnal, Universitas Negeri Padang*.
- Sinambela, E., Saragih, F dan Sari, E.N. 018. “Analisis Struktur APBD dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara”. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 18, No. 2. Desember 2018.
- Sujarweni, V.W. 2015. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Sumarjo, H. 2010. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)”. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.
- Suparman, W.E. 2014. “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng”. *e-Journal S1 Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 2. No. 1. Tahun 2014.
- Sutarman. 2012. *Pengantar Teknologi Informasi*. Bumi Aksara, Jakarta.

- Suyanto, M. 2005. *Pengantar Teknologi Informasi untuk Bisnis*. Andi, Yogyakarta.
- Triani, N.N.A dan Handayani, S. 2018. “Praktik Pengelolaan Dana Desa”. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 9 No. 1, April 2018.
- Umami, R dan Nurodin, I. 2017. “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa”. *Jurnal Ilmian Ilmu Ekonomi*. Vol. 6 No. 11, Oktober 2017.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
- Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wahyudi, M dan Wulandari, E. 2017. “Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintahan Daerah Kota Magelang)”. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*. Vol. 3 No. 2.
- Wanda, W. 2016. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua”. *Jurnal EMBA*, Vol. 4, No. 3, September 2016.
- Wardani, D.K dan Andriyani, I. 2017. “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa di Kabupaten Klaten”. *Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*. Vol. 5 No. 2, Desember 2017.
- Wenny, C.D. 2012. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Selatan”. *Forum Bisnis dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP*, Vol. 2 No. 1, September 2012.
- Wiguna, M.D.P, Yuniarta, G.A dan Prayudi, M.A. 2017. “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, serta Peran Pendamping Desa terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Studi Pada Desa Penerima Dana Desa Di Kabupaten Buleleng)”. *Jurnal Akuntansi Program S1, e-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 8 No. 2, Tahun 2017.
- Yesinia, N.I, Yuliati, N.C dan Puspitasari, D. 2018. “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa”. *Jurnal Aset (Akuntansi Risei)*. Vol. 8 No. 1, 2018.

- Yosefrinaldi. 2013. *“Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Se-Sumatera Barata)”*. *Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*. Vol. 1 No. 1, Tahun 2013.
- Yudianto, I dan Sugiarti, E. 2017. *“Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)”*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 17 No. 1, Tahun 2017.
- Yulianti dan Mangku. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Lappera Pustaka Utama, Jogjakarta.
- Yulihantini, D.T, Sukarno, H dan Wardayati, S.M. 2018. *“Pengaruh Belanja Modal dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian dan Kinerja Keuangan Desa di Kabupaten Jember.”*. *Bisma: Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 12 No. 1, Januari 2018.

Lampiran. 1

KUESIONER PENELITIAN

Yth. Saudara/i

Responden

Di tempat

Responden yang terhormat,

Saya memohon kesediaan Anda untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner (angket) ini. Saya berharap Anda dapat memberikan jawaban dengan leluasa, sesuai dengan apa yang Anda rasakan, lakukan dan alami, bukan apa yang seharusnya/ideal. Anda diharapkan menjawab dengan jujur dan terbuka, sebab tidak ada jawaban yang benar atau salah.

Sesuai dengan kode etik penelitian, saya menjamin kerahasiaan semua data.

Kesediaan Anda mengisi kuisisioner ini adalah bantuan yang tak ternilai bagi saya. Akhirnya, saya sampaikan terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat saya
Peneliti,

ARFAH LUBIS

IDENTITAS RESPONDEN:

Nama :

Jenis Kelamin : Pria Wanita

Umur : tahun

Pendidikan Terakhir : SMA S1 S2
 Lainnya

Jabatan :

Lama Jabatan : tahun

Jabatan Lama :

Kelurahan/Desa :

Kecamatan :

PETUNJUK:

1. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner/angket ini.
2. Bacalah pertanyaan/pernyataan yang ada dengan seksama, kemudian berikanlah tanda check list (√) pada pilihan jawaban yang dianggap paling sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu.

Pilihan Jawaban:

- SS : Sangat setuju
 S : Setuju
 KS : Kurang Setuju
 TS : Tidak Setuju
 STS : Sangat Tidak Setuju

Contoh:

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Saya memiliki pengalaman untuk menjalankan tugas di bidang Akuntansi	√				

3. Atas partisipasi dan bantuannya, diucapkan terima kasih.

DAFTAR PERNYATAAN:**1. KINERJA PEMERINTAHAN DESA**

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
EKONOMIS						
1	Desa kami telah merealisasikan anggaran pengeluaran dana desa untuk kegiatan dengan hemat dari anggaran yang telah direncanakan.					
2	Pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas selalu mengacu pada harga yang lebih rendah atau mendekati harga pasar.					
3	Setiap program kerja telah dilaksanakan dan dikelola secara ekonomis agar terhindar dari pemborosan anggaran.					
EFISIENSI						
4	Setiap program kerja telah dilaksanakan dan dikelola secara efisien sehingga dapat menghindari pengeluaran yang tidak perlu atau tidak tepat sasaran.					

5	Pengalokasian dana desa yang telah direncanakan sesuai dengan hasil yang telah ditetapkan atau diharapkan.					
6	Desa kami mengelola anggaran dana desa secara cermat dengan melakukan efisiensi (penghematan) terhadap setiap penggunaan anggaran.					
EFEKTIVITAS						
7	Setiap program kerja telah dilaksanakan dan dikelola secara efektif sesuai dengan target yang direncanakan.					
8	Program anggaran dari dana desa dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan terukur bahwa penggunaan anggaran mencapai target atau kepentingan pembangunan bagi masyarakat desa.					
9	Pembangunan di desa kami sudah tercapai sesuai dengan target yang telah direncanakan.					
10	Masyarakat merasakan langsung manfaat dari program kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.					

2. KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
PENGETAHUAN						
1	Saya sebagai aparatur desa memiliki pengetahuan yang baik mengenai pengelolaan dana desa.					
2	Saya memiliki pengetahuan yang baik mengenai penyusunan anggaran dana desa.					
3	Saya memahami semua peraturan mengenai pengelolaan dana desa.					
4	Saya mengetahui dengan baik mengenai siklus akuntansi					
KETERAMPILAN						
5	Saya memiliki keahlian dalam menyusun dan menyajikan laporan dana desa.					
6	Saya memiliki keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi.					
7	Saya mampu menyusun kegiatan sesuai dengan program yang telah direncanakan sebelumnya.					

PELATIHAN					
8	Saya pernah mengikuti pelatihan teknis tentang penantausahaan laporan dana desa				
9	Saya selalu memahami materi pelatihan yang diberikan untuk membantu pengembangan keterampilan dalam tugas yang dilakukan.				
PENGALAMAN					
10	Saya memiliki pengalaman untuk menjalankan tugas di bidang akuntansi.				
11	Pengalaman yang saya miliki dapat membantu saya mengurangi kesalahan dalam bekerja.				
12	Saya selalu mengedepankan etika dan kode etik sebagai aparatur desa.				

3. PEMANFAATAN TEKNOLOGI

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
PENGUNAAN SOFTWARE APLIKASI						
1	Kami sebagai aparatur desa sudah menggunakan <i>software</i> dan aplikasi dalam pengelolaan dana desa.					
2	Kami melakukan pengolahan data transaksi keuangan dana desa menggunakan <i>software</i> atau aplikasi yang sesuai dengan perundang-undangan (SISKUEDES).					
PROSES AKUNTANSI SECARA KOMPUTERISASI						
3	Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan di desa kami dilakukan secara komputerisasi.					
4	Pengolahan data transaksi keuangan dana desa dilakukan secara komputerisasi untuk menjamin keakuratan hasil yang diperoleh.					
5	Komputerisasi dalam proses akuntansi keuangan mempermudah pekerjaan aparatur desa dalam menginput data secara cepat dan tepat waktu.					
LAPORAN DAN MANEJERIAL YANG TERINTEGRASI						
6	Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terinteragrasi.					
7	Desa kami telah melakukan pengelolaan keuangan dana desa secara utuh mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya.					

KEMAMPUAN PEGAWAI MENGOPERASIKAN KOMPUTER					
8	Kami sebagai aparatur desa memiliki kemampuan yang baik dalam mengoperasikan komputer.				
9	Kami sebagai aparatur desa memiliki kemampuan mengakses internet menggunakan komputer				
10	Kami sebagai aparatur desa memiliki kemampuan dalam menggunakan aplikasi SISKUEDES.				

4. SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
PERENCANAAN						
1	Pemerintah desa kami sebagai pemegang amanah (<i>agent</i>) mampu membuat perencanaan dengan melaporkan segala aktivitas dari kegiatan, dibuktikan dengan memberikan pertanggungjawaban dan menyajikan laporan hasil perencanaan, sehingga tercipta perencanaan yang transparan dan akuntabel.					
2	Penyusunan APBDesa dilaksanakan tanpa tenaga pendamping/secara mandiri.					
3	Prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam musyawarah desa.					
PELAKSANAAN						
4	Pemerintah desa melaksanakan pengelolaan dana desa secara ekonomis, efisien dan efektif serta adil merata.					
5	Pemerintah desa tidak melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam PERDES.					
6	Kejujuran adalah modal utama yang dilaksanakan pemerintah desa dalam melaksanakan amanat rakyat untuk mencapai kesejahteraan rakyat.					
PENATAUSAHAAN						
7	Pemerintah desa telah melakukan pencatatan setiap penerimaan atau pengeluaran yang berhubungan dengan dana desa dan dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah juga dibuktikan dengan laporan pertanggungjawaban berupa RAB realisasi dana desa.					
8	Pemerintah desa kami melakukan tutup buku setiap akhir bulan.					

9	Bendahara desa mempertanggungjawabkan uang melalui laporan yang disampaikan setiap bulan kepada Kades dengan benar dan tepat waktu.					
PELAPORAN						
10	Pemerintah desa membuat dan memberikan laporan yang baik, benar dan tepat waktu atas semua aktivitas pengelolaan dana desa..					
11	Pemerintah desa melaporkan setiap aktivitas penggunaan dana desa secara tepat waktu dimulai dari laporan penerimaan dana desa hingga laporan realisasi dana desa.					
12	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.					
PERTANGGUNGJAWABAN						
13	Pengelolaan keuangan dana desa dilakukan secara terbuka, jujur, akuntabel, ekonomis, efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan.					
14	Pemerintah desa mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa kepada pemerintah dan masyarakat melalui laporan realisasi dana desa.					
15	Pemerintah desa kami telah melakukan pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat yang sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.					

Komentar

.....

.....

.....

.....

Terima kasih

Tanda Tangan

Kode Resp.	Item Pernyataan												Skor
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
R.039	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
R.040	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	50
R.041	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	50
R.042	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	50
R.043	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49
R.044	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R.045	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49
R.046	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R.047	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R.048	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R.049	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	47
R.050	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	46
R.051	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	47
R.052	4	4	3	3	3	3	3	5	5	3	5	5	46
R.053	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	43
R.054	4	4	4	3	3	4	5	5	5	4	5	5	51
R.055	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R.056	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R.057	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R.058	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	5	5	48
R.059	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	56
R.060	4	4	4	4	4	4	4	5	3	3	4	4	47
R.061	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
R.062	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
R.063	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
R.064	3	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	32
R.065	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	46
R.066	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	42
R.067	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
R.068	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	51
R.069	4	4	4	4	3	4	4	5	5	4	4	4	49
R.070	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R.071	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R.072	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	47
R.073	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	49
R.074	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	4	48
R.075	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R.076	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R.077	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R.078	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R.079	4	4	4	4	4	4	5	4	5	3	5	5	51
R.080	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	51
R.081	4	4	4	3	4	3	5	4	3	3	4	5	46

Kode Resp.	Item Pernyataan												Skor
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
R.125	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
R.126	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	42
R.127	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	42
R.128	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	40
R.129	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	40
R.130	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	45
R.131	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R.132	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R.133	4	4	4	4	3	4	4	2	2	2	2	5	40
R.134	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	40
R.135	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	51
R.136	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	57
R.137	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
R.138	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
R.139	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
R.140	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
R.141	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
R.142	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	40
R.143	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	40
R.144	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	40
R.145	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
R.146	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	40
R.147	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	40
R.148	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	57
R.149	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	58
R.150	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	58
R.151	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	40
R.152	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	40
R.153	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	56
R.154	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	56
R.155	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	40
R.156	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	57
R.157	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	57
R.158	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	57
R.159	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
R.160	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	40
R.161	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	40
R.162	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	40

B. Pemanfaatan Teknologi (X₂)

Kode Resp.	Item Pernyataan										Skor
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
R.001	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	43
R.002	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	43
R.003	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	43
R.004	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	47
R.005	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
R.006	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	47
R.007	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R.008	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	48
R.009	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R.010	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R.011	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	49
R.012	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	46
R.013	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
R.014	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
R.015	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
R.016	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	42
R.017	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R.018	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R.019	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
R.020	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	46
R.021	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	48
R.022	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	43
R.023	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
R.024	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	48
R.025	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	40
R.026	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	40
R.027	5	4	5	4	5	4	4	3	4	4	42
R.028	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R.029	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R.030	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
R.031	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	47
R.032	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	47
R.033	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	47
R.034	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	41
R.035	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R.036	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	41
R.037	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
R.038	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
R.039	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
R.040	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	48
R.041	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	48
R.042	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	48

C. Sistem Pengelolaan Dana Desa (Z)

Kode Resp.	Item Pernyataan															Skor
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
R.001	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	67
R.002	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	67
R.003	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	65
R.004	5	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	70
R.005	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	74
R.006	4	2	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	59
R.007	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
R.008	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	72
R.009	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
R.010	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
R.011	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	73
R.012	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	73
R.013	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	73
R.014	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	73
R.015	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	73
R.016	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	64
R.017	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	57
R.018	5	1	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	62
R.019	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
R.020	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	68
R.021	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	68
R.022	5	4	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5	5	5	71
R.023	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	74
R.024	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
R.025	5	3	5	5	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	68
R.026	5	3	5	5	4	5	5	4	4	3	3	4	5	5	5	65
R.027	5	3	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	66
R.028	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
R.029	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
R.030	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	72
R.031	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	3	5	5	5	70
R.032	5	3	5	4	5	5	5	5	5	4	5	3	5	5	5	69
R.033	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	71
R.034	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	60
R.035	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	59
R.036	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	59
R.037	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
R.038	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
R.039	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
R.040	4	3	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	4	5	66
R.041	4	3	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	4	5	66
R.042	4	3	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	4	5	66

Kode Resp.	Item Pernyataan															Skor
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
R.043	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	3	5	4	4	62
R.044	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	3	5	4	4	62
R.045	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	3	5	4	4	62
R.046	4	3	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61
R.047	4	3	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61
R.048	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63
R.049	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	60
R.050	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	60
R.051	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	60
R.052	4	3	5	4	4	5	5	4	4	4	4	3	5	5	4	63
R.053	4	2	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	64
R.054	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	71
R.055	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
R.056	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
R.057	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
R.058	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	69
R.059	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
R.060	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	71
R.061	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	71
R.062	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	71
R.063	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	71
R.064	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	58
R.065	5	2	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	69
R.066	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	55
R.067	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	71
R.068	5	3	5	5	3	5	5	4	4	4	5	4	5	5	4	66
R.069	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	68
R.070	4	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	57
R.071	4	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	57
R.072	4	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	57
R.073	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	68
R.074	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	65
R.075	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	65
R.076	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	59
R.077	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	59
R.078	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	59
R.079	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	73
R.080	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	73
R.081	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	73
R.082	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
R.083	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
R.084	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	70
R.085	4	2	4	4	5	5	5	4	5	4	4	2	5	4	4	61

Kode Resp.	Item Pernyataan															Skor
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
R.086	4	2	4	4	5	5	5	4	5	4	4	2	5	4	4	61
R.087	4	2	4	4	5	5	5	4	5	4	4	2	5	4	4	61
R.088	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	72
R.089	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	71
R.090	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	74
R.091	5	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	71
R.092	5	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	71
R.093	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	72
R.094	5	3	5	3	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5	4	66
R.095	5	3	5	4	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5	4	68
R.096	5	3	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	69
R.097	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
R.098	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	72
R.099	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	65
R.100	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61
R.101	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	58
R.102	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
R.103	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	67
R.104	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	67
R.105	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	65
R.106	4	2	5	5	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
R.107	4	2	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	64
R.108	5	3	4	4	3	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	62
R.109	4	3	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	59
R.110	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
R.111	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
R.112	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
R.113	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
R.114	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
R.115	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
R.116	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62
R.117	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62
R.118	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62
R.119	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61
R.120	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61
R.121	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63
R.122	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
R.123	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	71
R.124	4	3	5	4	4	5	5	4	4	4	4	3	5	5	4	63
R.125	4	2	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	64
R.126	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	71
R.127	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	67
R.128	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	67

D. Kinerja Pemerintah Desa (Y)

Kode Resp.	Item Pernyataan										Skor
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
R.001	4	5	5	4	5	4	5	4	4	4	44
R.002	4	5	5	4	5	4	5	4	4	4	44
R.003	4	5	5	4	5	4	5	4	4	4	44
R.004	5	5	5	4	4	4	5	5	4	5	46
R.005	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
R.006	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	44
R.007	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R.008	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	47
R.009	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R.010	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R.011	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
R.012	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
R.013	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
R.014	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
R.015	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
R.016	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R.017	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R.018	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R.019	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
R.020	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	49
R.021	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	49
R.022	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
R.023	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	47
R.024	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	48
R.025	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	47
R.026	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	47
R.027	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	48
R.028	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R.029	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R.030	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
R.031	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
R.032	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
R.033	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
R.034	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	42
R.035	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	42
R.036	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	42
R.037	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
R.038	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
R.039	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
R.040	4	5	5	5	5	4	4	5	4	5	46
R.041	4	5	5	5	5	4	4	5	4	5	46
R.042	4	5	5	5	5	4	4	5	4	5	46

Kode Resp.	Item Pernyataan										Skor
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
R.043	5	4	5	5	4	5	4	4	3	4	43
R.044	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	44
R.045	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	44
R.046	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	47
R.047	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	47
R.048	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	47
R.049	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
R.050	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
R.051	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
R.052	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
R.053	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R.054	5	5	5	4	5	5	4	4	4	5	46
R.055	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	42
R.056	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	42
R.057	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	42
R.058	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
R.059	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
R.060	5	4	5	5	4	5	4	4	4	5	45
R.061	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
R.062	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
R.063	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
R.064	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R.065	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	46
R.066	4	4	4	4	5	4	4	4	3	4	40
R.067	4	5	5	4	4	5	5	5	4	5	46
R.068	4	4	4	5	5	4	4	5	4	5	44
R.069	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	47
R.070	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
R.071	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
R.072	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
R.073	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	44
R.074	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	43
R.075	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
R.076	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R.077	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R.078	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R.079	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	48
R.080	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
R.081	5	4	5	5	4	5	5	5	3	4	45
R.082	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R.083	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R.084	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
R.085	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41

Kode Resp.	Item Pernyataan										Skor
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
R.086	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	43
R.087	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41
R.088	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	48
R.089	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	48
R.090	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	48
R.091	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
R.092	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
R.093	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
R.094	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
R.095	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
R.096	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
R.097	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
R.098	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
R.099	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	44
R.100	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	43
R.101	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	42
R.102	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R.103	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	48
R.104	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	48
R.105	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	48
R.106	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
R.107	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
R.108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R.109	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	42
R.110	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
R.111	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
R.112	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
R.113	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	46
R.114	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	46
R.115	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	46
R.116	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	43
R.117	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	44
R.118	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	44
R.119	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	47
R.120	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	47
R.121	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	47
R.122	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
R.123	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
R.124	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	48
R.125	5	3	4	5	4	4	4	5	4	4	42
R.126	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	49
R.127	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	48
R.128	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	47

Lampiran. 3

**UJI KUALITAS DATA
(VALIDITAS DAN RELIABILITAS)**

A. Kualitas Sumber Daya Manusia (X₁)**Reliability****Scale: ALL VARIABLES****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	162	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	162	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.934	12

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X1.1	4.33	.509	162
X1.2	4.31	.528	162
X1.3	4.24	.483	162
X1.4	4.07	.616	162
X1.5	4.15	.592	162
X1.6	4.16	.589	162
X1.7	4.20	.577	162
X1.8	4.03	.962	162
X1.9	3.86	.874	162
X1.10	3.72	.900	162
X1.11	3.93	.899	162
X1.12	4.28	.528	162

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	44.97	35.297	.741	.928
X1.2	44.98	35.062	.750	.928
X1.3	45.06	35.457	.755	.928
X1.4	45.22	35.019	.636	.931
X1.5	45.15	34.549	.738	.927
X1.6	45.14	34.677	.723	.928
X1.7	45.10	34.586	.753	.927
X1.8	45.27	30.718	.788	.927
X1.9	45.43	31.837	.754	.927
X1.10	45.57	31.041	.816	.924
X1.11	45.36	31.786	.734	.928
X1.12	45.01	36.099	.576	.933

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
49.30	40.036	6.327	12

B. Pemanfaatan Teknologi (X₂)**Reliability****Scale: ALL VARIABLES****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	162	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	162	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.940	10

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X2.1	4.62	.500	162
X2.2	4.67	.471	162
X2.3	4.57	.508	162
X2.4	4.51	.502	162
X2.5	4.57	.497	162
X2.6	4.44	.498	162
X2.7	4.51	.501	162
X2.8	4.35	.614	162
X2.9	4.37	.599	162
X2.10	4.33	.600	162

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	40.33	15.290	.728	.936
X2.2	40.27	15.566	.700	.937
X2.3	40.37	15.042	.783	.933
X2.4	40.44	14.782	.870	.929
X2.5	40.38	14.932	.836	.931
X2.6	40.50	15.084	.789	.933
X2.7	40.43	15.203	.750	.935
X2.8	40.60	14.490	.754	.935
X2.9	40.57	14.656	.735	.936
X2.10	40.61	14.885	.679	.939

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
44.94	18.388	4.288	10

C. Sistem Pengelolaan Dana Desa (Z)

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	162	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	162	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.915	15

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Z.1	4.54	.500	162
Z.2	3.81	.975	162
Z.3	4.59	.505	162
Z.4	4.40	.561	162
Z.5	4.54	.559	162
Z.6	4.69	.463	162
Z.7	4.60	.492	162
Z.8	4.41	.517	162
Z.9	4.43	.509	162
Z.10	4.36	.508	162
Z.11	4.40	.516	162
Z.12	4.07	.792	162
Z.13	4.62	.488	162
Z.14	4.56	.498	162
Z.15	4.45	.499	162

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Z.1	61.93	29.982	.688	.908
Z.2	62.65	29.234	.362	.929
Z.3	61.87	30.213	.636	.909
Z.4	62.07	29.331	.717	.907
Z.5	61.93	29.460	.697	.907
Z.6	61.77	30.252	.694	.908
Z.7	61.86	29.832	.731	.907
Z.8	62.06	30.078	.644	.909
Z.9	62.03	29.931	.684	.908
Z.10	62.10	29.543	.761	.906
Z.11	62.06	29.574	.741	.906
Z.12	62.39	29.941	.396	.921
Z.13	61.85	29.908	.723	.907
Z.14	61.91	29.836	.719	.907
Z.15	62.01	29.863	.713	.907

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
66.46	34.002	5.831	15

D. Kinerja Pemerintah Desa (Y)

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	162	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	162	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.926	10

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y.1	4.62	.486	162
Y.2	4.52	.525	162
Y.3	4.58	.495	162
Y.4	4.61	.489	162
Y.5	4.57	.496	162
Y.6	4.58	.495	162
Y.7	4.51	.502	162
Y.8	4.49	.501	162
Y.9	4.28	.549	162
Y.10	4.53	.501	162

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	40.67	12.807	.642	.922
Y.2	40.77	12.277	.740	.917
Y.3	40.71	12.406	.753	.917
Y.4	40.68	12.530	.724	.918
Y.5	40.72	12.279	.791	.915
Y.6	40.71	12.158	.832	.912
Y.7	40.78	12.295	.776	.915
Y.8	40.80	12.371	.752	.917
Y.9	41.01	12.882	.531	.929
Y.10	40.76	12.743	.639	.923

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
45.29	15.276	3.908	10

Lampiran. 4

REKAPITULASI DATA PENELITIAN

Kode Resp.	Kualitas SDM (X₁)	Pemanfaatan Teknologi (X₂)	Sistem Pengelolaan Dana Desa (Z)	Kinerja Pemerintah Desa (Y)
R.001	45	43	67	44
R.002	45	43	67	44
R.003	45	43	65	44
R.004	49	47	70	46
R.005	60	50	74	50
R.006	48	47	59	44
R.007	48	40	60	40
R.008	48	48	72	47
R.009	48	40	60	40
R.010	47	40	60	40
R.011	53	49	73	49
R.012	51	46	73	49
R.013	60	50	73	50
R.014	60	50	73	50
R.015	60	50	73	50
R.016	48	42	64	40
R.017	48	40	57	40
R.018	48	40	62	40
R.019	56	50	75	50
R.020	51	46	68	49
R.021	52	48	68	49
R.022	54	43	71	50
R.023	56	50	74	47
R.024	53	48	75	48
R.025	47	40	68	47
R.026	48	40	65	47
R.027	47	42	66	48
R.028	45	40	60	40
R.029	45	40	60	40
R.030	57	50	72	50
R.031	52	47	70	49
R.032	52	47	69	49
R.033	52	47	71	49
R.034	47	41	60	42
R.035	47	40	59	42
R.036	47	41	59	42
R.037	60	50	75	50
R.038	60	50	75	50
R.039	60	50	75	50

Kode Resp.	Kualitas SDM (X₁)	Pemanfaatan Teknologi (X₂)	Sistem Pengelolaan Dana Desa (Z)	Kinerja Pemerintah Desa (Y)
R.040	50	48	66	46
R.041	50	48	66	46
R.042	50	48	66	46
R.043	49	42	62	43
R.044	48	43	62	44
R.045	49	42	62	44
R.046	48	40	61	47
R.047	48	40	61	47
R.048	48	40	63	47
R.049	47	42	60	41
R.050	46	42	60	41
R.051	47	42	60	41
R.052	46	47	63	49
R.053	43	39	64	40
R.054	51	49	71	46
R.055	48	40	60	42
R.056	48	40	60	42
R.057	48	40	60	42
R.058	48	50	69	50
R.059	56	49	75	50
R.060	47	48	71	45
R.061	60	50	71	50
R.062	60	50	71	50
R.063	60	50	71	50
R.064	32	40	58	40
R.065	46	43	69	46
R.066	42	37	55	40
R.067	50	40	71	46
R.068	51	44	66	44
R.069	49	47	68	47
R.070	48	40	57	39
R.071	48	40	57	39
R.072	47	40	57	39
R.073	49	43	68	44
R.074	48	43	65	43
R.075	48	40	65	41
R.076	48	40	59	40
R.077	48	40	59	40
R.078	48	40	59	40
R.079	51	47	73	48
R.080	51	50	73	49
R.081	46	49	73	45
R.082	48	40	60	40

Kode Resp.	Kualitas SDM (X₁)	Pemanfaatan Teknologi (X₂)	Sistem Pengelolaan Dana Desa (Z)	Kinerja Pemerintah Desa (Y)
R.083	48	40	60	40
R.084	49	47	70	49
R.085	48	40	61	41
R.086	50	40	61	43
R.087	48	40	61	41
R.088	41	50	72	48
R.089	40	50	71	48
R.090	42	50	74	48
R.091	56	49	71	49
R.092	59	49	71	49
R.093	58	50	72	49
R.094	48	49	66	41
R.095	48	49	68	41
R.096	48	49	69	41
R.097	48	42	60	41
R.098	32	50	72	39
R.099	54	40	65	44
R.100	44	45	61	43
R.101	48	39	58	42
R.102	54	45	60	40
R.103	42	50	67	48
R.104	48	49	67	48
R.105	47	49	65	48
R.106	45	44	60	41
R.107	46	44	64	41
R.108	54	50	62	40
R.109	54	39	59	42
R.110	50	50	75	50
R.111	60	50	75	50
R.112	60	50	75	50
R.113	40	48	60	46
R.114	40	48	60	46
R.115	40	48	60	46
R.116	49	42	62	43
R.117	48	43	62	44
R.118	49	42	62	44
R.119	50	40	61	47
R.120	55	40	61	47
R.121	54	40	63	47
R.122	54	42	60	41
R.123	60	50	71	50
R.124	39	47	63	48
R.125	50	40	64	42

Kode Resp.	Kualitas SDM (X₁)	Pemanfaatan Teknologi (X₂)	Sistem Pengelolaan Dana Desa (Z)	Kinerja Pemerintah Desa (Y)
R.126	42	47	71	49
R.127	42	49	67	48
R.128	40	50	67	47
R.129	40	50	65	48
R.130	45	40	61	41
R.131	48	40	60	40
R.132	48	40	60	41
R.133	40	37	73	50
R.134	40	45	73	50
R.135	51	46	73	50
R.136	57	50	75	50
R.137	60	50	75	50
R.138	60	50	75	50
R.139	60	50	72	48
R.140	48	49	71	44
R.141	60	50	74	49
R.142	40	50	60	40
R.143	40	49	70	40
R.144	40	49	73	49
R.145	60	41	73	50
R.146	40	50	73	50
R.147	40	46	73	50
R.148	57	42	64	40
R.149	58	40	57	40
R.150	58	40	62	40
R.151	40	50	75	50
R.152	40	48	68	40
R.153	56	40	68	49
R.154	56	43	71	50
R.155	40	50	74	47
R.156	57	45	74	50
R.157	57	40	60	40
R.158	57	40	74	48
R.159	60	37	73	49
R.160	40	50	60	50
R.161	40	50	73	50
R.162	40	50	75	40

Lampiran. 5

ANALISIS DATA**Statistik Deskriptif****Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
X1	162	32	60	7986	49.30	6.327	40.036
X2	162	37	50	7281	44.94	4.288	18.388
Z	162	55	75	10767	66.46	5.831	34.002
Y	162	39	50	7337	45.29	3.908	15.276
Valid N (listwise)	162						

Analisis Korelasi**Correlations**

		X1	X2	Z	Y
X1	Pearson Correlation	1	.097	.319**	.340**
	Sig. (2-tailed)		.221	.000	.000
	N	162	162	162	162
X2	Pearson Correlation	.097	1	.681**	.581**
	Sig. (2-tailed)	.221		.000	.000
	N	162	162	162	162
Z	Pearson Correlation	.319**	.681**	1	.759**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	162	162	162	162
Y	Pearson Correlation	.340**	.581**	.759**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	162	162	162	162

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Normalitas Data**NPar Tests****One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		X1	X2	Z	Y
N		162	162	162	162
Normal Parameters ^a	Mean	49.30	44.94	66.46	45.29
	Std. Deviation	6.327	4.288	5.831	3.908
Most Extreme Differences	Absolute	.137	.178	.146	.157
	Positive	.137	.178	.142	.148
	Negative	-.099	-.169	-.146	-.157
Kolmogorov-Smirnov Z		1.740	2.266	1.857	2.001
Asymp. Sig. (2-tailed)		.005	.000	.002	.001

a. Test distribution is Normal.

Analisis Jalur Substruktur 1

Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2, X1 ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Z

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.727 ^a	.529	.523	4.028	1.411

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Z

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2894.688	2	1447.344	89.211	.000 ^a
	Residual	2579.590	159	16.224		
	Total	5474.278	161			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Z

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14.737	3.980		3.703	.000		
	X1	.235	.050	.255	4.664	.000	.991	1.009
	X2	.893	.074	.657	12.007	.000	.991	1.009

a. Dependent Variable: Z

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	X1	X2
1	1	2.984	1.000	.00	.00	.00
	2	.012	15.793	.03	.84	.24
	3	.004	27.287	.97	.16	.76

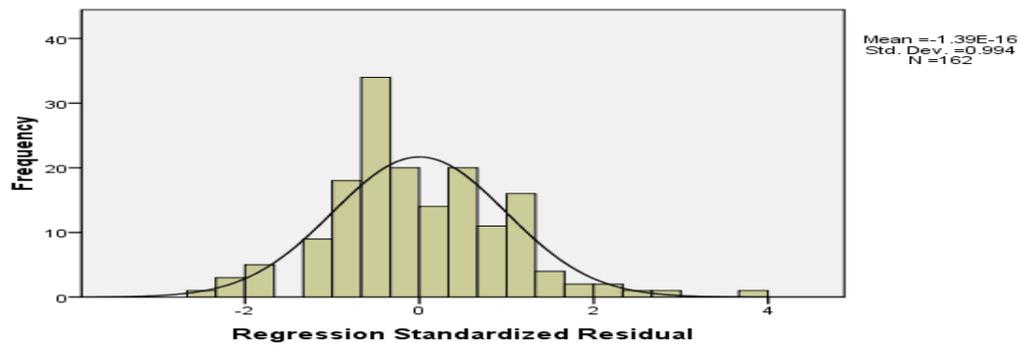
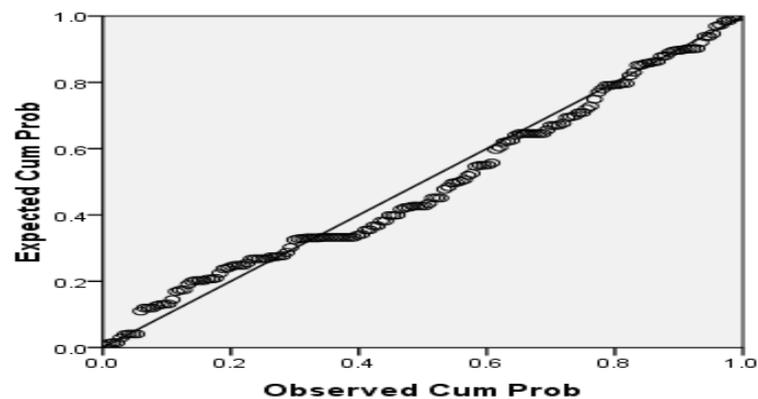
a. Dependent Variable: Z

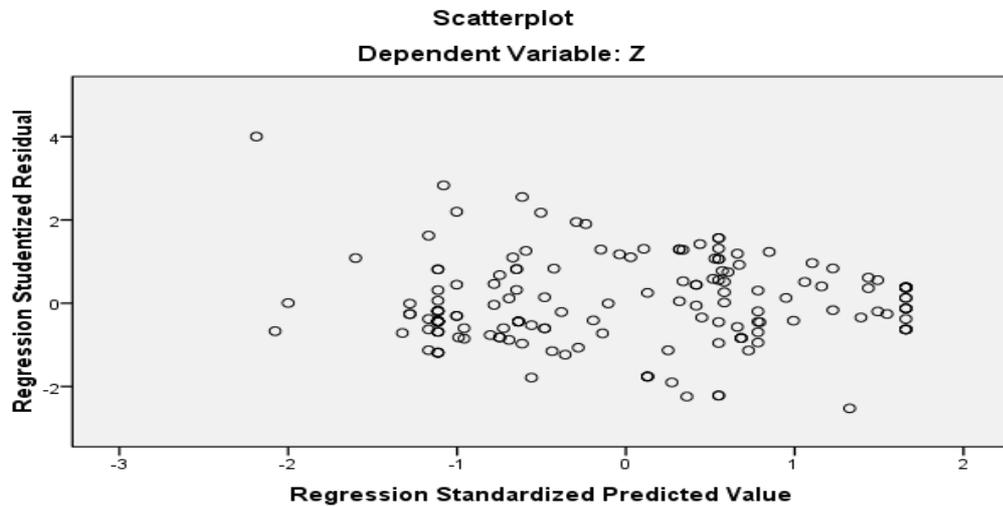
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	57.18	73.49	66.46	4.240	162
Std. Predicted Value	-2.189	1.658	.000	1.000	162
Standard Error of Predicted Value	.335	1.032	.531	.135	162
Adjusted Predicted Value	56.56	73.57	66.45	4.249	162
Residual	-10.083	15.817	.000	4.003	162
Std. Residual	-2.503	3.927	.000	.994	162
Stud. Residual	-2.525	4.004	.001	1.005	162
Deleted Residual	-10.261	16.441	.008	4.097	162
Stud. Deleted Residual	-2.569	4.209	.003	1.016	162
Mahal. Distance	.121	9.576	1.988	1.569	162
Cook's Distance	.000	.211	.008	.022	162
Centered Leverage Value	.001	.059	.012	.010	162

a. Dependent Variable: Z

Charts

Histogram
Dependent Variable: ZNormal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Z



Analisis Jalur Substruktur 2

Regression

Variables Entered/Removed^d

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Z, X1, X2 ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

Model Summary^d

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.773 ^a	.598	.590	2.501	1.395

a. Predictors: (Constant), Z, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^d

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1470.885	3	490.295	78.369	.000 ^a
	Residual	988.479	158	6.256		
	Total	2459.364	161			

a. Predictors: (Constant), Z, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.826	2.576		3.038	.003		
	X1	.079	.033	.128	2.378	.019	.871	1.148
	X2	.134	.064	.147	2.102	.037	.520	1.925
	Z	.414	.049	.618	8.410	.000	.471	2.122

a. Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics^a

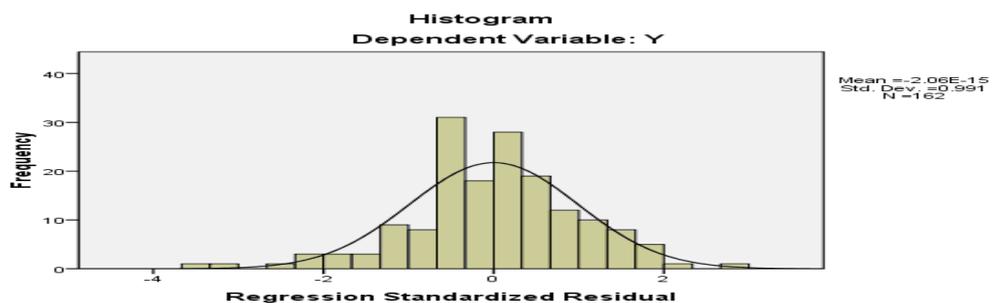
Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	X1	X2	Z
1	1	3.981	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	.013	17.694	.01	.77	.09	.02
	3	.004	30.376	.99	.10	.14	.09
	4	.002	41.207	.00	.12	.78	.90

a. Dependent Variable: Y

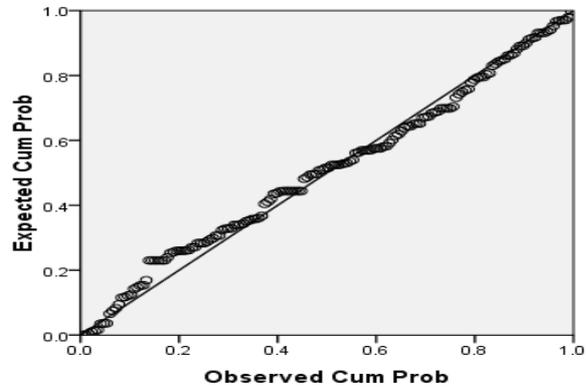
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	38.90	50.35	45.29	3.023	162
Std. Predicted Value	-2.115	1.675	.000	1.000	162
Standard Error of Predicted Value	.208	.919	.377	.110	162
Adjusted Predicted Value	38.86	50.36	45.29	3.027	162
Residual	-8.766	7.446	.000	2.478	162
Std. Residual	-3.505	2.977	.000	.991	162
Stud. Residual	-3.587	3.071	.001	1.007	162
Deleted Residual	-9.184	7.926	.004	2.562	162
Stud. Deleted Residual	-3.731	3.157	.000	1.018	162
Mahal. Distance	.124	20.727	2.981	2.649	162
Cook's Distance	.000	.220	.009	.026	162
Centered Leverage Value	.001	.129	.019	.016	162

a. Dependent Variable: Y

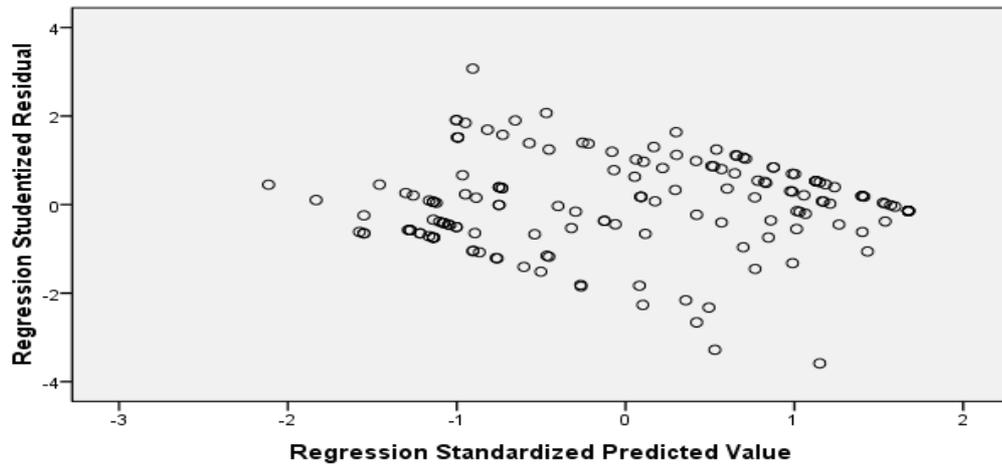
Charts

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Y



Scatterplot

Dependent Variable: Y



Analisis Data Untuk Uji Sobel

Regression

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.319 ^a	.102	.096	5.544

a. Predictors: (Constant), X1

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	555.807	1	555.807	18.081	.000 ^a
	Residual	4918.471	160	30.740		
	Total	5474.278	161			

a. Predictors: (Constant), X1

b. Dependent Variable: Z

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	51.987	3.432		15.147	.000
	X1	.294	.069	.319	4.252	.000

a. Dependent Variable: Z

Regression

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.766 ^a	.587	.582	2.528

a. Predictors: (Constant), Z, X1

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1443.230	2	721.615	112.915	.000 ^a
	Residual	1016.134	159	6.391		
	Total	2459.364	161			

a. Predictors: (Constant), Z, X1

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.707	2.441		3.976	.000
	X1	.067	.033	.109	2.022	.045
	Z	.486	.036	.724	13.470	.000

a. Dependent Variable: Y

Regression**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.681 ^a	.464	.461	4.281

a. Predictors: (Constant), X2

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2541.788	1	2541.788	138.683	.000 ^a
	Residual	2932.490	160	18.328		
	Total	5474.278	161			

a. Predictors: (Constant), X2

b. Dependent Variable: Z

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24.818	3.552		6.986	.000
	X2	.927	.079	.681	11.776	.000

a. Dependent Variable: Z

Regression**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.764 ^a	.584	.578	2.538

a. Predictors: (Constant), Z, X2

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1435.516	2	717.758	111.465	.000 ^a
	Residual	1023.848	159	6.439		
	Total	2459.364	161			

a. Predictors: (Constant), Z, X2

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.220	2.405		4.249	.000
	X2	.108	.064	.118	1.691	.093
	Z	.455	.047	.679	9.705	.000

a. Dependent Variable: Y

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : ARFAH LUBIS
Tempat / tanggal lahir : Medan / 17 Nopember 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun II Bandar Setia Percut Sei Tuan
Anak Ke : 1 (Satu)

Orang Tua

Nama Ayah : Alm H. Syjaruddin Lubis
Nama Ibu : Almh Hj. Sawaliah Rangkuti

Pendidikan Formal

1. SD Swasta Taman Harapan : 1985-1991
2. SMP Negeri 10 Medan : 1991-1994
3. SMK Teladan : 1994-1997
4. S1 UMSU : 1998-2002
5. Tahun 2017-2020 tercatat sebagai Mahasiswa Program Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.